

Depict Pristine Adi, M.Pd.



Buku Ajar **Konsep Dasar IPS Terpadu**

Tematik dan Terintegrasi
untuk Madrasah Ibtidaiyah

Jilid 1

Buku Ajar
Konsep Dasar IPS Terpadu
Tematik dan Terintegrasi
untuk Madrasah Ibtidaiyah
Jilid 1

Depict Pristine Adi, M.Pd.

**Konsep Dasar IPS Terpadu
Tematik dan Terintegrasi untuk Madrasah Ibtidaiyah**

Depict Pristine Adi, M.Pd.

Cetakan Pertama, Oktober 2021
Editor: Ahmad Dhiyaa Ulhaq
Layout & Desain Grafis: Haryono

Hak Cipta © Dilindungi Undang-Undang. Dilarang
memperbanyak tanpa ijin penerbit dan penulis.

Kata Pengantar

Bismillah Walhamdulillah penulis haturkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan buku ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Pemahaman Konsep Dasar IPS Terpadu menjadi satu hal penting guna mencapai tujuan Pendidikan IPS. Salah satu tema NCSS dalam kajian IPS. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran belum mencerminkan Konsep pembelajaran IPS secara Terpadu, Tematik dan Terintegrasi. Pelaksanaan yang pembelajaran IPS yang terpadu dan tematik akan menjadikan kegiatan pembelajaran lebih bermakna karena setiap kejadian dalam kehidupan masyarakat dapat diberikan secara detail sesuai dengan fenomena sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Buku Ajar ini hadir untuk memaparkan tentang bagaimana konsep dasar IPS Terpadu hingga pemaparan tematik terintegrasi pada pembelajaran IPS. Buku yang membahas tentang pemahaman konsep dasar IPS Terpadu untuk Madrasah Ibtidaiyah jarang ditemui dipasaran. Oleh karena itu, melalui buku ini, penulis berusaha untuk memaparkan makna manusia sesungguhnya sebagai mata pelajaran yang tematik dan terintegrasi. Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu buku sumber belajar bagi para mahasiswa PGMI semester 4. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan buku-buku lain yang berkaitan dengan Pendidikan IPS untuk Madrasah Ibtidaiyah.

Terakhir, penulis sadar bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Buku Ajar ini pastinya belum sesempurna sesuai dengan harapan para pembaca. Karenanya, penulis berharap memperoleh saran dan kritik dari para pembaca dan professional guna perbaikan ke depannya.

Jember, Oktober 2021
Depict Pristine Adi

Daftar Isi

KEGIATAN BELAJAR 1 Hakekat, Paradigma, Dan Landasan Kurikulum Pendidikan IPS MI/SD	1
KEGIATAN BELAJAR 2 Konsep Dasar Ilmu-Ilmu Sosial (Sosiologi, Geografi, Sejarah, Ekonomi, Antropologi, Politik)....	17
KEGIATAN BELAJAR 3 Individu, Kelompok, Dan Kelembagaan.....	123
KEGIATAN BELAJAR 4 Ruang, Waktu dan Perubahan Sejarah Indonesia	139
KEGIATAN BELAJAR 5 Perubahan dan Konflik Sosial.....	167
KEGIATAN BELAJAR 6 Perilaku Ekonomi dan Keadilan.....	201
KEGIATAN BELAJAR 7 Demografi Indonesia	224

KEGIATAN BELAJAR 1

Hakekat, Paradigma, Dan Landasan Kurikulum Pendidikan IPS MI/SD

Manusia tidak bisa dipisahkan dari manusia lainnya sejak lahir, terutama dengan kedua orang tua khususnya ibu yang telah melahirkannya. Sejak saat lahir, manusia telah melakukan hubungan sosial meski hanya dengan anggota keluarga terdekat. Tanpa hubungan sosial dan bantuan dari anggota keluarga lain, manusia tidak akan berdaya dan tidak akan mampu berkembang dengan baik. Pada tahap selanjutnya, manusia akan mulai mengenal kehidupan lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengenalan manusia lain di luar dirinya, tidak hanya sebatas pada kerabat, melainkan pada teman-teman sepermainan, tetangga, warga kampung, dan sebagainya. Hubungan sosial yang dialami oleh manusia tersebut akan semakin luas. Dari pengenalan dan pengalaman berhubungan sosial, manusia akan memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk hidup bermasyarakat, sifat-sifat orang lain, tempat yang pernah dikunjungi, hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang salah serta benar dalam hidup bermasyarakat.

Pengetahuan yang melekat pada manusia tersebut dapat dirangkum sebagai pengetahuan sosial. Kelahiran manusia yang kemudian diikuti dengan hubungan sosial, pergaulan, penjelajahan, pemenuhan kebutuhan dan lainnya yang dialami dalam kehidupan di masyarakat, telah membentuk pengetahuan sosial ke dalam diri manusia. Pada dunia pendidikan formal, pengetahuan sosial tersebut secara resmi disebut sebagai Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dengan demikian, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dianggap sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia serta hubungan sosial manusia.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memajukan serta mengkaji hubungan sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pendidikan IPS terorganisasikan secara sistematis dalam pengajaran dan kurikulum di sekolah, berfungsi untuk mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970 an sebagai hasil kesepakatan komonitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum tersebut IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi serta nama mata pelajaran ilmu sosial yang lainnya. Nama IPS ini sejajar dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang disingkat IPA sebagai integrasi dari nama mata pelajaran biologi, kimia, fisika. Menurut Somantri penggunaan istilah IPS dan IPA dimaksudkan untuk membedakannya dengan nama-nama disiplin ilmu di universitas¹.

Istilah pendidikan IPS merupakan istilah yang sejajar dengan istilah pendidikan IPA. Menurut Nu`man Somantri, istilah ini adalah penegasan dan akibat dari istilah IPS-IPA saja agar bisa dibedakan dengan pendidikan kepa tingkat unversitas. Dalam lingkup filsafat ilmu, disiplin ilmu – ilmu sosial dan ilmu pendidikan, istilah pendidikan IPS belum dikenal baik sebagai sub disiplin ilmu atau cabang dari disiplin ilmu. Dalam kepustakann asing, istilah yang lazim digunakan antara lain, *social studies, social education, social studies education, social science education, citizenship education, studies of society and environment*.

Pendidikan IPS disekolah merupakan mata pelajaran atau bidang kajian yang menduduki konsep dasar berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan pertimbangan psikologis serta kebermaknaanya bagi siswa dalam kehidupannya mulai dari tingkat MI sampai MA atau membekali dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam bidang Ilmu Sosial Diperguruan tinggi. Pendidikan IPS bukan merupakan

¹ Sapriya, Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017) hal.7

program pendidikan disiplin ilmu tetapi adalah suatu kajian tentang masalah – masalah sosial yang dikemas sedemikian rupa dengan mempertimbangkan faktor psikologis perkembangan peserta didik dan beban waktu kurikuler untuk program pendidikan. Dalam mengawali pembahasan mengenai pendidikan IPS di MI/SD, maka perlu diawali dengan pembahasan mengenai hakikat, paradigma serta landasan pendidikan IPS MI/SD.

Hakekat Dan Tujuan Pendidikan IPS MI/SD

Pendidikan IPS terdiri dari dua kata yaitu Pendidikan dan IPS. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan sebagai “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Adapun pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Somantri mendefinisikan pendidikan IPS dalam dua jenis, yaitu pendidikan IPS untuk pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan IPS untuk perguruan tinggi. “Pendidikan IPS untuk pendidikan dasar dan menengah yaitu pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan atau disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. Sementara pendidikan IPS untuk perguruan tinggi yaitu pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”.
2. Nu'man Somantri “Pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk

tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”.

3. Sapriya “IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”.
4. Kurnia “IPS adalah hasil seleksi dari hubungan interdisipliner antara ilmu pendidikan dengan disiplin ilmu sosial, hal ini semata-mata untuk tujuan pendidikan”.
5. Trianto ”IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya”.
6. Supardi IPS merupakan kajian integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora”.
7. Ahmadi IPS merupakan ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah atau bagi kelompok belajar lainnya yang sederajat”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan IPS adalah suatu ilmu terapan dari berbagai ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan mengikuti tujuan pendidikan yang telah ditentukan untuk dapat digunakan oleh siswa dalam melakukan hubungan sosial dan menghadapi permasalahan yang timbul dari lingkungan sosialnya.

Pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. Berbagai dimensi manusia dalam kehidupan sosialnya merupakan fokus kajian dari IPS. Aktivitas manusia dilihat dari dimensi waktu yang meliputi masa lalu, sekarang dan masa depan. Aktivitas manusia yang berkaitan dengan aspek keruangan atau geografis. Aktivitas sosial manusia memenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam dimensi arus produksi, distribusi dan konsumsi. Selain itu dikaji pula bagaimana manusia membentuk seperangkat peraturan sosial dalam menjaga pola interaksi sosial antar manusi dan bagaimana cara manusia memperoleh dan mempertahankan suatu kekuasaan. Pada intinya, fokus kajian IPS adalah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi

kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial².

Menurut Zuraik hakikat IPS adalah harapan untuk mampu membina suatu masyarakat yang para anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh tanggung jawab, sehingga oleh karenanya diciptakan nilai-nilai. Hakikat IPS di sekolah dasar memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sedini mungkin. Karena pendidikan IPS tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan semata, tetapi harus berorientasi pada perkembangan keterampilan berpikir kritis, sikap, dan kecakapan-kecakapan dasar siswa yang berpijak pada kenyataan sosial kemasyarakatan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan bagi kehidupan sosial siswa di masyarakat.

Materi pendidikan IPS yang akan dipelajari siswa harus didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini, Somantri merumuskan batasan dan tujuan pendidikan IPS untuk tingkat sekolah sebagai “suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, ideologi negara dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”³.

Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, pendidikan IPS harus mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, tujuan pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Hasan, tujuan pendidikan IPS dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tujuan pertama berorientasi pada pengembangan kemampuan

² Nana Supriatna, dkk. *Bahan Belajar Mandiri Pendidikan IPS di SD*, (Bandung: UPI PRESS, 2010), hlm. 9.

³ Nu`man, Somantri, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) hal 44

intelektual yang berhubungan dengan diri siswa dan kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial. Tujuan kedua berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat. Sedangkan tujuan ketiga lebih berorientasi pada pengembangan pribadi siswa baik untuk kepentingan dirinya, masyarakat maupun ilmu⁴.

Tujuan utama pendidikan IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Secara keseluruhan tujuan pendidikan IPS di MI/SD adalah sebagai berikut⁵ :

1. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat
2. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat
3. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian
4. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap, mental yang positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut
5. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS di MI/ SD bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan kemampuan intelektual serta keterampilan berpikir para siswa sedini mungkin agar berguna bagi diri siswa dalam kehidupan sehari-hari.

⁴ Said Hamid Hasan, *Pendidikan Ilmu Sosial* (Jakarta: Dirjendikti, Depdikbud RI, 1996), hlm. 107.

⁵ Rudy Gunawan, *Pendidikan IPS Filosofi, Konsep dan Aplikasi Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.52

Pendidikan IPS juga bertujuan untuk membekali para siswa agar dapat mengkaji kenyataan sosial serta memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.

Pendidikan IPS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dokumen Kurikulum 1975 yang memuat IPS sebagai mata pelajaran untuk pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Gagasan IPS di Indonesia pun banyak mengadopsi dan mengadaptasi dari sejumlah pemikiran perkembangan Social Studies yang terjadi di luar negeri terutama perkembangan pada NCSS sebagai organisasi profesional yang cukup besar pengaruhnya dalam memajukan social studies bahkan sudah mampu memengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan kurikulum persekolahan.

Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dengan humaniora dan ilmu pengetahuan alam yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu IPS di tingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik⁶.

Pendidikan IPS sebagai kajian akademik disebut juga IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu adalah PIPS sebagai seleksi dan integrasi dari disiplin ilmu ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan, dikemas secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk tujuan pendidikan. Artinya, berbagai tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep, struktur, cara kerja ilmuwan sosial, aspek metode maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial, dikemas secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk kepentingan pendidikan. Untuk memahami masalah PIPS seseorang hendaknya memiliki

⁶ Sapriya, Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017) hal.12

pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi struktur, ide fundamental, pertanyaan pokok (*mode of inquiry*), metode yang digunakan dan konsep-konsep setiap disiplin ilmu, disamping pemahamannya tentang prinsip-prinsip kependidikan dan psikologi serta permasalahan sosial.

Paradigma Pendidikan IPS MI/SD

Paradigma IPS adalah model atau kerangka berfikir pengembangan ips yang diwacanakan dalam kurikulum pada sistem pendidikan indonesia. IPS merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia. Ada istilah yang kadang kadang digunakan dalam menyebut bidang studi IPS yaitu: *social education* dan *social learning* yang menurut *Cheppy* kedua istilah tersebut lebih menitik beratkan kepada berbagai pengalaman sekolah yang dipandang dapat membantu anak didik untuk lebih mampu bergaul ditengah tengah masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial (IPS) adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis, gejala dan masalah masalah sosial dimasyarakat dengan meninjau dari beberapa aspek kehidupan atau satu perpaduan⁷. Sifat IPS sama dengan studi sosial yaitu praktis, interdisipliner dan diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. IPS yang diajarkan pada pendidikan menengah, mejadi dasar pengantar bagi mempelajari IPS/studi sosial ataupun ilmu sosial diperguruan Tinggi. Bahkan dalam kerangka kerjanya dapat saling melengkapi. Hasil penelaah IPS dapat dimanfaatkan oleh ilmu sosial, dapat dimanfaatkan oleh IPS.

Menurut pasal 37 UU RI No.20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa, mata pelajaran IPS merupakan salah satu bagian dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Tujuan utama pendidikan IPS di MI mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikam segala ketimpangan yang terjadi, trampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari – hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun masyarakat.

Tujuan IPS

⁷ Sardjiyo, dkk, 2014:1.26

- a. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan melalui pemahaman terhadap nilai nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.
- b. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadopsi dari ilmu – ilmu sosial,dan digunakan untuk memecahkan masalah
- c. Memperhatikan isu – isu dan maslah masalah sosial dan membuat analisis secara kritis
- d. Mengembangkan berbagai potensi untuk membangun diri sendiri agar survive ditengan globalisasi
- e. Mampu berkompetensi dan berpartisipasi dalam masyarat.

IPS sebagai bidang studi memiliki garapan yang dipelajari cukup luas meliputi gejala – gejala dan masalah kehidupan manusia dimasyarakat. Pada jenjang sekolah dasar(SD)dan Madrasah Ibtidaiyah(MI) mata pelajaran IPS membuat materi geografi,sejarah,sosiologi dan ekonomi.

Tujuan kurikuler yang dimaksud adalah tujuan pendidikan IPS. Secara keseluruhan tujuan pendidikan IPS di SD/MI sebagai berikut:

- a. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak dimasyarakat.
- b. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi,menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat.
- c. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang kealian.
- d. Membekali anak didik dengan kesadaran,sikap mental yang positif dan ketrampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut

Adapun implementasi Kurikulum 2004(KBK) merupakan satu trobosan untuk membuat pendidikan IPS menjadi lebih bermakna,walaupun hasilnya belum jelas kelihatan kurikulum ini telah dikubur.Keluarnya KTSP(Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan) secara prinsip sebenarnya ingin membuat pengembangan kurikulum IPS secara integral dipendidikan dasar (SD/MI). Pendidikan IPS di MI sudah mulai tertata sebagai pendidikan IPS integral⁸.

Sedangkan kurikulum IPS tahun 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep – konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan .
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai – nilai sosial dan kemanusiaan.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global.

Dalam kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, siswa dapat dibawa lingkungan alam dan masyarakat. Dengan lingkungan sekitar, siswa akan akrab dengan kondisi setempat sehingga mengetahui makna serta manfaat mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang nyata. Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari ilmu pengetahuan sosial secara nyata. Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari ilmu pengetahuan sosial disamping mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat, juga membentuk dirinya sebagai anggota masyarakat yang baik dengan menaati aturan yang berlaku dan turut pula mengembangkannya serta bermanfaat pula dalam mengembangkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada ruang lingkup mata pelajaran IPS SD/MI meliputi aspek aspek sebagai berikut

- a. Manusia, tempat dan lingkungan
- b. Waktu, keberlanjutan dan perubahan
- c. Sistem sosial dan budaya
- d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan

Pembelajaran IPS akan berhasil dengan baik apabila guru dapat memperhatikan cultural background dan cultural

⁸ Supardi, 2017:1-16

diversity⁹. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mempertimbangkan pengalaman dan latar belakang peserta didik sebagai landasan dasar, untuk memahami setiap permasalahan yang dihadapi. Menurut perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, siswa MI berada pada tahap operasional konkret. Oleh sebab itu, pembelajaran akan lebih berhasil apabila didasari oleh pengalaman pribadi peserta didik secara faktual dan konkret. Peserta didik belajar IPS siawali dari keadaan lingkungan sekitar, menyangkut aspek geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, pemerintahan (politik) dan lain lain. Selanjutnya, apabila sudah mantap berlanjut kepada jenjang berikutnya yaitu proses adaptasi.

Proses pembelajaran IPS akan dapat berhasil apabila guru memiliki bekal pengetahuan, formal IPS akan dapat berhasil apabila guru memiliki bekal pengetahuan, formal IPS, dan karakteristik IPS itu sendiri. Pelajaran IPS merupakan perpaduan dari 5 komponen yang terdiri dari:

1. Time
2. Space
3. Issues
4. Concept
5. Relationship

Pemahaman guru tentang konsep dan karakteristik pelajaran IPS merupakan modal penting untuk membimbing belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS. Oleh karena materi IPS di MI cukup luas, sedangkan waktu yang disediakan untuk pelajaran itu hanya 2 jam pelajaran setiap minggunya maka guru juga harus pandai pandai memilih materi pelajaran yang perlu diperhatikan sehingga terpenihi aspek keluasaan dan kedalaman materi.

1. Ilmu sosial (*social science*)

Menurut Gross ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial

⁹ Gorton dalam Handayani, 2014:1-15

secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk¹⁰.

2. Studi sosial (*study studies*)

Menurut Achmad Sanusi studi sosial sebagai berikut; studi sosial tidak selalu bertaraf akademis-universitas, bahkan merupakan bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar dan dapat berfungsi sebagai pengantar bagi lanjutan kepada disiplin disiplin sosial¹¹.

3. Pengetahuan sosial

Menurut Saidiharjo bahwa IPS merupakan kombinasi atau hasil perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti; geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, politik¹².

Pendekatan yang dilakukan studi sosial sangat berbeda dengan pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu sosial. Pendekatan studi sosial bersifat interdisipliner atau multidisipliner dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam ilmu sosial (*social sciences*) bersifat disiplin dari bidang ilmunya masing-masing.

Landasan Pendidikan IPS MI/SD

Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu seyogyanya memiliki landasan dalam pengembangan, baik sebagai mata pelajaran maupun pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini diharapkan akan dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi, dan pemanfaatan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Bagaimana dan mengapa struktur disiplin ilmu tersebut dibangun dan dikembangkan serta ke mana arah, tujuan, dan sasaran pengembangan dilakukan oleh masyarakat ilmiahnya. Landasan-landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu meliputi :¹³

¹⁰ Kasasih Djaharin, 1981:1

¹¹ Achmad Sanusi, 1971:18

¹² Saidiharjo, 1996:4

¹³ Sapriya, *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017, Cet. Ke-7), hlm.15

1. Landasan Filosofis, memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan apa obyek kajian atau domain apa saja yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu(aspek ontologis); bagaimana cara, proses, atau metode membangun dan mengembangkan pendidikan IPS hingga menentukan pengetahuan manakah yang dianggap benar, sah, valid atau terpercaya(aspek epistemologis); apa tujuan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu ini dibangun dan dikembangkan serta digunakan atau apakah manfaat dari pendidikan IPS (aspek aksiologis). Keberadaan landasan-landasan ini telah dan akan memperkokoh *body of knowledge* pendidikan IPS untuk eksis dan berkembang lebih luas lagi. Selama ini dikenal ada empat filsafat pendidikan yang meliputi *perennialism, essentialism, progressivism, dan reconstructionism*.
2. Landasan Ideologis, dimaksudkan sebagai sistem gagasan mendasar untuk memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan; (1) bagaimana keterkaitan antara *das sein* pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dan *das sollen* pendidikan IPS, (2) bagaimana keterkaitan antara teori-teori pendidikan dengan hakikat dan praksis etika, moral, politik, dan norma-norma perilaku dalam membangun dan mengembangkan pendidikan IPS.
3. Landasan Sosiologis, memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi, serta pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori atau prinsip-prinsip pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu.
4. Landasan Antropologis, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menentukan pola, sistem dan struktur pendidikan disiplin ilmu sehingga relevan dengan pola, sistem dan struktur kebudayaan bahkan dengan pola, sistem dan struktur perilaku manusia yang kompleks.
5. Landasan Kemanusiaan, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai

sasaran proses pendidikan. Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia.

6. Landasan Politis, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan dari pendidikan IPS. Peran dan keterlibatan pihak pemerintah dalam landasan ini sangat besar sehingga pendidikan tidak mungkin steril dari campur tangan unsur birokrasi.
7. Landasan Psikologis, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan cara-cara pendidikan IPS membangun struktur tubuh disiplin pengetahuannya, baik dalam tataran personal maupun komunal berdasarkan entitas-entitas psikologisnya.
8. Landasan Religius, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar tentang nilai-nilai, norma-norma, etika, dan moral yang menjadi jiwa yang melandasi keseluruhan bangunan pendidikan IPS, khususnya pendidikan di Indonesia. Landasan ini telah berlaku seja zaman Plato hingga Kant yang kemudian diakomodasi oleh Brameld (1956) melalui karya-karyanya, khususnya dalam filsafat rekonstruksionisme. Landasan religius ini telah dan akan menolak segala sesuatu yang bersifat relatif (faham relativis), irrasional, dan paham yang mengagungkan rasional semata yang tidak menempatkan agama sebagai landasan berpikir (*intraceptive knowledge*) atau kelompok manusia yang merasa menjadi pemenang dalam mengembangkan peradaban manusia, *intellectus quaerens fidem* (Somantri, 2001). Landasan religius yang diterapkan di Indonesia menghendaki adanya keseimbangan antara pengembangan mater yang bersumber dari *intraceptive knowledge* dan *extraceptive knowledge*.

Rangkuman

Pendidikan IPS adalah suatu ilmu terapan dari berbagai ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan mengikuti tujuan pendidikan yang telah ditentukan untuk dapat digunakan oleh siswa dalam melakukan hubungan sosial dan menghadapi permasalahan yang timbul dari lingkungan sosialnya. Fokus kajian IPS adalah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial.

Hakikat IPS di sekolah dasar memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sedini mungkin. Karena pendidikan IPS tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan semata, tetapi harus berorientasi pada perkembangan keterampilan berpikir kritis, sikap, dan kecakapan-kecakapan dasar siswa yang berpijak pada kenyataan sosial kemasyarakatan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan bagi kehidupan sosial siswa di masyarakat. Tujuan utama pendidikan IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Paradigma IPS adalah model atau kerangka berfikir pengembangan ips yang diwacanakan dalam kurikulum pada sistem pendidikan indonesia. IPS merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia. Ada istilah yang kadang kadang digunakan dalam menyebut bidang studi IPS yaitu: *social education* dan *social learning* yang menurut *Cheppy* kedua istilah tersebut lebih menitik beratkan kepada berbagai pengalaman sekolah yang dipandang dapat membantu anak didik untuk lebih mampu bergaul ditengah tengah masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial (IPS) adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis, gejala dan masalah masalah sosial dimasyarakat dengan meninjau dari beberapa aspek kehidupan atau satu perpaduan.

Landasan-landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu meliputi landasan filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis, kemanusiaan, politik, psikologis dan religius. Landasan ini diharapkan akan dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi, dan pemanfaatan pendidikan IPS.

REFERENSI

Gunawan, Rudy. 2016. *Pendidikan IPS Filosofi, Konsep dan Aplikasi Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.

- Hasan, Said Hamid. 1996. *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Dirjendikti, Depdikbud RI.
- Sapriya. 2017. *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Somantri, Nu'man. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Supriatna, Nana, dkk,. 2010. *Bahan Belajar Mandiri Pendidikan IPS di SD*. Bandung: UPI PRESS.
- Susanto, Ahmad. 2014. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yulia Siska. 2020. *Perspektif Pembelajaran IPS SD/MI*. Bandar Lampung :Garudhawaca

KEGIATAN BELAJAR 2

Konsep Dasar Ilmu-Ilmu Sosial (Sosiologi, Geografi, Sejarah, Ekonomi, Antropologi, Politik)

1. KONSEP DASAR SOSIOLOGI

A. PENGERTIAN SOSIOLOGI

Istilah Sosiologi pertama kali ditemukan oleh ahli filsafat, moralis, dan sekaligus sosiolog berkebangsaan Perancis, Auguste Comte. Menurut Comte, sosiologi berasal dari kata latin socius yang artinya teman atau sesame dan logis dari kata Yunani yang artinya cerita. Jadi pada awalnya, sosiologi berarti bercerita tentang teman atau kawan (masyarakat).

Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Berikut ini definisi-definisi sosiologi yang dikemukakan beberapa ahli.

Piritim Sorokin

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari:

- Hubungan dan pengaruh timbale balik antara aneka macam gejala social (misalnya gejala ekonomi, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala moral)
- Hubungan dan pengaruh timbale balik antara gejala social dengan gejala non social (gejala geografis, biologis)
- Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.

Roucek dan Warren

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.

William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf

Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah tentang stuktur-stuktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

Max Weber

Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan social.

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi

Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari stuktur social dan proses- proses social termasuk perubahan sosial.

Paul B. Horton

Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.

Soerjono Soekanto

Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

William Kornblum

Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.

Allan Johnson

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem itu.

Dari beberapa definisi di atas dapat disederhanakan, yaitu sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum.

B. RUANG LINGKUP SOSIOLOGI

Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi mengkaji lebih mendalam pada bidangnya dengan cara bervariasi. Misalnya seorang sosiolog mengkaji dan mengamati kenakalan remaja di

Indonesia saat ini, mereka akan mengkaji mengapa remaja tersebut nakal, mulai kapan remaja tersebut berperilaku nakal, sampai memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut. Hampir semua gejala sosial yang terjadi di desa maupun di kota baik individu ataupun kelompok, merupakan ruang kajian yang cocok bagi sosiologi, asalkan menggunakan prosedur ilmiah. Ruang lingkup kajian sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup kajian sosiologi tersebut jika dirincikan menjadi beberapa hal, misalnya antara lain:

- a) Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan alam;
- b) Masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian, berkaitan dengan apa yang dialami warganya;
- c) Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, misalnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat, dan sebagainya.

Sosiologi menggabungkan data dari berbagai ilmu pengetahuan sebagai dasar penelitiannya. Dengan demikian sosiologi dapat dihubungkan dengan kejadian sejarah, sepanjang kejadian itu memberikan keterangan beserta uraian proses berlangsungnya hidup kelompok-kelompok, atau beberapa peristiwa dalam perjalanan sejarah dari kelompok manusia. Sebagai contoh, riwayat suatu negara dapat dipelajari dengan mengungkapkan latar belakang terbentuknya suatu negara, faktor-faktor, prinsip-prinsip suatu negara sampai perjalanan negara di masa yang akan datang. Sosiologi mempertumbuhkan semua lingkungan dan kebiasaan manusia, sepanjang kenyataan

yang ada dalam kehidupan manusia dan dapat memengaruhi pengalaman yang dirasakan manusia, serta proses dalam kelompoknya. Selama kelompok itu ada, maka selama itu pula akan terlihat bentuk-bentuk, cara-cara, standar, mekanisme, masalah, dan perkembangan sifat kelompok tersebut. Semua faktor tersebut dapat memengaruhi hubungan antara manusia dan berpengaruh terhadap analisis sosiologi.

C. KONSEP DASAR SOSIOLOGI

1. Proses Sosial dan Interaksi sosial

Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang - perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan system serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apa bila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan sebagainya. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama.

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang juga dapat dinamakan sebagai proses sosial karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai suatu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih mencolok ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Interaksi sosial tak akan mungkin terjadi apabila

manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap system syarafnya, sebagai akibat hubungan termaksud.

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Dua Syarat terjadinya interaksi sosial:

- a. Adanya kontak sosial (social contact), yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu antar individu, antara individu dengan kelompok, antar kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung. Kata kontak berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum* (artinya bersama-sama) dan *tango* (yang artinya menyentuh). Arti secara hanafiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadinya hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, karena dewasa ini dengan adanya perkembangan teknologi, orang dapat menyentuh berbagai pihak tanpa menyentuhnya.
- b. Adanya Komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Arti terpenting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian

(conflict). Pertikaian mungkin akan mendapatkan suatu penyelesaian, namun penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu, yang dinamakan akomodasi. Ini berarti kedua belah pihak belum tentu puas sepenuhnya. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial. Keempat bentuk pokok dari interaksi sosial tersebut tidak perlu merupakan suatu kontinuitas, di dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan kerjasama yang kemudian menjadi persaingan serta memuncak menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada akomodasi.

Gillin dan Gillin mengadakan penggolongan yang lebih luas lagi. Menurut mereka, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial:

a. Proses-proses yang Asosiatif

- 1) Kerja Sama (Cooperation): Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Juga harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima. Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerja sama supaya rencana kerjasamanya dapat terlaksana dengan baik.
- 2) Akomodasi (Accomodation)

Istilah Akomodasi dipergunakan dalam dua arti menunjuk pada suatu keadaan dan menunjuk pada suatu proses. Akomodasi menunjuk pada keadaan, adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orangperorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai suatu proses akomodasi

menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha manusia untuk mencapai kestabilan.

Menurut Gillin dan Gillin, akomodasi adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan adaptasi dalam biologi. Maksudnya, sebagai suatu proses dimana orang atau kelompok manusia yang mulanya saling bertentangan, mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.

- 3) Asimilasi (Assimilation) merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Dengan adanya proses asimilasi, para pihak lebih saling mengenal dan dengan timbulnya benih-benih toleransi mereka lebih mudah untuk saling mendekati.

b. Proses Disosiatif

Proses disosiatif sering disebut sebagai *oppositional processes*, yang persis halnya dengan kerjasama, dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan system sosial masyarakat bersangkutan. Oposisi dapat diartikan sebagai cara berjuang melawan seseorang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Pola-pola oposisi tersebut dinamakan juga sebagai

perjuangan untuk tetap hidup (struggle for existence). Untuk kepentingan analisis ilmu pengetahuan, oposisi proses-proses yang disosiatif dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

1) Persaingan (Competition)

Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian public atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.

2) Kontravensi (Contravention)

Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontraversi menurut Leo von Wiese dan Howard Becker ada 5:

- a) Umum meliputi perbuatan seperti penolakan, keenganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, kekerasan, pengacauan rencana.
- b) Sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki melalui surat selebaran, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian pada pihak lain, dan sebagainya.
- c) Intensif, penghasutan, menyebarkan desas desus yang mengecewakan pihak lain
- d) Rahasia, mengumumkan rahasian orang, berkhianat.
- e) Taktis, mengejutkan lawan, mengganggu dan membingungkan pihak lain.

3) Pertentangan (Pertikaian atau conflict)

Pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri

badaniyah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, polapola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian. Sebab-sebab terjadinya pertentangan adalah:

- a) Perbedaan antara individu.
- b) Perbedaan kebudayaan.
- c) perbedaan kepentingan.
- d) perubahan sosial.

2. Sistem Sosial dan Struktur Sosial

Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. Elemen-elemen sosialitu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam system sosial terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat yang akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut. Suatu system sosial tidak hanya berupa kumpulan individu. Sistem sosial juga berupa hubungan-hubungan sosial dan sosialisasi yang membentuk nilai-nilai dan adat-istiadat sehingga terjalin kesatuan hidup bersama yang bersifat teratur dan berbentuk secara berkesinambungan. Menurut Selo Soemardjan mengacu pendapat Loomis suatu sistem sosial harus terdiri atas sembilan unsur sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan dan Pengetahuan; Unsur kepercayaan dan pengetahuan merupakan unsure yang paling penting dalam sistem sosial karena perilaku anggota dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ketahui tentang kebenaran, sistemreligi, dan cara-cara penyembuhan kepada sang pencipta.

- 2) Perasaan; Perasaan adalah keadaan jiwa manusia yang berkenaan dengan situasi alam sekitarnya termasuk di dalamnya sesama manusia. Perbedaan latar belakang budaya suatu masyarakat akan membedakan keadaan kejiwaan masyarakat yang membentuk suatu sistem sosial. Perasaan terbentuk melalui hubungan yang menghasilkan situasi kejiwaan tertentu yang bila sampai pada tingkat tertentu harus dikuasai agar tidak terjadi ketegangan jiwa yang berlebihan.
- 3) Tujuan Dalam setiap tindakannya manusia mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut, yaitu suatu hasil akhir atas suatu tindakan dan perilaku seseorang yang harus dicapai melalui perubahan maupun dengan cara mempertahankan suatu keadaan yang sudah bagus.
- 4) Norma/Kaidah/Peraturan Sosial; Norma adalah pedoman-pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat. Norma-norma sosial merupakan patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu dan merupakan unsur paling penting untuk meramalkan tindakan manusia dalam sistem sosial. Norma-norma sosial dipelajari dan dikembangkan melalui sosialisasi sehingga menjadi pranata-pranata sosial.
- 5) Kedudukan (Status) dan Peran (Role) Kedudukan adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestasi, hak-hak, serta kewajibannya. Kedudukan menentukan apa yang harus seseorang perbuat bagi masyarakat. Di dalam setiap sistem sosial dijumpai bermacam-macam kedudukan baik yang diperoleh secara turun-temurun, dengan usaha sendiri maupun kedudukan yang diberikan sebagai penghargaan dari lingkungan sendiri, sedangkan peran (role) adalah

pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya.

- 6) **Tingkat/Pangkat:** Pangkat berkaitan dengan kedudukan dan peranan seseorang dalam masyarakat. Seseorang dengan pangkat tertentu berarti mempunyai proporsi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Pangkat diperoleh setelah melalui penilaian terhadap perilaku seseorang yang menyangkut pendidikan, pengalaman, keahliannya, pengabdian, kesungguhannya, dan ketulusan perbuatan yang dilakukannya.
- 7) **Kekuasaan:** Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak - pihak lain. Kalau seseorang diakui oleh masyarakat sekitarnya maka itulah yang disebut wewenang.
- 8) **Sanksi:** Sanksi adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan terhadap seseorang atas perilakunya. Sanksi dapat berupa hadiah dan dapat pula berupa hukuman. Sanksi diberikan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku para masyarakat supaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap masyarakat akan menerapkan sanksi baik yang positif maupun sanksi yang negatif kepada anggotanya, tetapi wujud dan tingkatan sanksi yang diberikan sangat tergantung pada peradaban masyarakat tersebut.
- 9) **Fasilitas (Sarana):** Fasilitas adalah semua bentuk cara, jalan, metode, benda-benda yang digunakan manusia untuk menciptakan tujuan system sosial itu sendiri. Fasilitas disini sama dengan sumber daya material yang berupa gagasan atau ide.

3. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Artinya,

meskipun para Sosiolog memberikan klasifikasi terhadap masyarakat statis dan dinamis, namun yang dimaksud masyarakat statis adalah masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat, artinya didalam masyarakat statis tersebut tetap mengalami perubahan. Adapun masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat.

Manusia memiliki peran sangat penting terhadap terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan, karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya, ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.

Manusia sebagai makhluk Tuhan, dibekali akal-budi untuk memenuhi kebutuhannya. Kelebihan manusia terletak pada akal-budi tersebut, yakni sebagai potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Akal merupakan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah-masalah hidup yang dihadapinya. Budi merupakan bagiadari kata hati, berupa paduan akal dan perasaan, yang dapat membedakan antara baik dan buruk sesuatu.

Dengan bekal akal - budi tersebut manusia memiliki tujuh kemampuan yang berfungsi untuk: menciptakan, mengkreasi, memperlakukan, memperbarui memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan segala hal dalam interaksinya dengan alam maupun manusia lainnya (Herimanto dan Winarno, 2009) Ketujuh kemampuan tersebut merupakan potensi yang dimiliki manusia untuk kepentingannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mempertahankan dan meningkatkan derajat kehidupannya, mengembangkan sisi kemanusiaannya, dengan cara menciptakan kebudayaan (selanjutnya manusia juga mengkreasi, memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan).

Kebudayaan yang dihasilkan melalui akal budi manusia sering menjadi pencetus terjadinya perubahan sosial. Artinya perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan kebudayaan. Bahkan Kingsley Davis (Soerjono Soekanto, 2000) berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Adapun menurut PB Horton dan CL Hunt (1992), hampir semua perubahan besar mencakup aspek sosial budaya. Oleh karena itu dalam menggunakan istilah perubahan sosial dan perubahan budaya, perbedaan diantara keduanya tidak terlalu diperhatikan. Disamping itu, kedua istilah tersebut sering kali ditukar-pakaikan; kadang kala digunakan istilah perubahan sosial - budaya (sociocultural change) agar dapat mencakup kedua jenis perubahan tersebut. Yang jelas perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama yaitu kedua-duanya bersangkutan-paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru (berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya). Perubahan sosial mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya.

Berikut ini merupakan definisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh para Sosiolog:

- 1) Kingsley Davis: Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurutnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan dalam hubungan-

hubungan antara buruh dengan majikan, dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.

- 2) John Lewis Gillin dan John Philip Gillin: Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat.
- 3) Robert M MacIver: Perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial
- 4) Selo Soemartjan: Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- 5) William F. Ogburn: Perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat. Melihat begitu luasnya cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka untuk mengetahui suatu perubahan sosial dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan yang cermat terhadap suatu masyarakat dan membandingkannya dengan keadaan masyarakat tersebut pada masa lampau / sebelumnya, untuk memahami perbedaan keadaannya.

4. Mobilitas Sosial

Mobilitas mempunyai arti yang bermacam-macam, pertama, mobilitas fisik (mobilitas geografis) yaitu perpindahan tempat tinggal (menetap/ sementara) dari suatu

tempat ke tempat yang lain. Kedua, mobilitas sosial yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial ini terdiri dari dua tipe, yaitu mobilitas sosial horisontal dan vertikal. Mobilitas sosial horisontal diartikan sebagai gerak perpindahan dari suatu status lain tanpa perubahan kedudukan. Jadi dalam mobilitas sosial horisontal ini, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Sedangkan mobilitas sosial vertikal yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu status sosial ke status sosial lainnya, yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal ini jika dilihat dari arahnya, maka dapat dirinci atas dua jenis, yaitu gerak perpindahan status sosial yang naik (social dimbing) dan gerak perpindahan status yang menurun (social sinking).

Pengertian mobilitas sosial ini mencakup baik mobilitas kelompok maupun individu. Misalnya keberhasilan keluarga Pak A merupakan bukti dari mobilitas individu; sedang arus perpindahan penduduk secara bersama-sama (bedo desa) dari daerah kantong-kantong kemiskinan di P. Jawa ke daerah yang lebih subur sehingga tingkat kesejahteraan mereka relatif lebih baik dibanding di daerah asal, merupakan contoh mobilitas kelompok. Ketiga, Mobilitas psikis, yaitu merupakan aspek-aspek sosial-psikologis sebagai akibat dari perubahan sosial. Dalam hal ini adalah mereka yang bersangkutan mengalami perubahan sikap yang disertai tentunya dengan guncangan jiwa. Konsep mobilitas tersebut dalam prakteknya akan saling berkaitan satu sama lain, dan sulit untuk menentukan mana sebagai akibat dan penyebabnya. Sebagai contoh untuk terjadinya perubahan status sosial, seseorang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena ketiadaan lapangan kerja, atau sebaliknya mobilitas sosial seringkali mengakibatkan adanya mobilitas geografi yang disertai dengan segala kerugian yang menyakitkan, yakni lenyapnya ikatan sosial yang sudah demikian lama terjalin. Demikian halnya mobilitas geografis

akan mempengaruhi terhadap mobilitas sosial yang dimbing maupun sinking, bahkan sekaligus mempengaruhi mobilitas mental atau psikis dari individu maupun masyarakat.

5. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses belajar yang seseorang menghayati (internalisasi) norma-norma sosial di manusia hidup sehingga menjadi individu yang baik. Atau sosialisasi adalah suatu proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi bagian dari suatu masyarakat.

Sosialisasi dapat dibedakan menjadi sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer dikaitkan dengan pembentukan dasar atau awal kepribadian. Dalam diri anak, proses ini dimulai dengan mengakumulasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota dalam masyarakat tertentu. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas seperti: bermain, meniru, mengamati dan dalam interaksi dengan actor penting sosialisasi. Actor penting atau orang yang berpengaruh adalah orangtua, teman sebaya, dan saudara kandung.

Aktivita sini berlangsung selama tahap sosialisasi, yaitu ketika identitas primer mulai terbentuk, seperti dengan memperhatikan aspek gender, etnisitas, dan agama. Yang terpenting dari tahap ini adalah identitas tersebut dipelajari dan dibentuk secara aktif. Identitas tersebut menjadi identitas utama dan relative stabil. Sementara itu, sosialisasi sekunder terdiri atas pengalaman-pengalaman yang komplek dan terjadi sepanjang masa untuk menjadi anggota masyarakat atau kelompok budaya tertentu. Proses ini menunjuk pada proses yang lebih luas mengenai keterampilan, pengetahuan dan peran yang dipelajari secara lebih mendalam dalam kehidupan. Sosialisasi sekunder merupakan proses memahami dan merasakan berbagai budaya yang ditunjukkan dalam kehidupan secara keseluruhan (Scott, 2011: 259 – 260)

Pembentukan kepribadiannya melalui dua proses, yaitu: pertama, proses sosialisasi tanpa sengaja melalui interaksisosial, dan kedua, proses sosialisasi secara sengaja

melalui proses pendidikan dan pengajaran (Narwoko dan Suyanto, 2004: 66).

Proses sosialisasi tanpa sengaja terjadi jika seorang individu yang disosialisasi menyaksikan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya di dalam interaksi antar mereka, kemudian individu melakukan internalisasi pola-pola tingkah laku dan pola-pola interaksi itu beserta norma-norma sosial yang mendasarinya ke dalam mentalnya (Narwoko dan Suyanto, 2004: 66 -67).

Proses sosialisasi yang disengaja terjadi apabila seorang individu (yang disosialisasi) mengikuti pengajaran dan pendidikan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik-pendidik yang mewakili masyarakat, dengan tujuan yang disadari agar norma-norma sosial bisa dipahami individu yang disosialisasi tersebut dan bisa tertanam baik-baik dalam batinnya (Narwoko dan Suyanto, 2004: 67).

Norma-norma sosial, pola-pola tingkah laku, dan nilai-nilai budaya yang disosialisasikan secara langsung melalui proses pendidikan dan pengajaran maupun sosialisasi secara tidak langsung kesemuanya diperhatikan dan diterima oleh individu. Yang tengah terbentuk kepribadiannya, dan kemudian diinternalisasikan ke dalam mentalnya. Dapat dikatakan bahwa individu yang telah mengalami proses ini telah terbentuk kepribadiannya.

6. Lembaga Sosial

Konsep sosiologi tentang “institusiosial” (social institution) sering kali diterjemahkan dan dipahami sebagai: “pranata sosial”, “bangunan sosial”, “organisasi sosial”, “lembaga kemasyarakatan”, “lembaga sosial”, “asosiasi”, “sistem sosial”, “struktur sosial”, “wadah sosial” dan seterusnya. Dari beberapa konsep tersebut yang lebih dekat dengan bangunan konsep sosiologi adalah pranata sosial, sistem sosial, struktur sosial, lembaga sosial. Bervariasinya konsep penyebutan tersebut menandakan bahwa konsep-

konsep yang dibangun dan dikembangkan sosiologi amat abstrak dan multitafsir.

Sejak awal berdirinya sosiologi, institusisocial telah menjadi perhatian para sosiolog. Bapak sosiologi Auguste Comte (1798-1857) dalam bukunya *Coursede Philoshopie Positive* dan *Le System depolicique Positive* menggunakan konsep “sosial statis” (static social) untuk menamai institusi sosial yang dibedakan dengan konsep “sosial dinamis” (dynamic social). Sosial dinamis mempelajari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sosial statis memfokuskan pada tata tertib yang menjadi dasar sistem sosial. Sosial dinamis mempelajari tiga hukum perkembangan masyarakat, yakni *theologies*, *metaphysic* dan *positivism*. Sosial statis mempelajari hubungan aksi reaksi antar bagian dalam sistem sosial. Sebagai ilustrasi Comte mengambil contoh institusi keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Menurut Comte, keluarga terbentuk atas dasar insting dan affeksi. Mengikuti pemikiran ini maka yang dimaksud Comte dengan institusi sosial adalah *theologies*, *metaphysic*, *positivism* dan seterusnya.

Jika Comte menggunakan konsep sosial statis dan sosial dinamis, Henrich Karl Marx (5 Mei 1818-14 Maret 1883) menyebut institusi sosial dengan konsep *suprastuktur* dan dibedakan dengan *mode of production* (alat-alat, sarana produksi dan hubungan produksi). Secara definisi, *suprastuktur* samadengan *sosialstatis*, yakni norma, nilai, hubungan sosial, interaksi sosial, hanya saja yang membedakan adalah ketegasan Marx dalam teorinya bahwa *supra struktur* adalah bentukan dari *mode of production*, hasil dari *ideology* dan kelas tertentu. Marx mendefinisikan institusi sosial dari perspektif kritis, sementara Durkheim dan Comte dari perspektif fungsional. Institusi sosial adalah konstruksi secara kolektif, bersama-sama unit masyarakat. *Mode of production* adalah alat-alat dan sarana produksi dan hubungan produksi. Contoh yang paling gamblang dari institusi sosial ini adalah kelas, ideologi.

Sementara Emile Durkheim (15 April 1858-15 November 1917) dalam *The Rules of Sociological Method*

and Selected Textson Sociology and its Method menyebut institusi sosial dengan konsep *collective consciousness* (kesadarankolektif) dan dibedakan dengan *individual consciousness* (kesadaran individual). Kesadaran kolektif yang merupakan institusi sosial memiliki dua ciri. Pertama, *exterior*, berada diluar (*beyond*) fakta individu dan merembes kedalam pikiran individu dalam perwujudan sebagai aturan-aturan agama, baik-buruk, luhur dan mulia. Norma dan nilai itu akan tetap ada sekalipun individu-individu yang bersangkutan tidak ada lagi. Kedua, *constraint*, memiliki daya paksa terhadap individu-individu. Pelanggaran terhadap institusi sosial ini akan dapat hukuman yang tergantung pada jenis masyarakatnya. Pada masyarakat mekanik (*rural*) jenis hukuman represif. Sementara pada masyarakat organis, hukumannya bersifat restitutif. Konsep Durkheim tentang kesadaran kolektif ini nantinya dikembangkan oleh Talcott Parsons (1902) sebagai sistem sosial.

Interaksi fungsional antara variables AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, latency*). Antara satu variable dengan variable saling tergantung untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) sistem sosial.

Melihat konsep dan teori institusi sosial dari para sosiolog tersebut, tak salah jika Horton dan Hunt (1987) mendefinisikan institusi sosial sebagai sistem norma untuk mencapai tujuan; sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan tentang kegiatan pokok manusia. Institusi sosial adalah sistem hubungan sosial terorganisir yang mengejawantakan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, institusi sosial dalam konsep sosiologi bukanlah “sebuah bangunan”, “sekelompok orang”, “sebuah organisasi” melainkan “nilai dan norma”; “pola perilaku yang baku”; dan “hubungan sosial”.

Sementara sarjana Indonesia Koentjaraningrat (1984:115) memberikan istilah pranata sosial dengan menunjuk pada adanya unsur-unsur mengatur perilaku masyarakat berupa sistem tata kelakuan dan hubungan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Soekanto (1982:192) memberikan ruang lingkup institusi sosial dengan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Wujud nyata institusi sosial adalah asosiasi (association). Terlihat dengan jelas bahwa konsep institusi sosial yang dianut oleh sarjana-sarjana Indonesia lebih merujuk pada teori Emile Durkheim dan Talcott Parsons mengartikan institusi sosial (social institution), is a group of social positions, connected by social relations, performing a social role. Terdapat tiga konsep untuk menjelaskan institusi sosial, yakni posisi sosial (social positions), hubungan sosial (social relations), peranan sosial (social role). Posisi sosial, is the position of an individual in a given society and culture. Posisi sosial dipengaruhi oleh status sosial. Posisi sosial dapat dilihat dari pekerjaan (dokter, dosen, guru), profesi, keluarga, hobi. Hubungan sosial (social relations) can refer to a multitude of social interactions, regulated by social norms, between two or more people, with each having a social position and performing a social role. Peranan sosial (social role) is a set of connected behaviors, rights and obligations as conceptualized by actors in a social situation. Peranan sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status dalam situasi sosial.

7. Penyimpangan Sosial

Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Atau seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimum di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakannya di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma-norma sosial yang berlaku (Narwoko dan Suyanto, 2004: 78)

Dengan demikian, perilaku yang dikategorikan sebagai penyimpangan sosial tidak hanya perilaku kejahatan, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan korupsi, namun bisa juga berupa perilaku ringan namun melanggar norma sosial, seperti corat-coret baju seragam, corat-coret dinding, berpacaran sampai larut malam meludah di sembarang tempat, membuang sampah di sembarang tempat, menerima sesuatu dengan tangan kiri, dan seterusnya.

Bila kita lihat jumlah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: penyimpangan tunggal dan penyimpangan jamak. Perilaku dikatakan penyimpangan tunggal bila seseorang hanya melakukan satu jenis kejahatan, misalnya mabukmabukan atau mengedarkan narkoba. Sedangkan penyimpangan jamak terjadi apabila seseorang melanggar sejumlah norma-norma sosial yang berlaku, misalnya, residivis kambuhan, selain sebagai perampok juga suka mabukmabukan, mengkonsumsi narkoba, dan sebagainya. Bila kita bicara tentang kejahatan, ada beberapa tipe, yaitu: kejahatan tanpa korban (*crimes withuot victims*), kejahatan terorganisasi (*organized crime*), kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terpendang yang dinamakan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), dan kejahatan yang dilakukan atas nama perusahaan (*corporate crime*).

Tidak semua kejahatan mengakibatkan penderitaan pada korban sebagai akibat dari tindak pidana oleh orang lain. Kejahatan tanpa korban adalah kejahatan yang tidak menimbulkan korban. Orang lain tidak menderita karena kejahatan ini. Contoh dari kejahatan ini antara lain: mabukmabukan, tidak memakai helm selama mengendarai sepeda motor, mengkonsumsi narkoba, dan bermain judi. Kejahatan terorganisasi adalah komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau melalui korupsi.

Misalnya, perjudian gelap, penyelenggaraan pelacuran, peminjaman uang dengan bunga tinggi. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Misalnya, penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, korupsi, penipuan. Sedangkan kejahatan oleh perusahaan kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan. Misalnya, pemalsuan barang. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang ada tiga kategori (Narwoko dan Suyanto, 2004: 81)

- 1) Tindakan yang non-conform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Misalnya, membolos sekolah, ke sekolah tidak memakai seragam, merokok di wilayah dilarang merokok.
- 2) Tindakan yang antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Misalnya, tidak mau berteman, minum-minuman keras, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang.
- 3) Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang. Misalnya, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan.

D. HUBUNGAN SOSIOLOGI DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA

1. Hubungan Sosiologi dengan Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dengan keterbatasan barang dan jasa yang tersedia. Misalnya ilmu ekonomi berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak seimbangnya persediaan pangan dengan jumlah penduduk, serta mempelajari usaha menaikkan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan. Sosiologi mempelajari

bagaimana manusia berinteraksi, bekerja sama, bersaing dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan.

2. Hubungan Sosiologi dengan Antropologi

Seorang manusia akan memiliki perilaku yang berbeda dengan manusia lainnya walaupun orang tersebut kembar siam. Ada yang baik hati suka menolong serta rajin menabung dan ada pula yang prilakunya jahat yang suka berbuat menyakitkan hati. Manusia juga saling berhubungan satu sama lainnya dengan melakukan interaksi dan membuat kelompok dalam masyarakat. Hal-hal tersebut dapat dikaji dengan pendekatan antropologi dan sosiologi.

Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat selalu berkebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan tidak sama, tetapi berhubungan sangat erat. Masyarakat menjadi kajian pokok sosiologi dan kebudayaan menjadi kajian pokok antropologi. Jika diibaratkan sosiologi merupakan tanah untu tumbuhnya kebudayaan. Kebudayaan selalu bercorak sesuai dengan masyarakat. Masyarakat berhubungan dengan susunan serta proses hubungan antara manusia dan golongan. Adapun kebudayaan berhubungan isi atau corak dari hubungan antara manusia dan golongan. Oleh karena itu baik masyarakat atau kebudayaan sangat penting bagi sosiologi dan antropologi. Hanya saja, penekanan keduanya berbeda.

3. Hubungan Sosiologi dengan Ilmu Geografi

Contoh keterkaitan antara ilmu geografi dengan ilmu sosial terdapat di konsep esensial geografi, salah satunya adalah konsep interelasi dan interdependensi, pengertian dari konsep tersebut adalah konsep tentang hubungan timbal balik antara dua tempat yang saling berkaitan. Sebagai contoh adalah kota sebagai pusat perdagangan yang tidak ada tempat untuk pertanian akan membutuhkan bahan pangan dari desa, sedangkan desa sebagai pusat bahan pangan akan menggantungkan

berbagai macam kebutuhan seperti bahan bangunan, berbagai alat-alat rumah tangga, dan sebagainya dari kota.

Sehingga hal ini mengakibatkan adanya interaksi yang terjadi antara masyarakat di desa dan masyarakat kota. Dari interaksi tersebut pola kebudayaan baru yang masuk dari kota ke desa, sehingga lama kelamaan budaya dari desa akan hilang karena sudah tergantikan oleh budaya baru dari kota. Pola kebudayaan baru dari kota akan cepat menyebar luas ke desa karena mayoritas orang-orang di desa tertarik dengan pola budaya baru tersebut. Mereka menganggap dengan menggunakan atau mengaplikasikan pola baru tersebut mereka jadi lebih modis, dan tidak merasa ketinggalan jaman.

Kebudayaan dari kota sendiri ada yang baik dan ada juga yang kurang baik, kebudayaan yang baik bisa berbentuk seperti penggunaan teknologi canggih sehingga mudah mendapatkan informasi, menggunakan mesin untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan mempersingkat pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebudayaan yang kurang baik meliputi pergaulan bebas pada remaja, sifat individualismeseseorang yang bisa terjadi pada remaja dan orang dewasa dan berbagai penggunaan mode busana baru yang sudah di luar norma yang ada. Interaksi antar kota dan desa ini pasti akan berdampak kepada pola kemsarakatan di desa, hubungan kekeluargaan yang dahulunya erat sekali sekarang menjadi kurang erat karena dalam menyampaikan suatu hal/informasi tidak langsung silahturohmi dengan orangnya melainkan dengan menggunakan media komunikasi. Hal tersebut memang akan menyingkat waktu tetapi jika pola tersebut sudah membudaya maka lama-kelamaan antara saudara satu dengan saudara lain yang bertempat tinggal agak jauh akan tidak mengenali langsung saudaranya sendiri sehingga kalau ketemu dan papasan maka mereka akan diam saja seolah-olah itu adalah orang lain.

Jadi dengan adanya interaksi yang terjadi antara masyarakat desa dengan masyarakat kota pasti akan berdampak kepada pola kemasyarakatan yang sudah ada.

Walaupun banyak poa yang dianggap kurang baik namun hal tersebut bisa saja tidak terjadi jika ada sosialisasi yang baik antar masyarakat dan adanya penyingkapan interaksi dengan budaya baru yang masuk dalam masyarakat terutama masyarakat desa.

4. Hubungan Sosiologi dengan Ilmu Alam

Hubungan Sosiologi dengan Ilmu Alam dapat diketahui dari kedudukan keduanya dalam tinjauan filsafat ilmu (epistemologi) beserta metodenya:

- a. Keduanya tergolong ke dalam golongan pengetahuan saintifik yang empiris, genetis dan bercorak kausal (perhubungan cause and effect).
- b. Sosiologi mempengaruhi Ilmu Alam, demikian juga sebaliknya (ada hubungan timbal balik atau interdependensi). Agar mudah dipahami, contohnya yaitu pada:

- 1) Herbert Spencer, seorang SOSIOLOG, yang metodenya sosiologis naturalis. Hal ini dapat diketahui kalau kita membaca bukunya “The Factor of Organic Evolution”. Oleh sebab itulah, teori-teorinya dipengaruhi asumsi-asumsi Ilmu Alam (khususnya Biologi).
- 2) Michael H. Hart, seorang FISIKAWAN, yang metodenya naturalis sosiohistoris. Hal ini dapat diketahui kalau kita membaca bukunya “100 Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah” (terjemahan, dapat kamu peroleh di 46 gamb buku), meskipun dia tidak menegaskan apapun mengenai metoda itu.

5. Hubungan Sosiologi dengan Ilmu Sejarah

Salah satu metode yang digunakan dalam sosiologi adalah metode historis. Dalam hal ini para sosiolog selalu memberikan persoalan sejarah kepada ahli sejarah sehingga ilmu sejarah dipengaruhi oleh perkembangan

sosiologi. Oleh karena itu antara sejarah dan sosiologi mempunyai pengaruh timbal balik.

Keduanya mempelajari kejadian dan hubungan yang dialami masyarakat/manusia. Sejarah mempelajari peristiwa masa silam, sejak manusia mengenal peradaban. Peristiwa-peristiwa itu kemudian dihubungkan satu sama lain sehingga diperoleh gambaran menyeluruh pada masa lampau serta mencari sebab terjadinya atau memperkuat tersebut.

Selain itu, sosiologi juga memerhatikan masa silam, tetapi terbatas pada peristiwa yang merupakan proses kemasyarakatan dan timbul dari hubungan antarmanusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

E. PEMBELAJARAN SOSIOLOGI

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sosiologi adalah bahwa pelajaran ini bukanlah hafalan tetapi lebih pada pemahaman dan analisis sehingga anak harus lebih banyak terlibat dalam menemukan kenyataan yang sebenarnya. Pendekatan dengan konten analisis juga baik untuk dilakukan. Misalnya ketika membahas “Perilaku Menyimpang”, siswa dapat diminta mencari bacaan di Koran, majalah, makalah, dan internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan perilaku menyimpang (pencurian, pornografi, sex bebas, narkoba, perkelahian pelajar, pengrusakan karena demonstrasi, korupsi dan sebagainya). Kemudian secara berkelompok mereka diminta untuk mencari akar masalahnya menurut informasi berita itu dan kemudian mereka diminta menganalisis kalau menurut mereka bagaimana serta jalan keluar apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya.

Apa yang dikemukakan di atas adalah sebagian contoh-contoh model pembelajaran yang dapat dirancang dan digunakan oleh guru/dosen dalam pembelajaran pendidikan sosiologi. Untuk memudahkan guru-guru sosiologi dapat merancang bersama (misalnya guru yang tergabung dalam MGMP) mengenai pemberian pengalaman belajar yang menyenangkan pada siswa, maka pelajaran Sosiologi akan menjadi pelajaran yang disukai, jika ini terjadi maka secara tidak langsung guru-guru memberi andil yang besar dalam

membangun kehidupan masyarakat, sebab sambil belajar untuk mengetahui dan memahami, sebenarnya internalisasi nilai-nilai berproses dalam diri siswa, sehingga pelajaran itu benar-benar bermakna untuk mereka. Transformasi ilmu pengetahuan (kognitif), nilai-nilai (afektif), keterampilan sosial (skill) berjalan bersama. Dalam hal ini guru telah menjalankan prinsip-prinsip “constructivisme”.

Pengalaman belajar hendaknya juga memuat kecakapan hidup (life skill) yang harus dimiliki siswa. Kecakapan hidup merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Dalam hal ini sangat relevan memakai pendekatan Problem Solving, pendekatan Konstruksionis yang dipakai para tokoh seperti Weber dengan teori Fenomenologi yang juga dikembangkan oleh Edmund Husserl, dan Alfred Schutz. Juga yang diperkenalkan Anthony Giddens yang melahirkan teori Strukturasi.

Selain itu dapat juga diterapkan macam-macam model pembelajaran untuk pendidikan sosiologi seperti:

- 1) Active debate
- 2) Learning start with question
- 3) Make amatch
- 4) Group presume
- 5) Jigsaw
- 6) Numbered heads together
- 7) Examples nonexamples
- 8) Picture and picture
- 9) Cooperativescript
- 10) Mutarfilm

2. KONSEP DASAR GEOGRAFI

Menurut Sumaatmadja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkenaan dengan gejala-gejala konkret tentang

geografi. Konsep geografi harus mendasari kajian berbagai faktor, gejala dan masalah spasial, baik secara fisik, sosial maupun hubungan diantara keduanya. Konsep geografi, dapat dijelaskan secara denotatif dan secara konotatif. Konsep geografi secara denotatif dapat menjelaskan berbagai pengertian gejala geografi berdasarkan definisi atau kamus. Misalnya, Erosi merupakan proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu zat pengangkut di permukaan bumi. Konsep geografi secara konotatif memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan secara harfiah. Didalamnya akan menyangkut semua aspek dengan semua konsep yang dibahas, misalnya melalui jumlahnya, jaraknya, persebarannya, maupun proses pembentukan dan manfaatnya.

Konsep geografi menurut Ikatan Geograf Indonesia (IGI), terdiri atas konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Lokasi : rumah yang bagus dibangun dengan biaya sangat mahal nilai jualnya akan jatuh ketika dibangun dekat kuburan. Jarak : hasil-hasil pertanian harganya akan mahal jika harus diangkut melalui jarak yang jauh. Keterjangkauan : tempat yang jauh tidak selamanya susah dijangkau ketika prasarana dan sarana lalu lintas memadai. Pola : permukiman di daerah landai dan subur akan memiliki pola tersebar merata. Morfologi : pembangunan prasarana lalu lintas di wilayah perbukitan akan jauh lebih mahal. Aglomerasi : kumpulan rumah-rumah selalu mendekati wilayah lembah sungai, karena pada umumnya memiliki cadangan air mencukupi. Areal differentiation : ruang permukaan bumi tidaklah seragam. Keterkaitan ruang : budaya masyarakat tidak akan terlepas dari kondisi lingkungan.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan konsep geografi, Henry J Warman, mengemukakan ada 15 konsep geografi yang dapat dijadikan dasar untuk dapat memberi penjelasan terhadap berbagai gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi. Kelima belas konsep dasar tersebut adalah regional (regional concept), ruang kehidupan (life layer), manusia sebagai makhluk dominan (man ecological dominant), global (globalism), interaksi keruangan (spatial interaction), hubungan antar tempat (spatial

relationship), tempat yang sama (areal likeness), perbedaan tempat (areal differences), keunikan wilayah (areal uniquenesses), persebaran lokasi (areal distribution), lokasi relatif (relative location), perbandingan keuntungan (comparative advantage), perubahan terus menerus (perfectual transformation), penetapan sumber budaya (culturally defined resources), bumi bulat pada bidang datar (round earth on flat paper).

Contoh penerapan salah satu konsep geografi dalam pembelajaran IPS SMP, materi penentuan lokasi dan arah orientasi. Tujuan pembelajarannya menunjukkan arah-arrah orientasi di permukaan bumi dan menggambarkan kedudukan arah orientasi. Kegiatan pembelajarannya, misalnya guru mengajak para siswa ke halaman sekolah selama 1 jam pelajaran, siswa disuruh duduk membentuk sebuah lingkaran, beberapa siswa disuruh menunjuk arah rumahnya sambil menunjukkan arah orientasi, menyuruh beberapa siswa untuk berjalan dari salah satu arah memasuki lingkaran teman-temannya, siswa lain diharuskan menjelaskan dari arah mana temannya itu datang, baringkan papan tulis di tengah-tengah lingkaran siswa, salah seorang siswa diminta menggambar lingkaran yang ditandai arah orientasi, tegakkan papan tulis yang digambar anak itu dengan arah utara di atas, kemudian beberapa siswa diminta menentukan arah rumahnya.

Hakekat Geografi

Dalam zaman informasi seperti sekarang ini, orang-orang yang buta geografi, sesungguhnya amat rugi. Gejala-gejala sosial dan alam yang terjadi di berbagai penjuru dunia memerlukan bekal pengetahuan geografi. Geographic understanding perlu untuk memahami atau memecahkan suatu masalah, seperti urbanisasi, over population, daya dukung lingkungan, kelebatan hutan yang menipis, dan perubahan iklim, serta erosi lahan. Pengetahuan geografis juga amat diperlukan untuk warga negara dalam membentuk suatu sikap global unity,

yakni sama-sama memiliki satu dunia sebagai dasar untuk bersikap yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan global, mengingat status kewargaan pada saat ini sudah menjadi tripple, yaitu warga lokal, nasional dan warga global. Di lingkungan dunia pendidikan formal Indonesia, geografi dikelompokkan kedalam rumpun IPS, tetapi dasar-dasar struktur bumi yang dibahas masuk ke IPA. Guru, dalam memaparkan masalah-masalah geografis di kelas tentu saja berdasarkan humaniora, karena menyangkut values.

Ketika membahas berbagai fenomena, nampaknya geografi akan memasuki wilayah ilmu lain, seperti pembahasan urbanisasi (akan melibatkan sosiologi dan ekonomi), pertanian dan industri (melibatkan ekonomi). Begitu juga ketika membahas erosi lahan, tentu akan melibatkan klimatologi, geomorfologi, ilmu tanah, bahkan ekonomi dan sosiologi. Namun itulah ciri khas geografi, tetapi satu hal yang akan membedakan geografi dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu harus selalu place bound, terikat oleh ruang tertentu. Geografi bertugas menelaah karakteristik suatu tempat atau mengajarkan the reality of place, ingin menyajikan the comprehensive view of the earth and man. Oleh karena itu para ahli geografi bersepakat bahwa obyek pembeda (formal) geografi dengan ilmu-ilmu lainnya adalah region.

Menurut Daldjoeni (1982), geografi memiliki minimal enam hakekat, yaitu : (1) Geografi sebagai ilmu pengetahuan bio-fisik, (2) geografi sebagai relasi timbal balik manusia dengan alam, (3) geografi sebagai ekologi manusia, (4) geografi sebagai telaah bentang alam, (5) geografi sebagai telaah sebaran fenomena permukaan bumi, (6) geografi sebagai teori tentang ruang bumi.

National Council For Social Studies, menjelaskan ada lima hal yang menjadi fundamental ideas in geography, yaitu : (1) every geographic area is affected by physical, biotic and societal, (2) the impact of these forces of these forces on a geographic area cretes similarities among areas. These similar areas are called uniform regions. They are static in character (3) the similarities among different areas have been brought about through different combination of physical, biotic, and societal forces, (4)

an area may be kept together through a pattern of circulation binding the area to a central place. This area is called a nodal region, held together by functional relationship. The nodal region is dynamic in character, (4) uniform and nodal regions are often related to each other through gravitation to the same central place. Lebih lanjut dikatakan NCSS bahwa dalam mengkaji suatu region, ,

geographers are concerned with physical, economic, sociological, anthropological, and political facts.

Rhoad Murphey, merumuskan sedikitnya ada tiga pokok ruang lingkup studi geografi, yaitu : (1) Persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek keruangan dan bagaimana manusia memanfaatkannya, (2) interaksi antara manusia dan lingkungan fisik merupakan salah satu bagian dari keragaman wilayah, (3) kajian terhadap region atau wilayah. Selanjutnya Ikatan Geograf Indonesia (IGI), memilah bahwa ruang lingkup geografi menjadi tiga bagian, yaitu dilihat dari aspeknya, konteksnya dan tekniknya.

Berdasarkan aspeknya, ruang lingkup geografi meliputi studi terhadap atmosfer, litosfer, hidrosfer dan biosfer, litosfer terdiri atas toposfera dan pedosfera. Aspek atmosfer terdiri atas cuaca dan iklim, hidrosfer terdiri atas air di wilayah daratan dan lautan, biosfer terdiri atas flora, fauna dan antroposfera. Berdasarkan konteksnya, geografi mempelajari keruangan, kelingkungan dan kewilayahan. Berdasarkan teknisnya, geografi memiliki tahapan kegiatan identifikasi, inventarisasi, analisis, sintesis, klasifikasi, dan evaluasi. Untuk mendukung geografi dari segi teknis, harus didukung oleh pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG).

SIG atau (GIS = Geographical Information System), menurut Rhind (1988) is a computer system for collecting, checking, integrating and analyzing information related to the surface of the earth. Sedangkan menurut Parker (1988) GIS deals with space-time data and often but not necessary, employs computer hardware and software. SIG, merupakan manajemen

data spasial dan nonspasial yang berbasis komputer dengan tiga karakteristik dasar, yaitu : (1)memiliki fenomena aktual yang berkaitan dengan topik permasalahan, (2)kejadian aktual di suatu lokasi dan (3)memiliki dimensi waktu yang tegas. SIG, diklasifikasi atas dua kelompok, yaitu sistem manual/analog dan sistem otomatis (digital). Sistem manual, biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, foto udara dan lembar transparansi secara overlay. Sistem otomatis, telah menggunakan komputer sebagai sistem pengolah melalui digitasi. Sumber data digital, berupa citra satelit, foto udara digital serta foto udara yang telah terdigitasi.

Obyek Studi Geografi

Seperti halnya ilmu-ilmu lain, obyek studi suatu ilmu biasanya dibedakan atas obyek material dan obyek formal. Obyek material geografi adalah geosfera, yang didalamnya terdiri atas litosfera, atmosfera, hidrosfer, biosfera dan antroposfera. Secara material, geografi sangat dimungkinkan terjadi irisan dengan ilmu-ilmu lain. Penciri geografi dengan ilmu-ilmu lain terletak pada obyek formalnya. Obyek formal geografi adalah region. Obyek formal diartikan sebagai cara pandang atau telaah terhadap fenomena permukaan bumi, baik fenomena fisik maupun nonfisik.

Cara pandang geografi terhadap obyek formalnya dapat diperhatikan dari organisasi keruangan (spatial setting), yang meliputi : pola (spatial pattern), keterkaitan antar gejala (spatial system) dan perkembangan (spatial process). Seperti halnya dalam ilmu-ilmu lain, dalam geografipun dikenal 5W dan 1H, yaitu what untuk mengungkap fenomena apa yang terjadi, where untuk mengungkap lokasi terjadinya fenomena, when untuk mengungkap waktu terjadinya fenomena, why untuk mengungkap alasan atau penyebab terjadinya fenomena, who untuk mengungkap pelaku atau penyebab terjadinya dan how untuk mengungkap solusi terjadinya masalah. Perlu dipahami bahwa 5W + 1H ini bukanlah milik geografi semata, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain, 5W +1H hanyalah merupakan salah satu cara untuk mempermudah pemahaman dalam kajian geografi.

Bidang telaahan geografi menurut Daldoeni (1986) terdiri atas : 1)ukuran, bentuk dan aneka gerakan bumi, 2)persebaran serta posisi massa daratan dan perairan, 3)batuan, struktur dan relief permukaan bumi, 4)air dan seluk-beluk gerakannya, 5)pola sebaran flora dan fauna, 6)atmosfer dengan gejala-gejala didalamnya serta kecenderungan pola-pola iklim di permukaan bumi, 7)ras umat manusia serta sebarannya, 8)aneka bentuk kegiatan manusia dalam hubungannya dengan permukaan bumi, 9)pola permukiman penduduk serta ciri-ciri sosial budaya masyarakat. Dilain pihak, kita juga perlu memahami wawasan geografis, yang terdiri atas : 1)relasi spasial, 2)relasi manusia-bumi, 3)relasi manusia-manusia dan 4)kesatuan lingkungan.

Prinsip Geografi

Prinsip-prinsip dalam suatu ilmu juga tidak boleh diabaikan, karena merupakan dasar dalam setiap kajiannya. Geografi memiliki beberapa prinsip, yaitu persebaran, interrelasi, deskripsi, dan keruangan. Prinsip persebaran, fenomena yang terdapat di permukaan bumi selain sangat beragam juga tidak tersebar merata di setiap wilayah. Ketidakmerataan tersebut harus menjadi fokus kajian geografi untuk mengungkap dimana dan mengapa fenomena itu ada di situ. Prinsip interelasi, merupakan prinsip untuk melihat pola hubungan antar faktor. Melalui prinsip interrelasi, akan terungkap keterkaitan antara faktor fisik yang satu dengan faktor fisik yang lainnya, dan antara faktor fisik dengan faktor nonfisik. Prinsip deskripsi, merupakan prinsip yang memberi gambaran menyeluruh, tidak sebatas persebaran dan keterkaitan, tetapi juga dapat dilihat perbandingannya dengan yang lainnya. Prinsip keruangan, lebih menitikberatkan pada analisa gejala, fakta dan masalah dengan menekankan pada prinsip penyebaran, interrelasi dan interaksi dalam ruang. Ruang dalam permukaan bumi, tidak sebatas pada bagian bumi yang bersinggungan dengan udara saja, melainkan termasuk lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi

permukaan bumi. Prinsip keruangan, memperhatikan persebaran, interrelasi dan interaksi antar komponen geosfera di permukaan bumi sebagai satu kesatuan ruang. Fairchild (1964) lebih jauh lagi mengatakan bahwa prinsip-prinsip geografi itu terdiri atas : the earth in the universe, location, time and maps, the continents, mountains, plateaus and uplands, plains, the oceans, rivers and canals, lake and underground water, the atmosphere and its weather, element of climate, natural vegetation and the climatic region, grazing and forestry, fishing, mining, and manufacturing.

Prinsip-prinsip di atas dapat dipisahkan satu sama lain. Namun dalam prakteknya sulit untuk dipisahkan. Dalam mempelajari suatu masalah dan atau gejala, mengkaji sebarannya berdasarkan prinsip distribusi, tetapi tidak mungkin mengabaikan prinsip yang lain. Semua prinsip di atas selalu digunakan, baik secara serentak bersama-sama, maupun secara berurutan terpisah.

Pendekatan Geografi

Selain konsep dan prinsip, geografi juga memiliki pendekatan keilmuan dalam mengkaji berbagai fenomena geosfera. Pendekatan yang biasa digunakan dalam geografi terdiri atas tiga macam, yaitu keruangan, kelingkungan dan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan, digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah ada dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang telah direncanakan. Pendekatan kelingkungan, digunakan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan di suatu lingkungan tertentu, baik antar makhluk hidup dengan makhluk hidup itu sendiri maupun antara makhluk hidup dengan habitatnya. Pendekatan kelingkungan ini sering pula dinamakan pendekatan ekologis. Pendekatan kompleks wilayah, pada dasarnya merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Interaksi antar wilayah akan berkembang sedemikian rupa karena ada regional complementarity, intervening opportunity dan spatial transfer ability. Dalam geografi, peluang interaksi antar wilayah dapat dikuantifikasi melalui prosedur tertentu dengan

mempertimbangkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah serta jarak antar wilayah yang bersangkutan. Semakin dekat jarak dan semakin besar jumlah penduduk, maka peluang interaksi antar wilayah juga akan semakin tinggi. Instrumen yang biasa digunakan dalam geografi, yaitu peta, citra penginderaan jauh dan statistika/matematika.

Obyek yang diamati geografi tidak tertutup kemungkinan akan memiliki kesamaan dengan ilmu-ilmu lain, akan tetapi yang membedakannya terletak pada cara pandang/pendekatan. Banjir, tidak saja merupakan obyek geografi, akan tetapi juga dapat dikaji oleh ilmu-ilmu lain. Begitu juga dengan fenomena kemiskinan, dapat pula menjadi obyek geografi, tentu saja dengan menggunakan cara pandang keilmuan geografi.

Struktur Geografi

Dalam komunitas guru geografi dan IPS, kadangkala masih masih saja terdapat pemahaman yang keliru, terutama dalam menguraikan cabang-cabang geografi. Geografi itu pada awalnya terdiri atas dua, yaitu geografi fisik dan geografi manusia, kemudian akhir-akhir ini berkembang dengan ditambahkan geografi teknik. Geografi fisik, mengutamakan aspek fisik yang menjadi fokus kajiannya, dan geografi manusia tentu saja mengutamakan aspek manusia. Namun tidak berarti bahwa dalam geografi fisik itu semata-mata membahas aspek-aspek alamiah, unsur manusia juga tetap masuk, hanya saja tidak dominan. Begitu juga sebaliknya.

Kedua cabang geografi tersebut memiliki ilmu pendukung. Geografi fisik banyak memerlukan dukungan dari meteorologi dan klimatologi, geologi dan geomorfologi, biogeografi dan hidrologi serta ilmu tanah. Geografi manusia banyak memerlukan bantuan dari demografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik, bahkan psikologi. Sedangkan cabang geografi yang terbaru, yaitu geografi teknik memerlukan bantuan kartografi, penginderaan jauh, fisika, kimia dan sistem

informasi geografis (SIG). Jadi, kalau masih ada pemahaman bahwa geologi dan geomorfologi itu merupakan bagian atau cabang dari geografi, hal tersebut sangatlah keliru, yang benar kedua ilmu tersebut merupakan pendukung geografi (ilmu Bantu), terutama geografi fisik. Begitu juga dengan kependudukan, dulu sering terdengar istilah pelajaran geografi dan kependudukan. Kependudukan atau demografi itu bukan geografi melainkan ilmu pendukung geografi, terutama geografi manusia. Jadi, kalau ada sebutan geografi dan kependudukan sangatlah keliru, sebab tidak boleh disebut geografi jika tidak membicarakan kependudukan. Kajian geografi terhadap kependudukan menurut Clarke (1967) terletak pada *demonstrating how spatial variations in the distribution, composition, migrations and growth of population are related to spatial variations in the nature of places*. Selain itu, masih menurut Clarke, konsen geografi terhadap kependudukan harus *concerned with the genetic or dynamic aspects of spatial variations over time, or how spatial relations or interaction between phenomena occur*.

Aplikasi Pembelajaran Geografi Dalam Pembelajaran IPS di MI

Untuk melihat tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran geografi, dapat diungkap kembali dari beberapa pengertian, prinsip, pendekatan serta hakekat geografi itu sendiri. Geografi, pada intinya mempelajari gejala geosfer, baik yang menyangkut aspek fisik maupun nonfisik ditinjau dari segi spatial dalam konteks yang luas. Gopsill mengatakan “the consideration of the nature of geography and the scope of its functions will have shown that the subject is concerned with the study of the surface of the earth and of the natural and physical forces which exert their influence in it. It is concerned with life of the people who inhabit it and particularly with the relationships which are seen to exist between them and their surrounding. Selanjutnya Sumaatmadja, mengatakan bahwa untuk menyetarakan hakekat pembelajaran geografi dengan pendidikan nasional Indonesia tentu saja harus dilihat dari permukaan bumi Indonesia, kondisi fisik dan kekuatan alam,

penduduk Indonesia dan hubungan yang terjadi antara penduduk dengan alam lingkungan Indonesia.

Mencermati kedua pendapat tersebut di atas, maka tujuan pengajaran geografi untuk tingkat persekolahan, dapat disarikan sbb: (1) mempelajari dan memahami sifat/ciri wilayah atau negara tertentu, (2) mempelajari, memahami potensi dan kondisi sumberdaya alam dan manusia yang tertuang dalam isi kurikulum harus memuat aspek fisik, sosial budaya, ekonomi, politik dan kualitas serta kuantitats demografi, (3) mempelajari dan memahami permasalahan yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia, terutama menyangkut masalah ekologi, wilayah dan sumberdaya alam.

Kemasan materi pelajaran geografi, tentu saja harus dikemas secara pedagogik dan psikologis disesuaikan dengan perkembangan para siswa. Namun untuk materi/kontennya harus mencakup : (1) bumi sebagai tempat tinggal, (2) hubungan manusia dengan lingkungannya, (3) dimensi keruangan dan historis, (4) wilayah, sumberdaya, kependudukan dan permukiman. Keempat konten tersebut harus diakomodir oleh kurikulum geografi, mulai tingkat SD sampai dengan SMA, dengan tekanan yang disesuaikan dengan perkembangan psikologis para siswa.

Menurut Daldjoeni (1982), ada lima tuntutan yang perlu dipenuhi oleh guru, yaitu :

(1) memiliki perhatian yang cukup banyak kepada permasalahan manusia, (2) memiliki kemampuan untuk menemukan sendiri faktor-faktor lokatif, pola-pola regional dan relasi keruangan yang terkandung oleh ataupun tersembunyi di belakang gejala-gejala sosial, (3) suka dan mampu mengadakan observasi pribadi di lapangan, (4) secara sederhana dapat mensistisasikan data-data yang berasal dari berbagai sumber, (5) mampu membedakan serta memisahkan kausalitas yang sungguh dari hal-hal yang sifatnya hanya kebetulan belaka. Selanjutnya Gabler sebagaimana diterbitkan National Caouncil for Geographic Education (1966) mengatakan bahwa,

teachers have three important functions to perform in the teaching of geography. The teacher must decide on the purposes, aims, or objectives must first be fully understood by the teacher so that they can be stated clearly and precisely to the class in geography. Secondly, a teacher must provide informative fact or experiences which will help the student achieve the objectives. Students must think about these facts in order to develop understanding and wisdom. Thinking is the essential process which the student must do for himself. Teachers must make sure that the thoughtful understanding of fact does carry over and become wisdom. Thus, the third and chief function of the teacher is that of a stimulator of thought. This is the great contribution of teachers to their student.

Geografi, untuk tingkat MI di Indonesia, dimasukkan pada rumpun IPS. Pembelajaran IPS diharapkan dapat membantu siswa membangun landasan untuk memahami kenyataan masyarakat. Setiap disiplin ilmu akan bertitik tolak dari perspektifnya yang spesifik. Pengetahuan biasanya dibangun berdasarkan fakta, konsep dan generalisasi. Pembelajaran terpadu IPS, sejatinya berangkat dari tema-tema sosial. Dalam membahas tema yang menjadi garapan IPS, adakalanya pembelajaran dilakukan dengan cara memanfaatkan beberapa disiplin ilmu sekaligus. Sejarah, dengan mencari asal-usul konsep, mempelajari sumber-sumber primer yang menjabarkan dan mempermasalahkan konsep-konsep dan menganalisis perkembangan dari waktu ke waktu. Geografi, menentukan lokasi tempat konsep pertama kali berkembang, bagaimana penyebarannya dari satu kawasan ke kawasan lain. Sosiologi, mempelajari peranan individu dan kelompok atau lembaga-lembaga. Antropologi, dengan mempelajari proses perubahan budaya.

Pembelajaran IPS dapat dikembangkan melalui beberapa perspektif. Perspektif pembelajaran IPS menurut Wiriaatmadja (2002) meliputi perspektif diri, akademik, pluralistik dan perspektif global. Perspektif diri, menjangkau kejadian-kejadian yang berulang kali serta dampaknya terhadap diri sendiri, keluarga, bangsa, bahkan dunia. Perspektif akademik, diperoleh melalui kajian dan aplikasi pengalaman

pembelajaran ilmu- ilmu sosial. Perspektif pluralistik, belajar menghormati perbedaan pendapat berdasarkan etnik, ras, agama, gender dan budaya. Perspektif global, menguasai pengetahuan, keterampilan dan komitmen yang diperlukan untuk dapat hidup bijaksana dalam dunia yang terus menerus mengalami perubahan.

Pembelajaran IPS di persekolahan, sampai saat ini masih belum berdaya. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik lingkungan sekolah, kebijakan pemerintah maupun para pelaksana di lapangan. Wiriaatmadja (2002) mengatakan bahwa pembelajaran IPS perlu terus diberdayakan. Upaya pemberdayaan pembelajaran IPS, meliputi : (1) proses pembelajarannya harus bermakna (meaningfull), (2) harus berlandaskan nilai (value based), (3) melakukan kegiatan aktif (active activity).

3. KONSEP DASAR SEJARAH

a) Pengertian Sejarah

Kalau kita berjumpa dengan kawan sering kali saling bertanya, misalnya: bagaimana kabarnya, dimana tinggal, putranya berapa dan begitu seterusnya. Kita juga sering diminta mengisi data pribadi, seperti: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, kawin/belum kawin, pekerjaan dan seterusnya. Pertanyaan dan istilah tersebut sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dan bersifat pertanyaan sejarah, sebab semua itu tadi mempertanyakan sesuatu yang sudah terjadi, menanyakan masa lampau kita.

Secara populis maupun elitis, istilah sejarah memang begitu populer. Orang banyak menanyakan tentang asal-usul sesuatu, atau para tokoh kalau berpidato tidak jarang mengucapkan dengan penuh semangat “jangan lupakan sejarah”, “bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai sejarah perjuangan bangsanya”.

Berbagai ilustrasi tersebut diatas adalah fenomena dan realitas yang terkait dengan konsep sejarah. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan sejarah itu? Istilah “sejarah” berasal dari

bahasa Arab, yakni dari kata “syajaratun” (dibaca” syajarah), yang memiliki arti “pohon kayu”. Pengertian “pohon kayu” di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan/pertumbuhan tentang sesuatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan (kontinuitas). Selain itu ada pula peneliti yang menganggap bahwa arti kata “syajarah” tidak sama dengan kata “sejarah”, sebab sejarah bukan hanya bermakna sebagai “pohon keluarga” atau asal-usul atau silsilah. Walaupun demikian diakui bahwa ada hubungan antara kata “syajarah” dengan kata “sejarah”, seseorang yang mempelajari sejarah tertentu berkaitan dengan cerita, silsilah, riwayat dan asal-usul tentang seseorang atau kejadian (Sjamsuddin, 1996: 2). Dengan demikian pengertian “sejarah” yang dipahami sekarang ini dari alih bahasa Inggris yakni “history”, yang bersumber dari bahasa Yunani Kuno “historia” (dibaca “istoria”) yang berarti “belajar dengan cara bertanya-tanya”. Kata “historia” ini diartikan sebagai pertelaan mengenai gejala- gejala (terutama hal ikhwal manusia) dalam urutan kronologis (Sjamsuddin dan Ismaun, 1996: 4).

Setelah menelusuri arti “sejarah” yang dikaitkan dengan arti kata “syajarah” dan dihubungkan dengan pula dengan kata “history”, bersumber dari kata “historia” (bahasa Yunani Kuno) dapat disimpulkan bahwa arti kata sejarah sendiri sekarang ini mempunyai makna sebagai cerita, atau kejadian yang benar- benar telah terjadi pada masa lalu. Sunnal dan Haas (1993: 278) menyebutnya; “history is a chronological study that interprets and gives meaning to events and applies systematic methods to discover the truth”. Carr (1982: 30). menyatakan, bahwa “history is a continuous process of interaction between the historian and his facts, and unending dialogue between the present and the past”.

Hugiono dan P.K. Poerwatarana (1987:9) mendefinisikan sejarah sebagai berikut: “Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami”. Sedangkan Sartono Kartodirdjo (1992:59) secara singkat mengkonsepkan “Sejarah sebagai pelbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau”. Dan

pada sisi lain Ephraim Fischhoff (Fairchild, H.P. dkk: (1982:141) mengemukakan: “Sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuatu dengan metode tertentu yang terpercaya”.

Kemudian disusul oleh Depdiknas memberikan pengertian sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini (Depdiknas, 2003: 1). Namun yang jelas kata kuncinya bahwa sejarah merupakan suatu penggambaran ataupun rekonstruksi peristiwa, kisah, maupun cerita, yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu.

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan tadi, kunci dalam pengertian sejarah terletak pada masa lampau, baik berupa peristiwa pengalaman kolektif maupun riwayat masa lampau tersebut. Secara singkat, sejarah itu berkenaan dengan peristiwa masa lampau tentang kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Dalam konteks tadi, peristiwa atau pengalaman kolektif atau riwayat masa lampau itu, tidak hanya digambarkan ataupun dinarasikan sebagai suatu fakta, melainkan ditafsirkan dan dianalisis, bahkan juga diteliti, sejarah ini tidak hanya sebagai pengetahuan, melainkan memenuhi syarat juga sebagai bidang ilmu. Dalam hal ini termasuk bidang ilmu sosial.

Secara objektif, suatu peristiwa atau pengalaman hidup di masa lampau, tidak dapat diulang kembali. Namun dengan menerapkan suatu metode, peristiwa atau pengalaman tersebut dapat direkonstruksi, disusun kembali. Secara murni, tentu saja hasil rekonstruksi itu tidak merupakan duplikat sebagai mana aslinya. Namun paing tidak secara mencolok. Ungkapan sejarah berulang dan mengambil pelajaran dari sejarah, hsl tersebut merupakan kesadaran dari kita manusia, bahwa hal-hal tertentu sebagai pengalaman masa lampau, mungkin terjadi atau berulang untuk diwaspadai, khususnya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang membawa laknat bagi kehidupan umat manusia.

Sedangkan peristiwa masa lampau itu, tidak akan mungkin terulang kembali. Apa yang telah terjadi, telah menjadi fakta sejarah. Sebagai suatu kesadaran, kita wajib waspada terhadap pengalaman sejarah yang membawa laknat bagi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.

Suatu makna yang berharga, dengan mempelajari peristiwa dan pengalaman masa lampau dan dihubungkan dengan kejadian serta pengalaman aktual hari ini, kita dapat mengetahui dan mengkaji perkembangan. Dan dari perkembangan tersebut, kita dapat memprediksi pertumbuhan (penduduk, produksi, perluasan kita), mulai masa lampau sampai saat ini, kita dapat memprediksi atau paling tidak melihat kecenderungan masa yang akan datang. Dalam hal ini, belajar, mempelajari dan mengkaji sejarah, bukan merupakan kegiatan yang statis, malah justru merupakan suatu telaahan yang dinamis ke masa yang akan datang. Hanya tinggal bagaimana Anda dan kita semua sebagai guru IPS mengajarkan dan membelajarkannya, agar belajar sejarah itu sebagai kegiatan dinamis yang jauh dari menjemukan. Bahkan justru sebaliknya merupakan hal yang sangat menarik minat yang berkesinambungan.

Peranan Sejarah

Pertama, sejarah sebagai peristiwa; adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Pengertian pada 'masyarakat manusia' dan 'masa lampau' sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Sebab kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia, dalam pengertian di sini, bukanlah merupakan suatu peristiwa sejarah. Sebaliknya juga peristiwa yang terjadi pada umat manusia namun terjadi pada sekarang, bukan pula peristiwa sejarah. Karena itu konsep siapa yang menjadi subyek dan obyek sejarah serta konsep waktu, dua-duanya menjadi penting.

Pengertian sejarah sebagai peristiwa, sebenarnya memiliki makna yang sangat luas dan beraneka ragam. Keluasan dan keanekaragaman tersebut sama dengan luasnya dan kompleksitas kehidupan manusia. Beberapa aspek kehidupan kita seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, agama, keamanan, dan sebagainya semuanya terjalinkan

dalam peristiwa sejarah. Dengan demikian sangat wajar jika untuk memudahkan pemahaman kita tentang para ahli sejarah mengelompokkan lagi atas beberapa tema. Pembagian sejarah yang demikian itulah yang disebut pembagian sejarah secara tematis, seperti: sejarah politik, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah agama, sejarah pendidikan, sejarah kesehatan, dan sebagainya.

Selain pembagian sejarah berdasarkan tema (tematis), juga dikenal pembagian sejarah berdasarkan periode waktu. Dalam pembagian sejarah berdasarkan periodisasi tersebut kita dapat mengambil contoh untuk sejarah Indonesia: zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu-Budha, zaman pengaruh Islam, zaman kekuasaan Belanda, zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, zaman Revolusi Fisik, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Sebagai patokan dalam menentukan tiap periode/zaman tersebut harus terpenuhi unsur pembeda antar periode satu dengan lainnya.

Di samping itu berdasarkan unsur ruang, kita mengenal pembagian sejarah secara regional atau kewilayahan. Contohnya; sejarah Eropa, sejarah Asia, sejarah Timur Tengah, sejarah Amerika Latin, sejarah Timur-Jauh, sejarah Asia Tenggara, sejarah Afrika Utara, dan sebagainya. Dalam hal ini sejarah regional juga bisa menyangkut sejarah dunia, tetapi ruang-lingkupnya lebih terbatas oleh persamaan karakteristik baik fisik maupun sosial-budayanya.

Sejarah sebagai peristiwa sering juga disebut sejarah sebagai kenyataan dan sejarah serba obyektif (Ismaun, 1993: 279). Artinya peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi yang didukung oleh evidensi-evidensi yang menguatkan baik berupa saksi mata (witness) yang dijadikan sumber-sumber sejarah (historical sources), peninggalan-peninggalan (relics atau remains) dan catatan-catatan atau records (Lucey, 1984: 27). Selain itu dapat pula peristiwa itu diketahui dari sumber-sumber-sumber yang bersifat lisan yang disampaikan dari mulut

ke mulut. Menurut Sjamsuddin (1996: 78), ada dua macam untuk sumber lisan tersebut. Pertama, sejarah lisan (*oral history*), ingatan lisan (*oral reminiscence*) yaitu ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang diwawancarai oleh sejarawan. Kedua, tradisi lisan (*oral tradition*) yaitu narasi dan deskripsi dari orang-orang dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang disampaikan dari mulut ke mulut selama beberapa generasi. Apapun bentuknya, peristiwa sejarah, baru diketahui apabila ada sumber yang sampai kepada sejarawan dan digunakan untuk menyusun peristiwa berdasarkan sumber. Oleh karena suatu cerita sejarah sangat tergantung selain oleh kemahiran sejarawan itu sendiri juga kelengkapan sumber yang tersedia.

Kedua, sejarah sebagai ilmu; dalam pengertiannya kita mengenal definisi sejarah yang bermacam-macam, baik yang menyangkut persoalan kedudukan sejarah sebagai bagian dari ilmu sosial, atau sejarah sebagai bagian dari ilmu humaniora, maupun yang berkembang di sekitar arti makna dan hakikat yang terkandung dalam sejarah. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi sejarah yang akan dikemukakan oleh para sejarawan.

Bury (Teggart, 1960: 56.) secara tegas menyatakan “History is science; no less, and no more”. Sejarah itu adalah ilmu, tidak kurang dan tidak lebih. Pernyataan ini mungkin tidak bermaksud untuk memberikan penjelasan batasan tentang sesuatu konsep, melainkan hanya memberikan tingkat pengkategorian sesuatu ilmu atau bukan. Penjelasan tersebut jelas tidak memadai untuk untuk memperoleh sesuatu pengertian. Definisi yang cukup simple dan mudah dipahami diperoleh dari Carr (1982: 30). yang menyatakan, bahwa “history is a continuous process of interaction between the historian and his facts, and unending dialogue between the present and the past” .

Pendapat Carr tersebut sejalan dengan pandangan Colingwood (1973: 9) yang menegaskan bahwa: “Every historian would agree, I think that history is a kind of research or inquiry”. Colingwood berpendapat bahwa sejarah itu merupakan riset atau suatu inkuiri. Colingwood selanjutnya

menegaskan bahwa sasaran penyusunan sejarah adalah untuk membentuk pemikiran agar kita dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menemukan jawaban-jawabannya. Oleh karena itu menurut Colingwood, “all history is the history of thought”, semua sejarah itu adalah sejarah pemikiran.

Daniel dan Banks (Sjamsuddin, 1996: 6) mengemukakan pengertian sejarah dari segi materi sejarah yang disajikan dalam obyek penelitian. Daniel berpendapat bahwa “sejarah adalah kenangan pengalaman umat manusia”. Sedangkan Banks berpandangan bahwa semua kejadian di masa lalu adalah sejarah, sejarah sebagai aktualitas. Banks selanjutnya mengatakan bahwa sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sartono Kartodirdjo, sejarawan Universitas Gajah Mada menyatakan bahwa sejarah dapat dilihat dari arti subyektif dan obyektif. Sejarah dalam arti subyektif adalah suatu konstruk, yaitu suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita (Kartodirdjo, 1992: 14-15). Uraian atau cerita tersebut merupakan satu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta yang dirangkaikan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Kesatuan itu menunjukkan koherensi, artinya pelbagai unsur bertalian satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Fungsi unsur-unsur itu saling menopang dan saling tergantung satu sama lain. Sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah proses sejarah dalam aktualitasnya. Keseluruhan proses itu berlangsung terlepas satu dari subyek manapun. Obyektif di sini dalam arti tidak memuat unsur-unsur subyek (pembuat cerita).

Kartodirdjo selanjutnya menegaskan bahwa sejarah dapat didefinisikan sebagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lampau (Kartodirdjo, 1992: 59). Pengalaman kehidupan kolektif inilah yang merupakan landasan untuk menentukan identitasnya. Seperti dalam kehidupan masyarakat

tradisional, identitas seseorang dikembalikan ke asal-usulnya maupun keluarga besarnya. Itulah sebabnya dalam historiografi masyarakat tradisional dilacak secara dini asal-usulnya bahkan sampai ke mitologisnya. Keberadaan mitos dalam suatu sejarah itu penting, mengingat dalam pemikiran sejarah diwarnai oleh pandangan hidupnya, di mana manusia selalu merasa sebagai pusat alam semesta kosmos (Kartodirdjo, 1992: 59-60).

Gottchalk (1986: 8) mengemukakan pendapat yang sedikit agak berbeda. Ia mengatakan bahwa: Sesungguhnya sejarawan yang menulis tidak menarik, dalam hal itu merupakan sejarawan yang buruk. Secara profesional ia wajib melukiskan peristiwa-peristiwa yang paling menggairahkan daripada masa lampau dunia dan menghidupkan kembali suasananya, di samping melukiskan peristiwa-peristiwa bisa.

Gottschalk berkesimpulan bahwa sejarah itu lebih berlagam sastra, dalam arti keberadaan sejarah itu lebih condong ke “seni” atau “art”, walaupun di bagian lain ia mengakui bahwa sejarah juga sebagai “ilmu”. Gottschalk yang lebih condong ke seni juga tidak sendirian. Beberapa sejarawan “humaniora” lainnya juga bertengger seperti nama-nama Arthur Schlesinger, Jr., maupun Steel Commager. Di tengah perdebatan ini, akhirnya muncul pendapat moderat. Charles A. Beard, seorang sejarawan Amerika Serikat yang menulis artikel *Written History as an Act of Faith* menyatakan bahwa;

... kedua hal itu saling mengisi. Pastilah bahwa sejarah memiliki metode ilmiah. Berjuta-juta fakta sejarah dapat dipastikan secara meyakinkan baik bagi awam maupun bagi para ahli, sama halnya dengan fakta ...Kebenaran daripada suatu peristiwa itu dibuktikan oleh satu seri dokumen yang telah diujisedemikian seksama akan otentisitasnya dan kredibilitasnya, sehingga hal itu dianggap oleh sejarawan sebagai fakta, atau lebih tepat satu rangkaian fakta...(Gottschalk, 1986: 4).

Ketiga, Sejarah sebagai cerita; bahwa sejarah itu pada hakikatnya merupakan hasil rekonstruksi sejarawan terhadap sejarah sebagai peristiwa berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dimilikinya. Dengan demikian di dalamnya terdapat pula penafsiran sejarawan terhadap makna suatu peristiwa. Perlu diketahui bahwa buku-buku sejarah yang kita baca, baik buku

pelajaran di sekolah, karya ilmiah di perguruan tinggi, maupun buku-buku sejarah lainnya, pada hakekatnya merupakan bentuk-bentuk konkrit sejarah sebagai peristiwa (Ismaun, 1993: 280).

Dengan demikian pula bahwa dalam sejarah sebagai cerita, merupakan sesuatu karya yang dipengaruhi oleh subyektivitas sejarawan. Sebagai contoh, tentang biografi Diponegoro. Jika ditulis oleh sejarawan Belanda yang pro-pemerintah kolonial, maka Diponegoro dalam pikiran dan pendapat sejarawan tersebut dipandang sebagai “pemberontak” bahkan mungkin “penghianat”.

Sebaliknya jika biografi itu ditulis oleh seorang sejarawan yang pro- perjuangan bangsa Indonesia, sudah dapat diduga bahwa Diponegoro adalah “pahlawan” bangsa Indonesia. Di sinilah letak sejarah sebagai cerita lebih bersifat subyektif. Artinya memuat unsur-unsur dari subyek, si penulis / sejarawan sebagai subyek turut serta mempengaruhi atau memberi “warna”, atau “rasa” sesuai dengan “kacamata” atau selera subyek (Kartodirdjo, 1992: 62). Oleh karena itu tidak aneh jika sejarah sebagai cerita sering disebut “sejarah serba subyektif”. Sejarah akhirnya dapat disimpulkan merupakan hasil rekonstruksi intelektual dan imajinatif sejarawan tentang apa yang telah dipikirkan, dirasakan, atau telah diperbuat oleh manusia, baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan atas rekaman-rekaman lisan, tertulis atau peninggalan sebagai pertanda kehadirannya di suatu tempat tertentu. Sejarah, bagi sejarawan, merupakan wacana intelektual (*intellectual discourse*) yang tidak berkesudahan.

Keempat, Sejarah sebagai seni, dihubungkan dengan cara rekonstruksi dan penulisan sejarah itu sendiri. Sejarah dikatakan sebagai seni karena seorang sejarawan membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, gaya bahasa dalam menulis sejarah. Selama proses penelitian, sejarawan memerlukan ilham, ide atau intuisi untuk menentukan setiap langkah, memilih suatu penjelasan dan apa yang harus dikerjakan. Sejarawan memerlukan imajinasi dalam sebuah peristiwa sejarah, ia

diharapkan mampu membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, Apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Sejarawan dituntut bisa mengolah unsur emosionalnya untuk menumbuhkan rasa empati dan menyatakan perasaan dengan objeknya. Gaya bahasa dalam sejarah lebih menekankan pada bahasa yang lugas dan pemaparan yang detail, selain itu bahasa yang digunakan dapat dimengerti dan dipahami khalayak ramai.

Kedudukan Sejarah

Kedudukan sejarah di dalam ilmu pengetahuan, digolongkan ke dalam:

- 1) Ilmu sosial, karena menjelaskan perilaku sosial. Oleh karena itu pendidikan sejarah khususnya di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pendidikan sejarah termasuk pendidikan ilmu sosial, bukan pendidikan bahasa dan satera, karena fokus kajiannya menyangkut proses-proses sosial (pengaruh timbalik antara kehidupan aspek-sosial yang berkaitan satu sama lainnya) beserta perubahan-perubahan sosial. Itu sebabnya dalam pembelajaran sejarah kajian - kajiannya selalu dituntut pendekatan - pendekatan inter / multidisipliner, karena tidak cukup dengan kajian sejarah naratif dapat menjelaskan aspek-aspek sosial yang melingkupinya dapat dieksplanasikan. Ditinjau dari usianya, sejarah bahkan termasuk ilmu sosial tertua yang embrionya telah ada dalam bentuk-bentuk mitos dan tradisi-tradisi dari manusia- manusia yang hidup paling sederhana (Gee, 1950: 36, Sjamsuddin, 1996: 190).
- 2) “Seni” atau “art”. Sejarah digolongkan dalam “sastera”. Herodotus (484-425 SM) yang digelar sebagai “bapak sejarah” beliau-lah yang telah memulai sejarah itu sebagai “cerita” (story-telling), dan sejak itu sejarah telah dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu kemanusiaan atau “humaniora” (Sjamsuddin, 1996: 189- 190). Sejarah dikategorikan sebagai ilmu humaniora terutama karena dalam sejarah memelihara dan merekam warisan budaya serta menafsirkan makna perkembangan umat manusia. Itulah sebabnya dalam tahap historiografi dan eksplanasinya, sejarah memerlukan

sentuhan-sentuhan “estetika” atau “keindahan” (Ismaun, 1993: 282-283).

Kegunaan Sejarah

Secara rinci dan sistematis, Notosusanto (1979: 4-10) mengidentifikasi terdapat empat jenis kegunaan sejarah, yakni: Pertama, fungsi edukatif; artinya bahwa sejarah membawa dan mengajarkan kebijaksanaan ataupun kerarifan - kearifan. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam ungkapan John Seeley yang mempertautkan masa lampau dengan sekarang dalam pemeonya *We study history, so that we may be wise before the event*. Oleh karena itu penting pula ungkapan - ungkapan seperti; belajarlah dari sejarah, atau sejarah mengajarkan kepada kita.

Kedua, fungsi inspiratif. Artinya dengan mempelajari sejarah dapat memberikan inspirasi atau ilham. Sebagai contoh melalui belajar sejarah perjuangan bangsa, kita dapat terilhami untuk meniru dan bila perlu “menciptakan” peristiwa serupa yang lebih besar lagi dan paling tidak dengan belajar sejarah dapat memperkuat *l'esprit de corps* atau spirit dan moral. Meminjam filosof spiritual Prancis Henry Bergson sebagai elan vital sebagai energi hidup atau daya pendorong hidup yang memungkinkan segala pergerakan dalam kehidupan dan tindak-tanduk manusia.

Ketiga, fungsi instruktif; yaitu bahwa dengan belajar sejarah dapat menjadi berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejuruan atau keterampilan tertentu seperti navigasi, jurnalistik, senjata/militer dan sebagainya. Keempat, fungsi rekreasi, artinya dengan belajar sejarah itu dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seorang pembelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian pembaca apakah itu berupa roman maupun cerita-cerita peristiwa lainnya Selain itu juga sejarah dapat memberikan rasa kesenangan lainnya seperti “pesona perlawatan” yang dipaparkan dan digambarkan kepada kita melalui pelbagai evidensi dan imaji. Sebab dengan mempelajari

pelbagai peristiwa menarik di berbagai tempat, negara-bangsa, kita ibarat berwisata ke pelbagai negara di dunia

Fakta Sejarah

Sejarah adalah disiplin ilmu yang keberadaannya tergantung kepada ada tidaknya sumber. Dari sumber-sumber itulah para sejarawan menggali data. Dari data itu kemudian diadakan seleksi relevansinya dan kritik sumber baik eksteren maupun interen untuk mendapatkan fakta yang kredibel, akurat, dan original. apa yang dimaksud dengan fakta sejarah itu?

Gejala, atau kenyataan yang terlihat, seperti seorang nelayan sedang menangkap ikan di laut, pak tani sedang mencangkul, para siswa sedang olahraga, Kartini menulis surat kepada Abendanon, Tomy Suharto sedang diadili, dan seterusnya, adalah sebuah kejadian, sebuah kenyataan yang ada. Gejala, kejadian dan kenyataan yang ada tersebut dapat ditanggapi dengan membuat pernyataan, istilahnya yang dapat menggambarkan kenyataan atau rumusan, atau apapun kejadian tadi. Pernyataan atau rumusan tentang gejala, kenyataan atau kejadian itulah yang kemudian disebut fakta. Jadi fakta dalam hal ini bukan kejadiannya pak tani sedang mencangkul, nelayan sedang menangkap ikan, Tomy Suharto sedang diadili, tetapi pernyataan atau rumusan pak tani sedang mencangkul, pernyataan nelayan sedang menangkap ikan, pernyataan Tomy Suharto sedang diadili. Artinya, suatu fakta pada prinsipnya adalah suatu pernyataan, atau rumusan yang dapat dibuktikan “ada”, atau “tidak adanya” dalam kenyataan (Mestika Zed, 1985). Kalau demikian fakta sebenarnya merupakan produk dari proses mental (sejarawan) atau motorisasi (Sartono Kartodirjo, 1992). Karna itu wajar kalau fakta itu ada unsur- unsur subjektivitas. Dalam konteks inilah pentingnya ketajaman interpretasi dan kejujuran para ilmuwan (sejarawan). Dari pandangan sejarah itu menunjukkan bahwa fakta dalam sejarah adalah rumusan atau kesimpulan yang di ambil dari sumber sejarah dan dokumen.

Demikianlah pemahaman tentang fakta. Bagaimana kalau Anda setiap hari membaca surat kabar. Misalnya da berita banjir, tanah lonsor, berita demo mahasiswa, berita pemboman

WTC, berita penyerangan Amerika Serikat terhadap Afganistan. Coba yang anda baca seperti contoh itu, fakta atau kejadian? Yang anda baca itu adalah fakta, karena merupakan rumusan-rumusan atau pernyataan- pernyataan dari wartawan atau redaktur surat kabar yang Anda baca.

Mengenai sifat fakta ada beberapa kategori:

- a. Fakta Keras, (*hardfact*), yaitu fakta-fakta yang biasanya sudah diterima sebagai suatu peristiwa yang benar, yang tidak lagi di perdebatkan. Kebanyakan fakta ini adalah bebas dari kemauan kita. Itulah sebabnya fakta ini sering disebut dengan "fakta keras", fakta yang sudah mapan (*established*) dan tidak mungkin dipalsukan lagi. Contoh:
 - Proklamasi Kemerdekaan RI terjadi pada 17 Agustus 1945.
 - Sukarnolah yang membacakan teks proklamasi Kemerdekaan RI
 - Wakil Presiden yang pertama di Indonesia adalah Drs. Moh. Hatta.
- b. Fakta lunak atau fakta mentah, yang disebut dengan *cold fact* (fakta dingin). Dikatakan sebagai fakta lunak karena masih perlu dibuktikan dengan dukungan fakta-fakta lain. Oleh karena fakta tidaklah tersedia begitu saja, maka para sejarawan melalui penelitian sumber-sumber sejarah mencoba mengolah sehingga bias dimengerti. Tetapi semua ini masih terbuka kemungkinan tirnbuNya perdebatan tentang kebenarannya. Bisa saja bahwa apa yang dianggap sebagai fakta belum tentu diterima oleh orang lain, sehingga tidak jarang masih mengundang perdebatan. Contoh:
 - Pernyataan bahwa Sukarno pernah minta maaf kepada Jaksa Agung pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1933. Ternyata pernyataan ini menimbulkan berbagai kontroversial (lih. William H. Frederick, 1982).
 - Fakta tentang pembunuhan Presiden J. F. Kennedy.

- c. Inferensi, merupakan ide-ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta yang satu dengan fakta yang lain (lih. Mestika Zed, 1985). Sekalipun inferensi ini berlandaskan pada pertimbangan logis dan mungkin subyektif, tetapi ide atau gagasan ini dapat dimasukkan dalam kategori fakta, tetapi masih cukup lemah. Karena inferensi tidak lebih dari suatu pertimbangan logis yang menjelaskan pertalian antara fakta-fakta. Contoh:
- pernyataan bahwa PKI dalam organisasi mantelnya adalah anak Mas Bung karno sebelum peristiwa G. 30 S.
 - pernyataan bahwa Suharto mungkin mendukung G. 30 S, karena sudah tahu sebelumnya, padahal ia pejabat yang bertanggung jawab keamanan negara waktu itu.
- d. Opini, mirip dengan inferensi. Tetapi opini ini lebih bersifat pendapat pribadi / perorangan. Karena pendapat pribadi maka tidak didasarkan konsideran umum. Sebagai salah satu bentuk informasi sejarah, opini merupakan penilaian (value judgment) atau sangkaan pribadi. Bahkan d keran-ka yang lebih lugs, opini menjadi semacam interpretasi. Contoh:
- Proklamasi 17-8-1945 adalah klimak perjuangan bangsa Indonesia
 - Renaisans adalah keinginan manusia untuk mengembalikan peradaban klasik yang bersifat antroposentris.

Di samping jenis fakta menurut sifatnya, dilihat bentuk atau wujudnya juga diklasifikasikan menjadi:

- a. Mentifact: misalnya keyakinan dalam masyarakat.
- b. Artefact: misalnya bangunan, benda-benda arkeologi.
- c. Sociofact: berbagai jenis interaksi dan aktivitas masyarakat.

Di dalam menghubungkan antar fakta itu tidak sekedar menyusun fakta dalam urutan waktu, tempat atau topik, tetapi harus sampai pada apa yang disebutnya sebagai sintesis (menjawab permasalahan). Untuk memenuhi sebagai sintesis atau menjawab permasalahan, fakta-fakta itu harus dihubungkan

secara objektif, terutama dengan perinsip sebab akibat (kausalita).

Sumber Sejarah

Bagi sejarawan dalam upaya menyelidiki peristiwa yang sebenarnya telah terjadi, hanya dapat dikerjakan lewat perantaraan bahan yang dinamakan sumber sejarah. Yang dimaksud dengan sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai media atau bahan untuk merekonstruksi, menggambarkan, menuliskan dan mengisahkan kembali sejarah yang telah terjadi. Penyusunan gambaran atau ceritera sejarah itu mengandung dua kegiatan, yakni: penelitian kejadian historis, dan penulisan dalam bentuk laporan. Untuk itu diperlukan sumber sejarah yang lengkap dan memadai.

Bagaimana seorang sejarawan menghadapi dan menggunakan sumber sejarah ini? Mula pertama sudah menentukan/memiliki tema, topik dan pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya. Baru kemudian melakukan tahapan heuristic (mencari, menemukan dan memilih sumber sejarah yang relevan). Dari sumber-sumber sejarah itu sejarawan akan mendapatkan data atau keterangan tentang masa lampau, kemudian dirumuskan fakta-faktanya. Sumber sejarah dalam hal ini juga sering dikenal dengan sejarah serba objek.

Mengenai jenis sumber sejarah, ada beberapa klasifikasi. Misalnya ada yang membagi dari wujudnya, yakni:

- a. Sumber sejarah yang berupa benda, seperti bangunan, perkakas/peralatan, senjata
- b. Sumber sejarah tertulis, seperti dokumen, surat-surat, perasasti.
- c. Sumber lisan, misalnya: hasil wawancara (Lih, Nugroho Notosusanto, 1971)

Mengenai sumber tertulis, ada yang membagi menjadi sumber resmi dan tidak resmi, sumber formil dan informil. Kedua jenis klasifikasi itu dapat saling silang. Contoh:

- Sumber resmi formal, misalnya, keputusan presiden mengenai pengangkatan Sekjen Dewan Pertahanan Keamanan
- Sumber resmi Informal, misalnya: Surat Katebelece (surat biasa) dari kepala Staf umum laksamana Madya R. Subono Kepada Panglima Kostranas.
- Sumber tak resmi Formil, misalnya, Surat Ketua MPR, Prof. Dr. Amin Rais selaku peribadi kepada kepala Sekolah SMU 3 Yogyakarta, tentang al ihwal putrinya.
- Sumber tak resmi Informal, misalnya: surat dari Prof. Malik Fajar kepada isterinya. Hal ihwal rumah tangganya.

Disamping pembagian tersebut, ada pembagian sumber sejarah yang begitu familier, yakni sumber primer dan skunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra yang lain, atau dengan alat mekanis (Louis Gosthalk, 1975). Nugroho Notosusanto menjelaskan bahwa sumber primer adalah sumber-sumber yang keterangannya diperoleh langsung oleh yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri.

Dari keterangan tersebut maka yang ditegaskan bahwa sumber primer tidak lain sumber sejarah yang merupakan keterangan atau kesaksian secara langsung, baik oleh para pelaku maupun para saksi dengan mata kepala sendiri. Dalam menyaksikan itu bisa dengan alat, misalnya alat mekanis (tape recorder). Karena hasil dari wawancara dari pelaku sejarah dapat dikatakan sebagai sumber primer.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diberikan oleh orang lain atau sumber lain, dimana seseorang tadi tidak menyaksikan secara langsung peristiwanya. Atau apat dikatakan sumber sekunder adalah k su dari siapa saja yang bukan merupakan saksi pandangan mata mereka itu tidak hadir/tidak menyaksikan peristiwa yang telah terjadi.

KONSEP DASAR SEJARAH

Sejarah sebagai bidang ilmu sosial, memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya, dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu adalah:

- 1) Waktu
- 2) Dokumen
- 3) Alur peristiwa
- 4) Kronologi
- 5) Peta
- 6) Tahap-tahap peradaban
- 7) Ruang
- 8) Evolusi
- 9) Revolusi

Bahwa waktu merupakan konsep dasar pada sejarah, peristiwa itu tidak dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah jika tidak dinyatakan waktu terjadinya, terutama waktu yang menunjukkan waktu masa lampau. Waktu terutama waktu yang telah lampau, menjelaskan sifat, bobot dan warna peristiwa yang bersangkutan. Peristiwa sejarah, dapat dinayatan sejarah apabila terkait dengan waktu ini.

Konsep yang paling melekat dengan waktu adalah ruang meskipun secara karakteristik konsep ruang lebih mendekati dengan geografi. Pada abad XVIII, seorang ahli filsafat Jerman mengemukakan bahwa sejarah dengan geografi merupakan ilmu dwi tunggal, artinya penelaahan sesuatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya, tidak dapat dilepas dari ruang waktu terjadinya. sejarah mengungkapkan kapan terjadinya sedang geografi merupakan petunjuk dimana peristiwa yang ditelaah. Oleh karena itu, peta menjadi alat abntu tentang lokasi sesuatu peristiwa itu terjadi.

Selanjutnya, konsep alur peristiwa tidak lain adalah suatu rentetan peristiwa atau rentetan pengalaman sejarah masa lampau berdasarkan urutan waktu terjadinya. Atau dengan ungkapan konsep yang lain yaitu kronologi peristiwa atau pengalaman sejarah masa lampau. Konsep alur peristiwa dan

kronologi, mengungkapkan dinamika peristiwa atau pengalaman sejarah dari waktu ke waktu yang menunjukkan perkembangan serta perubahannya. Penerapan dan pengungkapan peristiwa berdasarkan konsep alur peristiwa serta kronologi waktunya, selain dapat mengungkapkan prosesnya, juga dapat mengungkapkan kecepatan proses tersebut apakah peristiwa atau penalaman sejarah itu berlangsung lambat ataukah cepat. Jika peristiwa itu berlangsung sangat cepat dapat kita sebut revolusi, sedangkan bilang sangat lambat, kita sebut evolusi.

Dengan demikian, konsep revolusi juga merupakan suatu kata kunci yang dapat diterapkan dalam telaah sejarah.

Dalam alur peristiwa yang menelaah sejarah kebudayaan secara evolusi, kita juga dapat mengungkapkan tahap-tahap peradaban sebagai perkembangan teknologi dan kemampuan teknologi masyarakat manusia dari waktu ke waktu. Perkembangan masyarakat dari mulai tahap peramu sederhana, ke peramu lebih maju, selanjutnya ke tahap cocok tanam sederhana, dan kemudian ke masyarakat pertanian maju, merupakan tahap-tahap peradaban masyarakat berdasarkan penguasaan teknologi serta sekaligus juga tahap ekonominya. Konsep tahap-tahap peradaban ini dalam penerapan telaahan sejarah, merupakan suatu metode yang dapat mengungkapkan perkembangan serat kemajuan sesuatu masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan sesuai dengan konsep tahap-tahap peradaban, kita dapat merumuskan suatu generalisasi bahwa bagaimanapun sederhananya masyarakat, tidak ada yang mandeg budayanya, melainkan selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Yang berbeda terjadi di antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, terletak pada kecepatannya.

Di dalam kajian sejarah ada tiga konsep yang utama. Pertama, perubahan, yaitu ketidaksamaan dari suatu keadaan yang satu dengan keadaan yang lain, dari waktu yang satu ke waktu yang lain. Misalnya perubahan dari masa Demokrasi Terpimpin ke Demokrasi Pancasila, dari masa Orde Baru berubah ke Orde Reformasi. Perubahan yang masuk kategori peristiwa sejarah ialah perubahan-perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Jadi tidak setiap perubahan tercatat sebagai peristiwa sejarah. Contoh seorang

guru di suatu daerah yang secara rutin tiap pagi pergi ke sekolah untuk mengajar, tiba-tiba suatu saat makan bersama Kepala Negara, tentu merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi seorang guru tadi. Kedua, konsep tentang waktu, maksudnya bahwa setiap peristiwa sejarah itu mungkin sebagai sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi akan senantiasa dalam suatu bingkai waktu. Aspek waktu ini akan sangat terasa kalau kita mencermati sebuah proses perubahan atau proses pembuatan sesuatu. Misalnya: proses pembuatan kursi. Semula kayu diolah menjadi bagian-bagian: kaki, tempat duduk, kemudian dirakit, jadilah kursi. Contoh lain, peristiwa sekitar Proklamasi. Dalam peristiwa ini nampak atau dapat dimengerti secara nyata adanya proses yang berlangsung dalam dimensi waktu. Lihat sekali lagi ilustrasi berikut:

Ketiga, konsep tentang Kontinuitas. Kehidupan manusia berada dalam rangkaian perubahan demi perubahan yang berkesinambungan. Perubahan demi perubahan tersebut tidak akan berhenti pada suatu titik peristiwa. Dalam konteks kekinian (postmodern) bahkan diyakini bahwa perubahan telah menjadi suatu yang pasti sebagaimana ungkapan ahli masa depan (futurolog), saat ini yang pasti adalah ketidakpastian dan yang tetap adalah perubahan (*the certain now is uncertain and the now is changing*). Sebagian perubahan yang terjadi tentunya ada yang bermakna sangat dalam bagi manusia, tetapi sebagian lagi sangat boleh jadi tidak demikian. Kebermaknaan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kedekatan, hubungan, kepentingan atau dampak suatu perubahan terhadap manusia tertentu. Perubahan-perubahan tertentu yang menjadi momentum sejarah tertentu bahkan sangat mungkin mengubah kehidupan banyak orang

4. KONSEP DASAR EKONOMI

A. Pengertian Ekonomi

Pada dasarnya ekonomi merupakan kegiatan sosial, karena tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri dalam

memenuhi kebutuhannya. Manusia satu sama lain harus saling bekerjasama. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan akan makanan bagi keluarganya, ayah mencari uang yang lalu digunakan oleh ibu untuk belanja bahan makanan di pasar. Kemudian ibu memasaknya untuk disajikan kepada seluruh anggota keluarga. Atau, bisa saja rumah tangga tidak memasak tapi membeli makanan siap saji dari penjual, penjual memproduksi sendiri atau memperoleh barang dagangannya dari produsen. Aktivitas mencari nafkah, belanja, jual, beli, produksi, serta konsumsi, semuanya merupakan aktivitas sosial. Masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi hajat hidup. Dengan demikian ekonomi merupakan urusan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Jelaslah bahwa ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Istilah ekonomi bermula dari konsep rumah tangga yang kemudian dijabarkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikonomia* yang berarti manajemen rumah tangga (Kishtainy dkk., 2012). Mankiw (2021) menjelaskan, setiap rumah tangga perlu mengambil keputusan mengenai tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan oleh anggotanya. Misalnya, siapa yang bekerja di kantor, belanja, memasak, dan membersihkan rumah. Dalam kehidupan bermasyarakat juga demikian, ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya membuat bangunan, menjalankan mesin pabrik, bertani, serta menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, bagaimana masyarakat dapat mengalokasikan barang dan jasa yang diproduksi tersebut kepada seluruh anggotanya. Untuk itu diperlukan sumber daya atau faktor produksi untuk diolah menjadi produk yang dapat memenuhi keinginan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan sumber daya menjadi penting.

Sumber daya diperlukan untuk diproses menjadi barang dan jasa demi pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sumber daya diasumsikan bersifat langka atau terbatas (*scarcity*), sementara keinginan manusia diasumsikan

tidak terbatas. Oleh karena itu, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana rumah tangga, perusahaan dan pemerintah mengelola sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas (Mandel, 2018; Mankiw, 2021; Ragan & Lipsey, 2011). Karena sumber daya merupakan unsur yang amat penting bagi berlangsungnya perekonomian, hal ini perlu dipahami lebih lanjut.

Dalam ilmu ekonomi, sumber daya disebut juga faktor produksi, karena digunakan untuk menghasilkan produk berupa barang maupun jasa. Disebut barang jika produk tersebut berwujud (misalnya pakaian dan makanan), sementara penyebutan jasa adalah untuk produk yang tidak berwujud (misalnya potong rambut dan pendidikan). Selanjutnya hasil produksi tersebut digunakan oleh masyarakat, yang disebut dengan konsumsi. Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dapat digolongkan empat jenis, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan (McEachern, 2012; Ragan & Lipsey, 2011).

Yang dimaksud dengan tanah adalah seluruh karunia alam seperti lahan yang subur, hutan, kolam, minyak bumi, dan barang tambang lainnya. Tenaga kerja dalam hal ini adalah seluruh potensi manusia baik secara fisik, mental, maupun berupa keterampilan. Adapun yang termasuk modal contohnya adalah perkakas, mesin, dan gedung. Sedangkan yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengkombinasikan seluruh sumber daya menjadi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar sumber daya dapat digunakan maka para pemilik sumber daya memperoleh pembayaran. Pemilik tanah memperoleh sewa, tenaga kerja mendapatkan gaji, pemilik modal mendapatkan imbalan berupa bunga, sedangkan wirausaha memperoleh laba. Seluruh jenis sumber daya tersebut penting untuk menggerakkan perekonomian.

Berhubung ketersediaan sumber daya merupakan prasyarat untuk berputarnya roda perekonomian, maka konsep

kelangkaan sumber daya merupakan tema sentral dalam ilmu ekonomi. Karena sumber daya bersifat langka, maka untuk menghasilkan produk, timbul persoalan dalam memilih produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, pemerintah menghadapi pilihan antara pembangunan infrastruktur dengan pelayanan kesehatan. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, pemerintah yang semula gencar melakukan pembangunan infrastruktur, karena keterbatasan anggaran, sekarang lebih memprioritaskan pada pembiayaan untuk pelayanan kesehatan. Contoh ini menunjukkan bahwa karena adanya kelangkaan maka timbul konsep pilihan.

Contoh lain adalah dalam ekonomi pembangunan, pemerintah menghadapi pilihan antara efisiensi dan pemerataan (Mankiw, 2021). Efisiensi artinya adalah masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas kemakmuran yang dihasilkan dari sumber daya yang terbatas. Sedangkan pemerataan bermakna bahwa kemakmuran tersebut harus dibagi-bagi kepada masyarakat secara luas. Apabila pemerintah ingin melakukan pemerataan kesejahteraan, maka pemerintah dapat mengenakan pajak kepada mereka yang berpenghasilan tinggi, kemudian uangnya dibagikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program kesehatan, pendidikan, ataupun perbaikan lingkungan. Namun pengenaan pajak ini dapat mengurangi motivasi orang untuk bekerja keras, sehingga produk yang dihasilkan dapat berkurang. Terjadilah tradeoff (tarik ulur) antara efisiensi dengan pemerataan. Jelaslah bahwa setiap pilihan akan menimbulkan biaya, yaitu hilangnya kesempatan menghasilkan pilihan alternatif. Inilah yang disebut dengan opportunity cost. Dengan demikian terdapat tiga kata kunci dalam memahami ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan, pilihan, dan opportunity cost (Ragan & Lipsey, 2011).

Ketiga kata kunci tersebut dapat dijelaskan melalui Gambar 1 mengenai batas kemungkinan produksi (production possibility frontier). Penjelasan sebagai berikut. Titik A menunjukkan bahwa apabila pemerintah membangun infrastruktur sebesar 24 unit, maka tidak ada vaksin yang dibuat. Sebaliknya pada titik D, apabila pemerintah membuat vaksin sebanyak 12 unit, tidak ada infrastruktur yang dibangun.

Namun, pemerintah dapat pula memproduksi kedua barang tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada titik B, C, maupun E. Titik E menunjukkan bahwa produksi dilakukan secara tidak optimal, karena dengan sumber daya yang ada sebetulnya masih dapat diproduksi barang yang lebih banyak, misalnya di titik B atau C. Garis kemungkinan produksi tersebut mencerminkan konsep pilihan.

Selanjutnya, mustahil bagi pemerintah memproduksi di luar batas kemungkinan produksi. Perhatikan titik F. Titik ini berada di luar batas sehingga tidak terjangkau. Artinya, tidak mungkin pemerintah membangun 16 unit infrastruktur dan memproduksi 8 unit vaksin, karena terbatasnya sumber daya. Dengan demikian garis batas ini mencerminkan konsep kelangkaan.

Adapun kemiringan garis batas produksi mencerminkan konsep opportunity cost. Perhatikan titik B dan C. Bila pemerintah meningkatkan produksi vaksin dari 4 unit ke 8 unit, maka pemerintah harus mengorbankan infrastruktur sebanyak 8 unit (16 unit dikurangi 8 unit). Sebaliknya, bila pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur dari 8 unit ke 16 unit, produksi vaksin akan turun sebanyak 4 unit (8 unit dikurangi 4 unit). Setiap pilihan mengandung konsekuensi pengorbanan.

B. Objek Studi Ekonomi

Objek studi ekonomi adalah manusia dan organisasi sosialnya (Dahis, 2018) yang berinteraksi dalam rangka mencapai kemakmuran. Sejalan dengan definisi ilmu ekonomi, maka para pelaku ekonomi yaitu individu atau rumah tangga, perusahaan dan pemerintah, merupakan objek studi ekonomi. Para pelaku ekonomi tersebut berinteraksi dalam pasar, masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi (Samuelson & Nordhaus, 2010). Rumah tangga merupakan unit ekonomi yang berperan sebagai konsumen dan pemilik sumber daya. Sebagai konsumen, rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan atau produsen. Sebagai pemilik sumber daya, rumah

tangga mendapatkan imbalan dari perusahaan atas penggunaan sumber daya yang mereka miliki. Pendapatan tersebut sebagian dikonsumsi, sebagian lagi ditabung, untuk kemudian diinvestasikan ke perusahaan. Kemudian perusahaan menggunakan sumber daya dari rumah tangga untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual di pasar. Sedangkan pemerintah memainkan tiga peran, yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi, memelihara stabilitas ekonomi, dan menjamin keadilan sosial.

Interaksi antara konsumen, produsen dan pemerintah ditujukan untuk mencapai kemakmuran. Dalam hal ini ada tiga persoalan yang harus dijawab oleh sistem ekonomi, yang berkenaan dengan what, how, dan for whom (apa, bagaimana, dan untuk siapa) (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Pertama adalah apa yang dihasilkan dan berapa jumlahnya? Masyarakat perlu menentukan jenis produk yang dihasilkan, dalam jumlah berapa, serta bagaimana kualitasnya? Apakah lebih banyak memproduksi barang konsumsi atau barang modal?

Kedua, bagaimana barang diproduksi? Siapa yang memproduksi? Sumber daya dan teknologi seperti apa yang digunakan dalam produksi? Produksi dijalankan secara padat karya atau padat modal?

Ketiga ialah siapa yang mendapatkan hasil produksi? Apakah distribusi pendapatan dan kesejahteraan dilakukan secara adil dan merata? Apakah masyarakat miskin memperoleh jaminan sosial?

Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh masyarakat dengan cara yang berbeda-beda. Pada dasarnya ada dua pandangan ekstrim yang digunakan untuk menjawab persoalan tersebut (Samuelson & Nordhaus, 2010). Pihak pertama berpandangan bahwa pemerintah membuat hampir semua keputusan ekonomi melalui komando dari pemimpin tertinggi suatu negara. Dalam hal ini pemerintah membuat keputusan-keputusan penting mengenai produksi dan distribusi, seperti yang dilakukan oleh Uni Soviet. Pemerintah memiliki dan mengelola perusahaan pada banyak industri, serta menentukan bagaimana output dihasilkan. Namun semenjak tembok Berlin

runtuh dan ekonomi Uni Soviet ambruk, hanya sedikit negara yang menganut ekonomi komando. Pandangan pertama menjadi kurang populer.

Sedangkan pihak kedua berpandangan bahwa keputusan diserahkan kepada pasar. Individu dan perusahaan secara sukarela melakukan transaksi barang dan jasa melalui pembayaran berupa uang. Pada sistem ini individu dan perusahaan swasta berperan besar dalam keputusan mengenai produksi dan konsumsi. Sistem harga, pasar, laba dan rugi, menentukan apa, bagaimana dan untuk siapa. Perusahaan menghasilkan produk yang menjanjikan keuntungan tertinggi (apa) dengan teknik produksi yang berbiaya rendah (bagaimana). Konsumsi ditentukan oleh keputusan individu dalam berbelanja berdasarkan pendapatan yang mereka terima (untuk siapa). Namun dalam praktiknya sistem ekonomi pasar juga mengalami kegagalan pasar sehingga muncullah sistem ekonomi campuran.

Kegagalan pasar adalah keadaan yang muncul ketika pasar yang tidak diatur telah menyebabkan keadaan yang tidak diinginkan (McEachern, 2012). Karena kegagalan pasar kerap terjadi, maka dalam praktiknya mekanisme pasar tidak dapat diandalkan untuk mencapai efisiensi, mengatasi ketimpangan, menangani inflasi, mengatasi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (Samuelson & Nordhaus, 2010). Misalnya dengan adanya kebebasan pasar, produsen dapat menghasilkan berbagai macam barang dalam jumlah besar, namun mencemari lingkungan dan menyebabkan terganggunya kesehatan. Atau, berlakunya persaingan bebas telah mengakibatkan gulung tikarnya para pedagang kecil karena tidak mampu berhadapan dengan pedagang yang bermodal besar. Oleh karenanya, untuk pemerataan kemakmuran, mekanisme pasar yang sehat perlu tetap terjaga; namun di sisi lain pengaturan oleh pemerintah juga diperlukan. Dewasa ini, umumnya berbagai negara menganut sistem ekonomi campuran yang mengandung unsur komando dan pasar (Ragan & Lipsey, 2011; Samuelson & Nordhaus, 2010).

Dengan demikian fokus kajian ekonomi yang pertama adalah rumah tangga, perusahaan dan pemerintah, sedangkan yang kedua adalah isu-isu pembangunan seperti inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi (Jahja & Riwayat, 2006; Samuelson & Nordhaus, 2010). Yang pertama disebut ekonomi mikro dan yang kedua disebut ekonomi makro. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

C. Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi

Ekonomi terbagi dua jenis, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dalam ekonomi mikro, dipelajari perilaku para pelaku ekonomi secara rinci, sedangkan pada ekonomi makro kinerja perekonomian secara menyeluruh yang dikaji (McEachern, 2012; Samuelson & Nordhaus, 2010). Sebab, ekonomi secara agregat (keseluruhan) berasal dari keputusan-keputusan dari jutaan individu sehingga tidak mungkin memahami perkembangan ekonomi makro tanpa memperhitungkan keputusan-keputusan pada tingkat ekonomi mikro (Mankiw, 2009). Keduanya bukanlah subjek yang terpisah, melainkan dua cara pandang terhadap semua persoalan ekonomi yang satu sama lain saling melengkapi (Greenlaw & Shapiro, 2018).

Topik-topik yang dibahas pada ekonomi mikro dan makro umumnya adalah sebagai berikut (Case, Fair, & Oster, 2012; McEachern, 2012; Ragan & Lipsey, 2011; Samuelson & Nordhaus, 2010).

Ekonomi mikro: Perilaku konsumen, permintaan, teori biaya, penawaran, harga, pasar output, pasar input, kegagalan pasar, dan kebijakan publik.

Ekonomi makro: Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, keuangan internasional, perdagangan internasional, serta ekonomi pembangunan.

Berikut ini contoh-contoh penjelasan mengenai ruang lingkup ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro berkaitan dengan pendapatan rumah tangga, ekonomi makro berurusan dengan pendapatan nasional. Ekonomi mikro memusatkan perhatian pada harga suatu barang atau jasa, ekonomi makro memperhatikan tingkat harga secara keseluruhan dalam suatu

negara, apakah naik atau turun. Ekonomi mikro mengkaji jumlah orang yang akan bekerja atau berhenti bekerja pada suatu industri di daerah tertentu, ekonomi makro berurusan dengan tingkat pengangguran dan kesempatan kerja secara nasional. Tabel 1 menerangkan kedua perspektif tersebut.

Tabel 1. Contoh-contoh Pembahasan pada Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Topik	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
Pendapatan	Pendapatan seseorang atau perusahaan <i>Upah minimum regional</i> <i>Gaji eksekutif</i> <i>Pendapatan supir ojek</i>	Pendapatan nasional <i>Jumlah gaji dan upah</i> <i>Jumlah laba perusahaan</i> <i>Kesenjangan pendapatan</i>
Output	Produksi dari perorangan, perusahaan, atau industri <i>Jumlah ruang kantor yang dibangun</i> <i>Berapa banyak beras yang dihasilkan</i> <i>Produksi perabotan rumah tangga</i>	Produksi secara keseluruhan dalam perekonomian nasional <i>Jumlah output industri secara nasional</i> <i>Produk domestik bruto</i> <i>Pertumbuhan output nasional</i>
Kesempatan Kerja	Kesempatan kerja yang diberikan oleh perusahaan ataupun industri <i>Jumlah pekerja di perusahaan</i> <i>Lowongan kerja di industri</i> <i>Jumlah tenaga kesehatan</i>	Kesempatan kerja dan pengangguran pada perekonomian nasional <i>Tingkat pengangguran</i> <i>Angkatan kerja</i> <i>Kesempatan kerja</i>
Harga	Harga suatu barang atau jasa <i>Tarif angkutan</i> <i>Harga bahan pangan</i> <i>Sewa rumah</i>	Kombinasi harga-harga dari seluruh barang dan jasa dalam perekonomian <i>Indeks harga konsumen</i> <i>Indeks harga produsen</i> <i>Tingkat inflasi</i>

Sumber: Case et al. (2012); Mateer dan Coppock (2018)

D. Tujuan dan Manfaat Ekonomi

Teori ekonomi menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang didasarkan atas apa yang ingin dicapai. Perumusan tujuan ekonomi oleh suatu negara tidak terlepas dari penilaian mengenai kondisi yang sedang dialami, apa saja yang harus diperbaiki, serta bagaimana caranya. Berbagai tujuan ekonomi yang dapat ditetapkan oleh suatu negara adalah sebagai berikut (Case et al., 2012; Stanford, 2008).

1. Efisiensi

Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah efisiensi alokatif. Ekonomi yang efisien adalah ekonomi yang menghasilkan produk yang diinginkan oleh masyarakat dengan biaya serendah mungkin. Bila sistem ekonomi mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak diinginkan oleh masyarakat, maka yang

terjadi adalah inefisiensi. Umpamanya seluruh anggota masyarakat adalah vegetarian, namun sumber daya ekonomi digunakan untuk memproduksi daging, ini berarti ekonominya tidak efisien. Contoh lain adalah, apabila suatu perusahaan beroperasi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Adapun contoh sebaliknya yaitu, apabila suatu perusahaan menerapkan teknologi baru yang dapat menghasilkan produk lebih banyak namun dengan mutu yang juga meningkat. Keadaan ini disebut efisien. Pemerintah berkewajiban menyusun kebijakan yang memastikan efisiensi ekonomi.

2. Keadilan

Keadilan dimaknai sebagai terdistribusinya pendapatan dan kekayaan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin. Artinya adalah bahwa kebijakan ekonomi harus mempersempit jarak antara kaya dan miskin. Untuk itu, kepada yang tidak mampu, negara memberikan berupa bantuan sosial kepada masyarakat. Pengusaha golongan ekonomi lemah diberikan fasilitas berupa akses permodalan dan pelatihan keterampilan usaha. Ini berarti bahwa orientasi pembangunan diarahkan pada upaya untuk membantu kelompok yang lemah sehingga mereka memiliki kesempatan untuk maju dan menikmati kue pembangunan.

3. Kemakmuran

Untuk mencapai kemakmuran diperlukan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah output dari suatu perekonomian. Bila pertumbuhan output lebih besar dari populasi, maka output per kapita akan meningkat, demikian pula standar kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi harus memastikan bahwa produksi barang dan jasa dapat memberikan kemakmuran sehingga keinginan masyarakat dapat terpenuhi. Namun dalam hal ini kemakmuran tidak hanya dipahami semata-mata sebagai banyaknya produksi barang dan jasa. Kemakmuran dapat diartikan lebih luas, yaitu kehidupan yang seimbang antara konsumsi privat, layanan publik, dan waktu luang untuk menikmati kehidupan.

Dengan demikian tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan bukan semata-mata meningkatkan output secara materi, namun hal-hal yang tak berwujudpun harus diperhatikan secara seimbang.

4. Stabilitas

Masyarakat menginginkan agar kondisi ekonomi stabil, tidak terjadi gejolak. Stabilitas ekonomi artinya adalah pertumbuhan ekonomi yang ajek dengan angka inflasi yang rendah serta penggunaan sumber daya secara penuh. Pemerintah perlu memastikan agar pertumbuhan ekonomi tidak melambat, atau bahkan negatif. Sebab, hal ini akan mengakibatkan orang kehilangan pekerjaan sehingga pendapatan mereka menurun. Bukan hanya itu, pelambatan ekonomi juga berdampak pada kekhawatiran dan ketakutan pada masyarakat. Dengan demikian pengendalian terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi menjadi penting.

5. Inovasi

Kemajuan ekonomi membuat orang berpikir terus menerus agar dapat bekerja secara lebih produktif. Inovasi merupakan pengembangan dan penerapan cara-cara baru dalam memproduksi barang dan jasa secara efisien. Misalnya melalui penemuan mesin produksi yang memungkinkan produksi massal, atau penggunaan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan penjualan produk. Ekonomi harus diatur sehingga mendorong perilaku inovatif. Misalnya dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan untuk produk-produk inovatif.

6. Pilihan

Setiap orang memiliki preferensi masing-masing, berdasarkan harapan dan mimpinya. Setiap orang membuat keputusan-keputusan ekonomi, misalnya dalam memilih pekerjaan, tempat tinggal, ataupun memilih makanan. Keputusan-keputusan tersebut sejalan dengan preferensi

masing-masing. Kebebasan untuk memilih ini, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, merupakan tujuan ekonomi yang penting.

7. Keberlanjutan

Kehidupan manusia tergantung pada lingkungan alam. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang penting dalam menghasilkan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Namun eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak buruk bagi kehidupan. Akibatnya terjadilah bencana seperti banjir, polusi udara, dan polusi air. Hal ini disamping memperburuk kualitas kehidupan juga mengurangi kemampuan untuk berproduksi dalam jangka panjang. Dengan demikian isu kelestarian lingkungan menjadi penting untuk diperhatikan. Kebijakan ekonomi harus memperhatikan persoalan ini demi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

8. Demokrasi dan akuntabilitas

Ekonomi dipengaruhi oleh proses sosial. Dalam konteks ini anggota masyarakat memainkan perannya masing-masing dalam rangka memenuhi keinginan mereka. Dalam kehidupan sosial ada orang yang memiliki kekuasaan yang besar dalam pengambilan keputusan, ada yang tidak. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kita memastikan bahwa keputusan-keputusan ekonomi betul-betul mencerminkan keinginan kolektif masyarakat? Dalam iklim demokrasi, warga negara dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi pemerintah melalui para wakilnya di parlemen. Namun, pemerintah maupun anggota parlemen dapat terpilih disamping karena dukungan masyarakat, juga karena dukungan dari para pengusaha dan penanam modal. Dengan demikian mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) para pengambil keputusan dalam sistem demokrasi perlu diatur agar betul-betul berpihak kepada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Setelah memahami tujuan-tujuan ekonomi, perlu dipahami pula manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Case dkk. (2012) menyebutkan empat manfaat, yaitu membentuk pola

pikir yang rasional, memahami kehidupan masyarakat, memahami masalah-masalah global, serta menjadi warga yang berpengetahuan (*informed citizen*). Yang pertama adalah membentuk pola pikir yang rasional. Dalam ekonomi dikenal konsep kelangkaan, pilihan, dan *opportunity cost*. Dalam hidup ini orang membuat berbagai keputusan yang artinya membuat pilihan dengan keterbatasan yang ada. Setiap pilihan memiliki konsekuensi pengorbanan atas pilihan yang lain. Misalnya, individu memutuskan apakah ingin bekerja atau kuliah lagi, pengusaha memutuskan mengenai apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, di mana lokasinya, dan berapa harga produknya. Untuk itu semua perlu analisis ekonomi.

Kedua adalah memahami realitas kehidupan masyarakat secara lebih baik. Kehidupan sosial yang kita alami dewasa ini tidak lepas dari keputusan-keputusan ekonomi dari para pelaku ekonomi. Contohnya, jika seseorang pergi ke tempat kerja mencari nafkah, ia dapat pergi dengan naik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Dalam perjalanan ia melihat gedung-gedung perkantoran, pusat belanja, pabrik-pabrik, truk-truk pengangkut bahan makanan maupun bahan bakar minyak, bus yang mengangkut para penumpang, serta ojek daring yang banyak jumlahnya. Nampak pula orang bertransaksi baik dengan uang maupun secara elektronik. Semua yang dilihat itu merupakan realitas sosial yang terbentuk dari berbagai ragam keputusan ekonomi dari individu, perusahaan dan pemerintah.

Ketiga adalah memahami masalah-masalah global. Misalnya peristiwa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang tertular, sakit dan meninggal. Untuk mengatasi hal tersebut, semua negara membatasi mobilitas penduduk. Akibatnya orang Indonesia sulit untuk ke luar negeri, dan sebaliknya, orang asing pun sukar masuk ke Indonesia. Mobilitas dalam negeri juga diperketat, mengakibatkan orang mengalami kesulitan melakukan jual dan beli. Akibatnya pendapatan perusahaan banyak berkurang

sehingga angka pengangguran meningkat. Pandemi merupakan isu global yang berdampak kepada kesejahteraan ekonomi. Fenomena ini dapat dipahami dengan penjelasan dari sudut pandang ilmu ekonomi.

Keempat adalah menjadi warga negara yang berpengetahuan. Pengetahuan mengenai ekonomi akan membuat seseorang memahami fenomena melalui berita-berita yang terkait dengan persoalan ekonomi. Misalnya dalam menghadapi pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan anggaran belanja kesehatan, menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, melakukan insentif pengurangan pajak ataupun keringanan kredit kepada para pengusaha agar ekonomi dapat tumbuh lagi. Dalam kasus ini nampak dinamika interaksi antara rumah tangga, pengusaha dan pemerintah, yang dapat dipahami berdasarkan pengetahuan tentang ilmu ekonomi.

5. KONSEP DASAR ANTROPOLOGI

A. Pengertian Antropologi

Istilah “antropologi” berasal dari bahasa Yunani asal kata “anthropos” berarti “manusia”, dan “logos” berarti “ilmu”, dengan demikian secara harfiah “antropologi” berarti ilmu tentang manusia. Para ahli antropologi (antropolog) sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia (Haviland, 1999: 7; Koentjaraningrat, 1987: 1-2). Jadi antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya.

Sebelum Anda mempelajari lebih jauh tentang antropologi maka Anda terlebih dulu harus mengetahui pengertian dari antropologi. Nah, sekarang kita mulai dengan arti dari kata “Antropologi”.

Antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari makhluk manusia (anthropos). Secara etimologi, antropologi

berasal dari kata *anthropos* berarti manusia dan *logos* berarti ilmu. Dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaannya. Antropologi sering pula disebut sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaannya.

Antropologi mulai banyak dikenal orang sebagai sebuah ilmu setelah diselenggarakannya simposium pada tahun 1951 yang dihadiri oleh lebih dari 60 tokoh antropologi dari negara-negara di kawasan Ero-Amerika (hadir pula beberapa tokoh dari Uni Soviet). Simposium yang dikenal dengan sebutan *International Symposium on Anthropology* ini telah menjadi lembaran baru bagi antropologi, terutama terkait dengan publikasi beberapa hasil karya antropologi, seperti buku yang berjudul “*Anthropology Today*” yang di redaksi oleh A.R. Kroeber (1953), “*An Appraisal of Anthropology Today*” yang di redaksi oleh S. Tax, dkk. (1954), “*Yearbook of Anthropology*” yang diredaksi oleh W.L. Thomas Jr. (1955), dan “*Current Anthropology*” yang di redaksi oleh W.L. Thomas Jr. (1956). Setelah simposium ini, antropologi mulai berkembang di berbagai negara dengan berbagai tujuan penggunaannya. Di beberapa negara berkembang pemikiran-pemikiran antropologi mengarah pada kebutuhan pengembangan teoritis, sedangkan di wilayah yang lain antropologi berkembang dalam tataran fungsi praktisnya.

Pengertian lainnya disampaikan oleh Harsojo dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Antropologi*” (1984). Menurut Harsojo, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Menurutnya, perhatian antropologi tertuju pada sifat khusus badani dan cara produksi, tradisi serta nilai-nilai yang akan membedakan cara pergaulan hidup yang satu dengan pergaulan hidup yang lainnya.

Sementara itu Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Antropologi I*” (1996) menjelaskan bahwa secara akademis, antropologi adalah sebuah ilmu tentang

manusia pada umumnya dengan titik fokus kajian pada bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaan manusia. Sedangkan secara praktis, antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam beragam masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut.

Secara awam sering kali dipahami bahwa bidang kajian dari antropologi adalah masyarakat “primitif”, yang dianggap mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat Eropa. Pemahaman seperti ini tentu saja tidak benar, karena sejauh ini bidang kajian antropologi telah berkembang jauh memasuki wilayah masyarakat modern.

Di lain pihak Masinambow, ed. dalam bukunya yang berjudul “Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia” (1997) menjelaskan bahwa antropologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji masyarakat atau kelompok manusia.

Conrad Philip Kottak dalam bukunya berjudul “Anthropology, the Exploration of Human Diversity” (1991) menjelaskan bahwa antropologi mempunyai perspektif yang luas, tidak seperti cara pandang orang pada umumnya, yang menganggap antropologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat nonindustri. Menurut Kottak, antropologi merupakan studi terhadap semua masyarakat, dari masyarakat yang primitif (ancient) hingga masyarakat modern, dari masyarakat sederhana hingga masyarakat yang kompleks. Bahkan antropologi merupakan studi lintas budaya (komparatif) yang membandingkan kebudayaan satu masyarakat dengan kebudayaan masyarakat lainnya.

B. Ruang Lingkup Antropologi

Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi dan lain-lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora, karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaannya. Seperti halnya yang terjadi di Universitas Indonesia, di mana pada masa awal terbentuknya Jurusan Antropologi ini berada di bawah Fakultas Sastra. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ketika muncul anggapan bahwa antropologi

cenderung memiliki fokus pada masalah sosial dari keberadaan manusia, maka jurusan antropologi ini pun pada tahun 1983 pindah di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini beberapa universitas di Indonesia mempunyai Jurusan Antropologi, di antaranya adalah di Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Andalas (Unand), Universitas Cendrawasih (Uncen), dan Universitas Udayana (Unud).

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa, secara umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya, namun demikian, di beberapa tempat, negara, dan universitas, antropologi sebagai ilmu mempunyai penekanan-penekanan tertentu sesuai dengan karakteristik antropologi itu sendiri dan perkembangan masyarakat di tempat, negara, dan universitas tersebut. Seperti yang pernah diungkapkan Koentjaraningrat bahwa ruang lingkup dan dasar antropologi belum mencapai kematapan dan bentuk umum yang seragam di semua pusat ilmiah di dunia. Menurutnya, cara terbaik untuk mencapai pengertian akan hal itu adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi pangkal dari antropologi, dan bagaimana garis besar proses perkembangan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu pangkal tadi, serta mempelajari bagaimana penerapannya di beberapa negara yang berbeda.

Adapun yang menjadi ruang lingkup kajian mata kuliah Antropologi Sosial Budaya adalah realitas dan dinamika kehidupan sosial budaya umat manusia. Dalam kaitan itu akan dilihat kecenderungan pola-pola yang hidup dan berkembang pada berbagai masyarakat dalam rentang waktu tertentu.

Setelah mendudukan konsep dasar dan perkembangan studi Antropologi Sosial Budaya, selanjutnya secara berurutan akan dibahas: dinamika adaptasi manusia dan lingkungannya; membahas masyarakat hortikultural dan pastoralis; membandingkan masyarakat petani dan pastoralis, termasuk pandangan dunia keduanya; dinamika masyarakat

agraris dan non-agrais menjadi masyarakat perkotaan; mencermati keberadaan manusia sebagai homo-economicus dalam kaitannya dengan telaahan sumber daya ekonomi, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi dalam konteks sosiokultural masyarakat yang sedang berubah; mengkaji konsep dasar dan dinamika perkawinan, keluarga, rumah tangga, dan kekerabatan; serta, kajian tentang konsep dan bentuk-bentuk komunitas kecil, solidaritas sosial, diferensiasi dan stratifikasi, serta pengendalian sosial dengan segala kosekuensinya.

C. Konsep Dasar Antropologi

Sebagaimana diungkapkan Koentjaraningrat bahwa kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi pangkal dari antropologi dan bagaimana garis besar proses perkembangannya yang mengintegrasikan ilmu-ilmu pangkal tersebut, maka pada bahasan berikut akan diuraikan perkembangan antropologi. Dari bahasan ini Anda akan bisa melihat bahwa perkembangan antropologi terkait erat dengan dinamika masyarakat.

Adapun yang merupakan contoh konsep-konsep antropologi, diantaranya:

1. Kebudayaan

Istilah culture (kebudayaan) berasal dari bahas latin, yakni cultura dari kata dasar colere yang berarti berkembang tumbuh. Namun, secara umum pengertian kebudayaan mengacu kepada kumpulan pengetahuan yang secara social diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maksud itu kontras dengan pengertian kebudayaan sehari-hari yang hanya merujuk kepada bagian-bagian tertentu warisan social, yakni tradisi sopan santun dan kesenian (D'Andrade, 1995:1999).

Tentu saja definisi di atas hanya sedikit memuaskan bagi para antropolog, sebab begitu beragamnya definisi kebudayaan sempat mencemaskan makin dalamnya perpecahan dan menimbulkan kemerosotan efektivitas disiplin ilmu (Saifuddin, 2005: 83). Sebagai contoh Kroeber dan Kluckhohn dalam *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions* (1952) bahwa ternyata pada tahun itu ada 160 definisi kebudayaan. Hal itu pula yang

dirasakan antropolog Roger M. Keesing dalam *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*. mengamati bahwa "tantangan bagi antropolog dalam tahun-tahun terakhir adalah dipersempitnya "kebudayaan" sehingga konsep ini mencakup lebih sedikit tetapi menggambarkan lebih banyak" (1984: 73).

Selanjutnya Keesing mengidentifikasi empat pendekatan terakhir terhadap masalah kebudayaan. Pendekatan pertama, yang memandang kebudayaan sebagai sistem adaptif dari keyakinan perilaku yang fungsi primernya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Pendekatan ini dikaitkan dengan ekologi budaya dan materialisme kebudayaan, serta bisa ditemukan dalam kajian antropolog Julian Steward (1955), Leslie White (1949; 1959), dan Marvin Harris (1968; 1979). Pendekatan kedua, yang memandang bahwa kebudayaan sebagai sistem kognitif yang tersusun dari apapun yang diketahui dalam berpikir menurut cara tertentu, yang dapat diterima bagi warga kekebudayaannya. Pendekatan tersebut memiliki banyak nama dan diasosiasikan dengan; etnosains, antropologi kognitif, atau etnografi baru. Para tokoh kelompok ini adalah Harold Conklin (1955), Ward Goodenough (1956; 1964), dan Charles O. Frake (1964, 1963; 1969).

Pendekatan ketiga, yang memandang kebudayaan sebagai sistem struktur dari simbol- simbol yang dimiliki bersama yang memiliki analogi dengan struktur pemikiran manusia. Tokoh-tokoh antropolognya adalah kelompok strukturalisme yang dikonsepsikan oleh Claude Levi-Strauss (1963; 1969). Sedangkan pendekatan keempat, adalah yang memandang kebudayaan sebagai sistem simbol yang terdiri atas simbol-simbol dan makna-makna yang dimiliki bersama, yang dapat diidentifikasi, dan bersifat publik. Pendekatan tersebut tokoh antropolognya adalah Clifford Geertz (1973; 1983) dan David Schneider (1968).

2. Evolusi

Secara sederhana, konsep evolusi mengacu pada sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Walaupun istilah tersebut merupakan istilah umum yang dapat dipakai dalam berbagai bidang studi (McHenry, 2000: 453). Dalam pandangan para antropologi, istilah evolusi yang merupakan gagasan bahwa bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari suatu bentuk ke bentuk lain melalui mata rantai transformasi dan modifikasi yang tidak pernah putus asa, pada umumnya diterima sebagai awal landasan berfikir mereka. Konsep evolusi yang sering digandengkan dengan pengertian perubahan secara perlahan-lahan tapi pasti, memang diawali dengan karya Charles Darwin dalam bukunya yang terkenal *Origin of Species* (1859). Sebenarnya, gagasan ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya diperkirakan sudah sejak zaman Yunani kuno, sejumlah pemikir pada masa itu telah membuat postulat yang serupa atau mendekati pengertian asal usul kehidupan yang evolusioner. Banyak pelopor sebelum Darwin, termasuk kakeknya sendiri, mengakui adanya keragaman dan diversitas kehidupan dengan mengajukan hipotesis tentang modifikasi evolusioner.

Gagasan tentang evolusi melalui seleksi alam merupakan gagasan utama Darwin dalam bukunya tersebut. Darwin dianggap telah mencapai pemahaman yang koheren, meskipun tidak lengkap karena dia tidak tahu tentang proses hereditas atau pewarisan karakter yang kemudian ditemukan Gregor Mendel (Dobzhansky, 1962; Huxley, 1942). Pengaruhnya begitu luas, bukan hanya di bidang biologi saja, tetapi melebar ke bidang-bidang sosial budaya. Oleh karena itu, terminologi evolusi tidak berhenti dalam bidang biologi, tetapi merambah ke bidang lain sehingga di kenal istilah-istilah dan teori-teori, seperti teori evolusi keluarga, evolusi agama, dan evolusi sosial budaya. Untuk nama yang terakhir, sering overlap dengan darwinisme sosial, di mana Herbert Spencer merupakan sumber pertama yang memunculkan jargon *the survival of*

the fittest (daya tahan dari jenis atau individu yang memiliki cirri-ciri paling cocok dengan lingkungannya), sebagaimana tertung dalam karyanya *Principle of Sociology*.

3. Culture area (Daerah Budaya)

Suatu daerah budaya (culture area) adalah suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah cirri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya (Banks, 1977: 274). Menurut definisi di atas, suatu daerah kebudayaan pada mulanya berkaitan dengan pertumbuhan kebudayaan yang menyebabkan timbulnya unsur-unsur baru yang akan mendesak unsur-unsur lama ke arah pinggir, sekeliling daerah pusat pertumbuhan tersebut.

4. Enkulturas

Konsep enkulturas mengacu kepada suatu proses pembelajaran kebudayaan (Soekanto, 1993:167). Dengan demikian, pada hakikatnya setiap orang sejak kecil sampai tua, melakukan proses enkulturas, mengingat manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan untuk berfikir dan bernalar sangat memungkinkan untuk setiap waktu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Beberapa tokoh peneliti psikologi perkembangan telah mempublikasikan hasil risetnya yang mengagumkan.

Dalam aspek kemampuan berpikir (perkembangan kognitif) Jean Piaget (1967; 1970) memberikan kerangka kerja untuk melakukan analisis terhadap aktivitas berpikir anak. Menurutnya, secara rinci terdapat empat tahapan perkembangan kognitif, yaitu :

- a. Periode sensori motor, yakni sejak lahir sampai usia 1,5-2 tahun, mereka memiliki kemampuan meraihirai dan menggenggam;
- b. Periode praoperasi, yakni usia 2-3 sampai 7-8 tahun, mereka mulai mampu berfikir secara logis, perkembangan bahasa sangat cepat, dan banyak melakukan monolog;

- c. Periode operasi konkret, yakni usia 7-8 sampai 12-14 tahun, memiliki kemampuan untuk melihat pandangan orang lain, ikut dalam permainan kelompok yang menaati peraturan, dan mampu membedakan satuan yang berbeda, seperti meter dan kilogram;
- d. Periode operasi formal, yakni usia di atas 14 tahun, mampu membuat rencana masa depan dan memulai peranan orang dewasa, selain itu anak dapat bernalar dari situasi rekaan ke situasi nyata.

5. Difusi

Difusi adalah proses penyebaran unsure-unsur kebudayaan secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu timbul (Soekanto, 1993: 150). Dalam proses difusi ini erat kaitannya dengan konsep inovasi (pembaharuan).

Menurut Everett M. Rogers dalam karyanya *Diffusion of Innovation* (1983), cepat tidaknya suatu proses difusi sangat erat hubungannya dengan empat elemen pokok, yaitu (a) sifat inovasi; (b) komunikasi dengan saluran tertentu; (c) waktu yang tersedia; (d) sistem sosial warga masyarakat.

6. Akulturasi

Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun saling memengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya sehingga unsure-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri (Koenjtaraningrat, 1990: 91). Proses akulturasi sangat penting dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial maupun studi sosial, mengingat sebagaimana dijelaskan R. Linton (1984: 357-360) bahwa percepatan budaya inti (*covert culture*) dengan budaya lahiriah (*overt culture*) adalah berbeda.

7. Etnosentrisme

Tiap-tiap kelompok cenderung untuk berfikir bahwa kebudayaan dirinya itu adalah superior (lebih baik dan lebih segalanya) dari pada semua budaya yang lain.

Inilah yang disebut dengan etnosentrisme. Seorang ahli komunikasi intercultural Fred E. Jandt dalam karyanya *Intercultural Communication: An Introduction* (1998: 52) mengemukakan etnosentrisme merupakan sikap ... negatively judging aspects of another culture by the standards of one's own culture.'... secara negatif menilai aspek budaya orang lain oleh standar kultur diri sendiri'. Oleh karenanya, Jandt dalam penjelasan selanjutnya mengemukakan bahwa etnosentrisme merupakan penghambat ketiga dalam keterampilan komunikasi intercultural setelah kecemasan dan mengumpamakan persamaan sebagai perbedaan.

Tercapainya keterampilan komunikasi intercultural yang optimal menjadi penting, baik ditingkat local, nasional, maupun global. Pada tingkat local dan nasional, pembelajaran pengembangan keterampilan komunikasi intercultural dapat meningkatkan rasa saling menghargai, rasa memiliki, dan solidaritas yang pada gilirannya mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan pada level global atau internasional dapat memupuk kepedulian antarwarga dunia, meningkatkan rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan dalam kesamaan dan kesetaraan (Supardan, 2004:84-86).

8. Tradisi

Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan secara turun-temurun (Soekanto, 1993: 520). Para siswa perlu mempelajari tradisi sebab tidak sedikit dalam kajian tradisi mengandung nilai-nilai keluhuran budi yang tinggi dan sering tidak tersentuh oleh agama maupun budaya global. Kita dapat belajar dari pengembangan nilai-nilai tradisional Jepang sebagai bagian

integral keberhasilan restorasi meiji dan modernisasinya sehingga Jepang menjadi Negara industri pertama dan termaju di Asia sejak abad ke-19 (Clyde, 1958:223-225).

Namun sebaliknya, tradisi tidak terlalu berpihak kepada nilai kebaikan bahkan bertentangan dengan nilai hak asasi manusia secara universal. Pertunjukan gladiator yang mempertontonkan kekuatan dan kekejian seorang pembunuh di depan raja dan golongan bangsawan Romawi abad pertengahan, upacara satti yang merupakan pembakaran janda di India yang pernah hidup pada masa India klasik, menunjukkan betapa hal itu merendahkan nilai-nilai kemanusiaan hingga nyawa manusia menjadi ajang permainan belaka. Oleh karena itu, dengan mempelajari tradisi, siswa dapat reflektif, belajar berfikir kritis, dan kreatif. Mempertanyakan hakikat nilai-nilai kebenaran, abaik pada masanya maupun relevansinya dengan kekinian.

9. Ras dan etnik

Suatu ras adalah sekelompok orang yang memiliki sejumlah ciri biologi (fisik) tertentu atau suatu populasi yang memiliki suatu kesamaan dalam sejumlah unsure biologis atau fisik khas yang disebabkan oleh faktor hereditas atau keturunan (Oliver, 1964: 153) Sedangkan etnik menurut Marger (1985: 7) ... are groups within a larger society that display a unique set of culture traits. Jadi, dalam kajian etnik lebih menekankan sebagai kelompok sosial bagian dari ras yang memiliki ciri-ciri budaya yang sifatnya unik. Bangsa Indonesia memiliki sejumlah etnik yang jumlahnya hampir 500 etnik, tersebar dari Sabang sampai Merauke.

10. Stereotip

Stereotip (stereotype) adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu stereos yang berarti solid dan tupos yang berarti citra atau kesan. Suatu stereotip mulanya adalah suatu rencana cetakan yang begitu terbentuk sulit diubah. Oleh Walter Lippman, orang pertama yang mengartikulasikan teori cognitive miser dalam bukunya *Public Opinion* (1922), kata ini diadaptasi untuk

penggunaanya yang sekarang, biasanya didefinisikan sebagai generalisasi yang relative tetap mengenai kelompok atau kelas manusia yang menjurus ke hal-hal negatif ataupun tidak menguntungkan, meskipun beberapa penulis juga memasukan konsep stereotip positif.

Lippman (1922) mengemukakan bahwa stereotip merupakan fungsi penting dari penyederhanaan kognitif yang berguna untuk mengelola realitasekonomi, di mana tanpa penyederhanaan maka realitas tersebut menjadi sangat kompleks.

Di Indonesia, stereotip pun demikian berkembang terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat yang relative berpendidikan rendah. Beberapa etnis tertentu sering mendapat label yang menyudutkan, seperti “Cina Licik”, “Jawa Koek”, “Padang Bengkok”, “Bapak si tukang copet”, dan sebagainya (Supardan, 2004: 63-70). Wajar jika menurut Fred E. Jandt dalam bukunya *Intercultural Communication: An Introduction* mengemukakan bahwa stereotype dan prejudice merupakan penghambat terjadinya komunikasi antarbudaya yang bermakna di tengah budaya yang berbeda, di samping fakto-faktor kecemasan dan etnosentrisme (Jandt, 1998: 70-74).

11. Keekerabatan

Istilah keekerabatan atau kinship menurut antropolog Robin Fox dalam karyanya *Kinship and Marriage* (1969) merupakan konsep inti dalam antropologi. Konsep keekerabatan tersebut merujuk kepada tipologi klasifikasi kerabat (kin) menurut penduduk tertentu berdasarkan aturan- aturan keturunan (descent) dan aturan-aturan perkawinan. Satu tesis yang umum diterima oleh kebanyakan antropologi bahwa dalam komunitas purba, unit dan ikatan domestic didasarkan pada kelompok-kelompok keturunan unilineal, keturunan ditelusuri pada garis laki-laki (patrilineal) maupun pada garis perempuan

(matrilineal). Namun akhirnya pada awal abad ke-20, pendapat tersebut ditolak (Kuper, 2000: 533). Menurut Malinowski, keluarga adalah suatu institusi domestic, bergantung pada afeksi, dan bertujuan membesarkan anak. Korporasi keturunan adalah institusi public dan politis yang memiliki suatu peran dalam urusan komunitas dan pengaturan hak-hak kepemilikan (property rights). Kaan tetapi, Malinowski pun mengatakan bahwa kelompok keturunan dibangun di atas sentimen-sentimen solidaritas yang tercipta dalam keluarga domestic (Malinowski, 1929). Kemudian, Radcliffe-Brown berpandangan bahwa system kekerabatan yang lebih luas dibangun di atas fondasi keluarga, namun bila keluarga secara universal bersifat bilateral – ikatan ibu dan ayah – kebanyakan masyarakat lebih menyukai satu sisi dalam keluarga untuk tujuan-tujuan public. Sebab fungsi utama keturunan adalah untuk meregulasi transmisi kepemilikan dan hak masyarakat dari generasi ke generasi (Kupper, 1992).

12. Magis

Konsep magis menurut seorang pendiri antropologi di Inggris E.B. Tylor dalam *Primitive Culture* (1871) merupakan ilmu pseudo dan salah satu khayalan paling merusak yang pernah menggerogoti umat manusia. Kemudian, dari antropolog J.G. Frazer dalam karyanya *Golden Bough* (1890), mengemukakan bahwa magis adalah penerapan yang salah pada dunia materiil dari hukum pikiran dengan maksud untuk mendukung system palsu dari hukum alam.

Penegasan di atas tidak member penjelasan yang memadai, terutama Tylor yang menyoroti dari sisi negatifnya karena ia hanya melihat dari sisi efek yang ditimbulkannya. Namun demikian, Tylor pun mengemukakan bahwa sebagai ‘ilmu pseudo’ – suatu istilah yang pertama kali dipopulerkannya- dapat diringkas menjadi dua prinsip dasa. Pertama, kemiripan menghasilkan kemiripan. Kedua, segala sesuatu atau benda yang pernah dihubungkan akan terus saling berhubungan dalam jarak tertentu. Dua prinsip ini menghasilkan magis homeopathic

atau imitative dan magis sympathetic karena keduanya mengasumsikan bahwa segala benda akan saling berhubungan satu sama lain dalam jarak tertentu melalui suatu simpati rahasia, impuls ditransmisikan dari satu pihak ke pihak lain lewat sarana yang kita sebut sebagai zat tidak terlihat (Tylor, 1871; Frazer, 1932).

13. Tabu

Istilah tabu berasal dari bahasa polinesia yang berarti terlarang. Secara apa yang dikatakan terlarang adalah persentuhan antara hal-hal duniawi dan hal-hal yang keramat, termasuk suci (misalnya persentuhan dengan ketua suku).

14. Perkawinan.

Agak sulit untuk mendefinisikan perkawinan, karena setiap istilah perkawinan tersebut memiliki banyak bentuk dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya masing-masing. Namun, secara umum konsep perkawinan tersebut mengacu kepada proses formal pemaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis (walaupun kaum lesbi pun terjadi, namun itu bagian kasus) yang dilakukan secara seremonial-simbolis dan makin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam memulai hidup baru dalam berpasangan. Walaupun sebagaimana sering dikemukakan oleh aktivis kaum feminis, perkawinan selalu ditandai dengan pembagian kerja yang tegas dan distribusi sumber daya yang tidak adil. Dalam pandangan ini, perkawinan mencerminkan ketidaksederajatan yang ada di luar arena domestik (Allan, 2000: 611).

Pada sebagian besar tradisi, perkawinan juga merupakan proses institusi sosial sebagai wadah reproduksi dan mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, kecenderungan umum dari perkawinan, dengan adanya kelahiran anak-anak mendorong ikatan yang lebih erat dalam pembagian kerja (Mansfield dan Collard, 1988), sekaligus sebagai konsekuensi negatif dalam partisipasi sosial dan

ekonomi bagi wanita. Walaupun tidak mudah untuk memperoleh data yang memadai, bukti dari berbagai Negara mengindikasikan bahwa pria secara rutin memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam belanja individu dibanding dengan pasangan wanitanya. Pria pun memiliki kuasa yang lebih besar dalam menangani keputusan-keputusan besar dan memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas waktu luang mereka (Allan, 2000: 612).

D. Hubungan Antropologi Dengan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya
Mengenai hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, Koentjaraningrat (1981:35-41) mengemukakan sebagai berikut.

1. Hubungan antropologi dengan sosiologi

Sepintas lalu lebih banyak ke arah kesamaannya antara antropologi dan sosiologi. Sejak lahirnya sosiologi oleh Auguste Comte (*1789-1857), ilmu tersebut bercirikan positivistic yang objek kajiannya adalah masyarakat dan perilaku sosial manusia yang meneliti kelompok-kelompoknya. Kelompok tersebut mencakup keluarga; etnis; suku bangsa; komunitas pemerintahan; berbagai organisasi sosial, agama, politik, budaya, bisnis, dan organisasi lainnya (Ogburn dan Nimkoff, 1959: 13; Horton dan Hint, 1991:4).

Dengan demikian, objek kajian sosiologi adalah masyarakat manusia terutama dari sudut hubungan antarmanusia dan proses-proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat.

Dalam antropologi budaya mempelajari gambaran tentang perilaku manusia and konteks sosial budayanya. Jika saja sosiologi orientasinya memusatkan perhatian secara khusus kepada orang yang hidup di dalam masyarakat modern sehingga teori-teori mereka tentang perilaku manusia cenderung terikat pada kebudayaan tertentu (culture-bound).

Jadi, yang membedakan antropologi budaya dari ilmu-ilmu sosial lainnya adalah perhatiannya kepada masyarakat-masyarakat non-barat.

2. Hubungan antropologi dengan psikologi

Hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mentalnya. Dengan demikian, psikologi membahas factor-faktor penyebab perilaku manusia secara internal, seperti motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan lain-lain. Sedangkan dalam antropologi, khususnya antropologi budaya, lebih bersifat factor eksternal, yaitu lingkungan fisik, lingkungan keluarga dan lingkungan social dalam artian luas.

3. Hubungan antropologi dengan ilmusejarah

Lebih menyerupai hubungan antara ilmu arkeologi dengan antropologi. Antropologi memberi bahan prehistory sebagai pangkal bagi tiap penulis sejarah dari tiap bangsa di dunia. Selain itu, banyak persoalan dalam historiografi dari sejarah suatu bangsa dapat dipecahkan dengan metode-metode antropologi. Banyak sumber sejarah berupa prasasti, dokumen, naskah tradisional, dan arsip kuno, di mana peranannya sering hanya dapat member peristiwa-peristiwa sejarah yang terbatas pada bidang politik saja. Sebaliknya, seluruh latar belakang social dari peristiwa-peristiwa politik itu sukar diketahui hanya dari sumber-sumber tersebut. Konsep-konsep tentang kehidupan masyarakat yang dikembangkan oleh antropologi dan ilmu-ilmu social lainnya, akan member pengertian banyak kepada seorang ahli sejarah untuk mengisi latar belakang dari peristiwa politik dalam sejarah yang menjadi objek penelitiannya. Demikian juga sebaliknya, bagi para ahli antropologi jelas memerlukan sejarah, terutama sekali sejarah dari suku-suku bangsa dalam daerah yang didatanginya. Sebab sejarah itu diperlukan, terutama untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi karena masyarakat yang diselidikinya mengalami pengaruh dari suatu kebudayaan dari luar. Pengertian terhadap soal-soal tersebut baru dapat

dicapai apabila sejarah tentang proses pengaruh tersebut diketahui dengan teliti. Selain itu, untuk mengetahui tentang sejarah dari suatu proses perpaduan kebudayaan, sering kali terjadi bahwa sejarah tersebut masih harus direkonstruksi sendiri oleh seorang peneliti. Dengan demikian, seorang sarjana antropologi sering kali harus memiliki pengetahuan tentang metode- metode sejarah untuk merekonstruksi sejarah dari suatu rangkaian peristiwa sejarah.

4. Hubungan antropologi dengan ilmu geografi

Kita dapat melihat bahwa geografi atau ilmu bumi itu mencoba mencapai pengertian tentang keruangan (alam dunai) ini dengan member gambaran tentang bumi serta karakteristik dari segala macam bentuk hidup yang menduduki muka bumi. Di antara berbagai macam bentuk hidup di bumi yang berupa flora dan fauna itu, terdapat sifatnya yang beraneka ragam di muka bumi ini. Disinilah antropologi berusaha menyelami keanekaragaman manusia jika dilihat dari ras, etnis, maupun budayanya (Koenjtaraningrat, 1981: 36).

5. Hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi

Kekuatan, proses dan hukum-hukum ekonomi yang berlaku alam aktivitas kehidupan ekonominya sangat dipengaruhi system kemasyarakatan, cara berfikir, pandang, dan sikap hidup dari warga masyarakat pedesaan tersebut. Masyarakat yang demikian itu, bagi seorang ahli ekonomi tidak akan dapat mempergunakan dengan sempurna konsep-konsep beserta teori-teorinya tentang kekuatan, proses, dan hukum-hukum ekonomi tersebut (yang sebenarnya dikembangkan dalam masyarakat eropa-amerika serta dalam rangka ekonomi internasional), jika tanpa suatu pengetahuan tentang ilmu social, cara berpikir, pandangan, dan sikap hidup dari warga masyarakat pedesaan tersebut. dengan demikian, ilmu antropologi memiliki manfaat yang tinggi bagi seorang ekonom.

6. Hubungan antara antropologi dengan ilmu politik

Dapat dilihat bahwa ilmu politik telah memperluas kajiannya pada hubungan antara kekuatan-

kekuatan serat proses politik dalam segala macam Negara dengan berbagai macam system pemerintahan, sampai masalah yang menyangkut latar belakang social budaya dari kekuatan-kekuatan poloitik tersebut. Hal ini penting jika seorang ahli ilmu politik harus meneliti maupun menganalisis kekuatan-kekuatan politik di Negara-negara yang sedang berkembang.

Sebagai contoh, agar dapat memahami latar belakang dan adat istiadat tradisional dari suku bangsa, metode analisis antropologi menjadi penting bagi seorang ahli ilmu politik untuk mendapat pengertian tentang tingkah laku dari apa yang ditelitinya.

E. Pembelajaran Antropologi

Antropologi dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat (suku bangsa)
2. Dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang
3. Dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia khususnya indonesia yang mempunyai kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi
4. Dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan masalah yang muncul dalam lingkungan masyarakat
5. Materi – materi IPS yang diambil dari ilmu antropologi dalam pembelajaran di MI misalnya yaitu materi “ragam kebudayaan dan budaya”. Pada materi ini

siswa-siswa MI mempelajari tentang persebaran suku, adat istiadat hingga kebudayaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. KONSEP DASAR POLITIK

A. Pengertian Ilmu Politik

Ilmu politik adalah ilmu tentang kehidupan Negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama dalam mempertahankan kekuasaan yang adil. Ilmu politik merupakan kajian tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu seperti hubungan negara dengan warga negaranya serta dengan negara lainnya.

Ilmu politik juga menyangkut pengambilan keputusan tentang apakah yang menjadi tujuan sistem politik yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif serta penyusunan untuk membuat skala prioritas dalam menentukan tujuan-tujuan itu. Ilmu politik merupakan disiplin akademis, dikhususkan pada penggambaran, penjelasan, analisis, dan penilaian yang sistematis mengenai politik dan kekuasaan.

Untuk memahami lebih jauh apa itu arti ilmu politik, sebenarnya sangat tergantung pada dari dimensi apa ia melihat. Bagi kaum institusionalis, menyatakan : “Ilmu politik adalah kajian tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain”.

Berbeda dengan kelompok pendekatan kekuasaan yang menyatakan : “Ilmu politik sebagai disiplin empiris pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif kekuasaan”.

Pengertian ilmu politik akan berbeda pula menurut kelompok yang menggunakan pendekatan (public policy/belived approach), mengemukakan : “Objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibatnya”.

Kelompok ahli ilmu politik yang menggunakan pendekatan pembagian mengemukakan bahwa “Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”.

B. Konsep Dasar Politik

Untuk melakukan efisiensi dan efektivitas bagi kegiatan belajar dapat dipahami karena informasi-informasi itu semakin bertambah banyak dan semuanya harus diidentifikasi dalam simbol-simbol yang dapat disepakati. Caranya adalah merumuskannya dalam konsep-konsep yang mereduksi informasi-informasi tersebut menurut proposi-proposisi yang dapat ditangani (Sjamsuddin, 1996: 15). Di bawah ini dikemukakan konsep-konsep yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam pembelajaran ilmu politik.

1) Kekuasaan

Konsep kekuasaan merujuk kepada kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu.

Terdapat tiga sumber utama yang menyebabkan dalam mendefinisikan kekuasaan selalu ada perbedaan mendasar:

- b. Adanya perbedaan disiplin dalam ilmu-ilmu sosial yang menekankan perbedaan basis kekuasaan, misalnya kekayaan, status, pengetahuan, charisma, kekuatan, dan otoritas.
- c. Adanya perbedaan bentuk kekuasaan, seperti pengaruh, paksaan, dan kontrol.
- d. Adanya perbedaan penggunaan kekuasaan, seperti tujuannya untuk individu untuk masyarakat, politik, dan ekonomi.

2) Kedaulatan

Konsep kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua telaaahan.

- a. Dilihat dari HUKUM TATA NEGARA, konsep kedaulatan mengacu kepada kekuasaan pemerintah negara yang tertinggi dan mutlak.
- b. Dilihat dari HUKUM INTERNASIONAL mengacu kepada kemerdekaan suatu negara terhadap negara-negara lain.

3) Kontrol Sosial

Konsep kontrol sosial mengacu kepada pengaturan tingkah laku manusia oleh kekuatan sosial yang dilakukan di luar pemerintah untuk memelihara menurut hukum dan aturan itu yang muncul di dalam tiap-tiap masyarakat dan institusi.

4) Negara

Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dalam kekuasaan politik. Namun, negara pun merupakan alat (agency) dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat untuk menerbitkan fenomena kekuasaan dalam masyarakat.

5) Pemerintah

Istilah pemerintah dapat kita bagi dalam empat pengertian.

- a. Pemerintah mengacu kepada prose memerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang.
- b. Istilah ini dapat pula dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan.
- c. Pemerintah acap kali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
- d. Istilah ini dapat pula mengacu kepada bentuk, metode, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintahan dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

6) Legitimasi

Konsep legitimasi menunjuk kepada keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang kekuasaan maupun pemerintah adalah benar-benar orang yang dimaksud (yang secara hukum adalah sah).

7) Oposisi

Konsep oposisi merujuk kepada kelompok/partai penentang terhadap pemerintah resmi yang mengkritik pendapat maupun kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Kehadiran oposisi tersebut memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan demokrasi, terutama jika berperan sebagai oposisi yang sehat, merupakan penyeimbang maupun kontrol atas kebijaksanaan pemerintah yang dapat saja terjadi penyimpangan-penyimpangan.

8) Sistem Politik

Konsep sistem politik merupakan suatu istilah yang mengacu kepada semua proses dan institusi yang mengakibatkan perbuatan kebijakan publik. Perjuangan persaingan kelompok untuk menguasai secara politik adalah suatu aspek yang utama dalam suatu sistem politik.

9) Demokrasi

Konsep demokrasi secara umum merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Namun, ada juga yang menyatakan suatu sistem poolitik dimana kebijaksanaan umum ditentukanatas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasari atas prinsip kesamaan pilotik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo, 1960: 70).

Demokrasi hanya memungkinkan tumbuh subur, jika masyarakat dapat mengakui kepentingan-kepentingan sebagian orang maupun masyarakat lainnya. Namun, tidak ada negara yang benar-benar demokrasi sampai memuaskan

seluruh rakyatnya maupun dengan munculnya suatu oposisi yang sempurna pula sebagai penyeimbang.

10) Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu kegiatan politik untuk memilih atau menentukan orang-orang yang duduk di dalam legislatif maupun eksekutif. Adapun fungsi-fungsi pemilihan umum, antara lain :

- a. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah;
- c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa;
- d. Saran rekrutmen politik;
- e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah.

11) Partai Politik

Konsep partai politik mengacu kepada sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kemanfaatan bagi para anggotanya, baik yang bersifat ideil maupun material. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik –biasanya dengan cara konstitusional- untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

12) Desentralisasi

Konsep desentralisasi dalam Ensiklopedia Indonesia(1984: 794) dikemukakan sebagai pemindahan hak-hak pengaturan (bagian dari perundang-undangan) dan perintah dari badan-badan penguasa atas kepada yang lebih rendah.

13) Persamaan

Dalam ilmu sosial, khususnya politik, konsep persamaan sangat sarat nilai. Konsep ini merujuk kepada prinsip dasar pengaturan masyarakat manusia, seperti yang dikemukakan Thomas Jefferson bahwa setiap orang dinyatakan punya kedudukan yang setara sebagai warga negara (Halsey, 2000: 303).

Beberapa ahli menyebut persamaan itu sebagai sifat yang alamiah ataupun hukum alam, namun ada pula yang menyebutnya sebagai konstruksi sosial buatan manusia yang harus diperjuangkan.

14) Demonstrasi

Konsep demonstrasi secara umum berarti memperlihatkan, memamerkan, menunjukkan, dan membuktikan, namun dalam ilmu politik merupakan tindakan sekelompok orang yang secara bersama-sama menunjukkan dukungan maupun protes kolektif, baik itu ketidakpuasan maupun ketidaksetujuan. Namun, dapat juga terjadi demonstrasi yang anarkis dengan merusak sarana publik maupun memusuhi kelompok-kelompok penentang maupun aparat pemerintah.

15) Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai kondisi yang manusiawi, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian atau anugerah negara yang dapat dicabut melalui peraturan hukum oleh negara. Negara pada hakikatnya berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap sistem hukum mereka mencerminkan dan melindungi hak-hak asasi manusia yang bersifat internasional yang berada pada wilayah yurisdiksi mereka.

16) Voting (Pemungutan Suara)

Istilah voting atau pemungutan suara merujuk kepada suatu instrument untuk mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan partai atau calon dalam pemilihan umum.

Berdasarkan pengalaman historis, bangsa Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum belum pernah menggunakan sistem distrik secara penuh, dalam arti lebih percaya kepada sistem proporsional walaupun kini ada

gagasan sistem yang dikombinasikan dengan sistem proporsional.

C. TEORI ILMU POLITIK

Teori politik merupakan enterprise dan jika ditelusuri akar-akarnya memiliki silsilah yang panjang dan isemewa. Teori politik mengalami perkembangan yang cukup pesat pada abad ke-20, terutama setelah terpengaruh oleh pemikiran positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi serta semua didasarkan pada data empiris.

Terdapat tiga bentuk panteorian dalam ilmu politik, yakni teori politik empiris, teori politik formal, dan teori politik normatif.

1. Teori Politik Empiris

Biasanya digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Para ahli ilmu politik tertarik dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa politik tertentu, sekaligus tertarik dalam mengembangkan teori-teori yang lebih luas dalam satu payung politik.

2. Teori Politik Formal

Merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang-tindih dengan teori-teori sosial maupun teori-teori pilihan publik (Miller, 2002: 787). Istilah ini meminjam dari gagasan ilmu ekonomi tentang pelaku-pelaku rasional yang berusaha mencapai tujuan-tujuannya, kemudian mencoba mengembangkan model sistem politik dan seolah-olah mereka tersusun dari pelaku-pelaku dalam berbagai peran politik (politisi, birokrat, pemilih, dan lain-lain). Salah satu dari hasil yang terkenal mengenai investigasi ini adalah Teori Arrow (1963). Menurut teori tersebut, tidak ada aturan keputusan yang secara simultan dapat memenuhi sejumlah kondisi yang sangat masuk akal. Pada bagian lain, para ahli teori lagi-lagi mengasumsikan satu populasi dengan preferensi politik tertentu, dan melihat bagaimana partai-partai politik berperilaku dalam sistem pemilihan yang demokratis, dengan asumsi setiap tujuan partai adalah untuk

mengamankan kebijakan yang sesuai, mungkin dengan preferensinya sendiri. Penerangan ini pada mulanya dikembangkan oleh Antony Down (1957) dan sejak itu telah dielaborasi secara meluas.

3. Teori Politik Normatif

Merupakan teori politik yang tetap paling dekat dengan sekelompok yang memiliki tujuan yang sama (eterprise tradisional), sejauh ia berkenaan dengan justifikasi institusi dan kebijakan politik (Miller, 2002: 787). Tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, keadilan, dan lain-lain. Kemudian, mengkhususkan pada tatanan sosial yang paling memadahi untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, tugas teori politik menurut pandangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai sebagian karena menjelaskan prinsip-prinsip dasar itu sendiri. Tugas ahli tersebut menurut pandangan ini adalah menjelajah apa makna gagasan kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis.
- b. Spektrum itu berdiri di mana mereka memihak kepada beberapa bentuk fondasionalisme, di mana pandangan tersebut adaah mungkin untuk menemukan landasan tujuan dalam mendukung prinsip-prinsip politik yang mendasar. Kelompok yang menonjol di sini adalah berbagai versi politik kontraktarian. Kelompok ini berpendapat bahwa ada seperangkat prinsip politik dasar yang semua orang rasional akan sependapat terhadap kondisi tertentu yang sesuai. Contoh politik demikian adalah teori keadilan John Rawls (1971) yang memahami keadilan sebagai prinsip individu-individu yang rasional akan menyepakatinya. Contoh serupa, yaitu klaim Jurgen Habermas (1971) yang menyatakan bahwa norma-norma yang akan disetujui dalam situasi pembicaraan yang ideal, di mana penindasan dan dominasi tidak ada,

serta partisipan memengaruhi atau membujuk satu sama lain secara argumentatif (Miller, 2002: 798).

Referensi

- Abu Ahmadi. 2004. Sosiologi Pendidikan, Cetakan kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adorno, T.W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J. and Sanford, R.N. (1950) *The Authoritarian Personality*, New York: Basic Books.
- Ali, M. 1961. Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Jakarta: Bhratarata
- Allan, Graham (2000) "Perkawinan" dalam Adam Kuper & Jesica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 612-613.
- Allport, Gordon. W. (1954) *The Nature of Prejudice*, Cambridge, MA; Addison-Wesley.
- Banks, James, A. (1970) *Teaching the Black Experience: Methods and Materials*, Belmont, Calif: Fearon.
- Banks, James A. (1977) *Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision-Making*, Philippines: Addison-Wesley Publishing Company.
- Banks, James, A. (1970) *Teaching the Black Experience: Methods and Materials*, Belmont, Calif: Fearon.
- Benedict, Ruth. (1965) *Patterns of Culture*, New York: Mentor Book
- Blum, Lawrence, A. (2001) "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas antar Ras: Tiga Nilai Yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural", Penerjemah Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro, dalam Larry May dkk. *Etika Terapan-1, Sebuah Pendekatan Multikultural*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bourdillon, H. 1999. *Teaching History*. London: Routledge.
- Budiarjo, Mirriam. 1993. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Carr, E.H. (1985) *What Is History?*. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, Ltd.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2012). *Principles of Economics* (10th ed.). Boston: Prentice Hall.
- Cassirer, Ernest, (1951) *An Essay on Man*, 6 th printing, New Haven. Clark, D. (1990) *Marriage, Domestic Life and Social Change*, London. Routledge & Kegan Paul.
- Clarke, John (1961), *Population Geography*, Sydney : Pergamon Press
- Clyde, Paul, H. (1958) *The Far East: A History of the Impact of the West*, Englewood, N.J.: Prentice-Hall, Inc.

- Conrad, Philip Kottak.(1991).Anthropology: The Exploration offHuman Diversity. Edisi ke 5. New York: McGraw-Hill, Inc.
- D’Andrade, R. (1995) The Development of Cognitive Antrophology, Cambridge, UK.
- Dahrendorf, Ralf (2000) “Social Science (Ilmu Sosial)” dalam Adam Kuper & Jesica Kuper, Ensiklopedi Ilmuilmu Sosial, Diterjemahkan oleh Haris Munandar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dadang Supardan. 2007. Pengantar Ilmu Sosial: sebuah Pendekatan Struktural. Bandung: Rosda Karya
- Dahis, R. (2018). Is economics a science? Well, not yet. SSRN Electronic Journal, 1–22. Retrieved from
- Daldjoeni (1986), Pokok Pokok Geografi Manusia, Bandung : Alumni
- David Snedden. 1923. Educational Sociology. New York: The Century Co.
- Djamariah, B. dan Aswa Zain. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : Rineka Cipta
- Dobzahansky, Theodosius (1962) Mankind Evolving, New Haven: Yale University Press.
- Dollard, J. Doob, L.W. Miller, N.E. Mowrer, O.H. and Sears, R.L. (1939) Frustration and Agression, New Havent, C.T.
- Doyle Paul Johnson. 2008. Contemporary Sociological Theory: An Integrated MultiLevel Approach. Lubbock Texas: Spranger.
- Fiske, J. (1992) ‘British cultural studies and television’ dalam R.C. Allen, (ed) Channels of Discourse, Reassembled, London.
- Fortes, M. (ed) (1962) Marriage in Tribal Societies, Cmbridge: Cambridge University Press.
- Fox, Robin (1969) Kinship and Marriage, Harmondsworth: Penguin Books
- Fraenkel, Jack, R. dan Wallen Norman,F. (1993) How to Design and Evaluate Research in Education, NewYork: McGraw-Hill.Inc.
- Fraenkel, Jack, R. (1980) Helping Students Think and Value. Strategies forTeaching the Social Studies, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall,Inc.

- Francis Brown. 1961. *Educational Sociology*, Second Edition. Tokyo: Charles E. Tuttle Company.
- Frazer, J.G. (1932) *The Magic Art and Evolution of King*, 2 vol. London: Routledge & Kegan Paul.
- Garna, Judistira, K. (1987) *Penyajian Masyarakat Terasing dalam Konteks Masyarakat Indonesia*, dalam : Hood Salleh Kamarudin M. Said, Awang Hasmadi Mois (Penyunting), *Mereka yang Terpinggir di Indonesiadan Orang Asli di Malaysia*, Prosiding Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia ke II.
- Gee, W. (1950). *Social Science Research Methods*, New York: Appleton Century- Crofts, Inc.
- Geertz, Clifford (1973) *The Interpretation of Cultures: Selected essay*, New Yorl: Basic Books.
- Geertz, Cliford (1983) *Local Knowledge: Further Essay in Interpretative Anthropology*, New York: BasicBooks.
- Gellner, E. (1988) *Plough, Sword and Book: The Structure of Human History*, London: Routledge & KeganPaul. Giddens, Anthony, (1992) *The Trnsformation of Intimacy*, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Ke6. (penerjemah: Alimandan). Jakarta: Kencana.
- Glazer, Nathan dan Moynihan, Daniel P. (1975) *Ethnicity: Theory and Experience*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Goode, W.J. (1963) *World Revolution and Family Patterns*, New York: Free Press. Gudeman, Stephen (2000) "Antropologi Ekonomi" dalam dalam Adam Kuper & Jesica Kuper, *Ensiklopedi Ilmuilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh Haris Munandar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halmn.259-260.
- Goode, W.J. (2002) *Sosiologi Keluarga*, Penerkjemah Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara.
- Gottchalk, L.-1986. *Mengerti Sejarah*, Penerjemah Nugraho Notosusanto, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Gottschalk. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Greenlaw, S. A., & Shapiro, D. (2018). *Principles of Economics* (2nd ed.). Houston: OpenStax Rice University.

- Hall, S. (1992) 'Notes on deconstructing "the popular"' dalam R. Samuel (ed) *People's History and Socialist Theory*, London.
- Hamalik, O. 2004. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Ashaari
- Hanson, John W. 1966. *Education and Development of Nation*. New York: Alfred A.Knop.
- Hardmondsworth: Storey, John, (2000) *Studi-studi Budaya*" dalam Adam Kuper dan Jessica Kupper (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 197-199.
- Harris, Marvin (1968) *The Rise of Anthropological Theory*, New York: Crowell Haviland,
- Harsojo. (1984). *Pengantar Antropologi*. Cetakan kelima. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Haskey, J. dan Kiernan, K. (1989) "Cohabitation in Great Britain: Characteristics and Estimated Number of Cohabition Partners", dalam *Population Trend* 58.
- Horton, Paul, B. dan Hunt, Chester, L. (1991) *Sosiologi Jilid 1*, Alih Bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Erlangga.
- Humm, Maggie (2000) "Teori Feminisme" dalam Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh Haris Munandar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huxley, Julian (1942) *Evolution: The Modern Synthesis*, New York: Harper & Brothers.
- Jandy, Fred E. (1998) *Intercultural Communication: An Introduction*, London: SAGE Publications.
- I.N. Thut dan Don Adams. 2005. *Educational Patterns in Contemporary Societies*. (penerjemah : SPA Teamwork). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isjoni. 2007. *Pembelajaran Sejarah*. Bandung: Alfabeta
- Isjwara. 1974. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta.
- Ismaun. 1993. *Modul Ilmu Pengetahuan Sosial 9: Pengantar Ilmu Sejarah*, Universitas Terbuka: Jakarta.
- Ismaun. 2005. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*, Bandung: Historia Utama Press.

- J.V. Werstch (ed) *The Concept of Activity in Soviet Psychology*, Arnomk, New York: Sharpe.
- Jack Demaine (Ed.). 2001. *Sociology of Education Today*. New York: Palgrave.
- Jahja, A. S., & Riwayati, H. E. (2006). *Modul Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: STIE Perbanas.
- James M. Henslin. *Essentials of Sociology: a down-to-earth approach*, Book Alone, 6th Edition (penerjemah: Kamanto Sunarto). Jakarta: Erlangga.
- Jean-François Dortier. 1993. "Max Weber (1864-1920) Sosiologi Modernitas" dalam Philippe Cabin & Jean François Dortier (ed.). 2008. *La sociologie: Histoire et idées*. (penerjemah: Ninik Rochani Sjams). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Jones, Edward.Ee. (2000) "Stereotip", dalam Adam Kuper & Jesica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh Haris Munandar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Joseph dan William, Leonard (2005) *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*, Volume I dan II, Edisi Kedua, Penerjemah Haris Munandar, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Kaplan, D., dan Manners, A.A. (1999) *Teori Budaya*, Terjemahan Landung Simatupang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia
- Kathy S. Stolley. 2005. *The basics of sociology*. London: Greenwood Press.
- Keesing Robert, M. (1981) *Cultural Anthropology: Contemporary Perspective*, New York: Holt, Rinehart. And Winston.
- Keesing, Felix, M. (1958) *Cultural Anthropology: The Science of Custom*, New York: Rinehart.
- Khaldun, Ibnu (1284 H) *Al-Muqqadimah*, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra. Kluchhohn, Clyde (1965) *Mirror for Man*, Conn: Fawett.
- Kishtainy, N., Abbot, G., Farndon, J., Kennedy, F., Meadway, J., Wallace, C., & Weeks, M. (Eds.). (2012). *The Economics Book: Big Ideas as Simply Explained*. New York: DK Publishing.
- Koentjaraningrat (1981) *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Koentjaraningrat (1987) Sejarah Teori Antropologi, Jilid 1, Jakarta: Univesitas Indonesia Press.
- Koentjaraningrat, (1990) Sejarah Teori Antropologi, Jilid 2, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Koentjaraningrat. (1982). Sejarah Teori Antropologi. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (1996).Pengantar Antropologi I. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 1999. Pengantar Ilmu Sejarah, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kupper, Adam (1992) Conceptualizing Society, London.: Routledge & Kegan Paul
- Lechte, John (2001) 50 Filsuf Kontemporer: dari Strukturalisme sampai Post
- Kupper, Adam (2000a) ”Antropologi” dalam Adam Kuper dan Jessica Kupper (ed) Ensiklopedi Ilmu-ilmuSosial, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 29-33.
- Kupper, Adam (2000b) ”Kekerabatan” dalam Adam Kuper dan Jessica Kupper (ed) Ensiklopedi Ilmu-ilmuSosial, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 533-535.
- Lander S. David and Charles Tely. 1971. History As Social Science. London: Macmilan and Co
- Lee, R. (1979) The Kung San: Man, Women and Work in a Foraging Society,Cambridge: Cambridge UniversityPress.
- Lee, R. dan De Vore, I. (ed) (1968) Man the Hunter, Chicago.
- Levi-Strauss, C. (1963) Structural Anthropology, New York: Rinehart.
- Levi-Strauss, C. (1977) Structural Anthropology, Vol.II, London: Routledge & Kegan Paul.
- Lewis, Oscar, (1961) Human Organization, New Ypork Harper Torch Books.
- Linton, Ralph. (1984) Antropologi: Suatu Penyelidikan Manusia, Diterjemahkan oleh Firmansyah, Bandung:Jemars.
- Lippman, Walter, (1922) Public Opinion, New York: Macmillan
- 43Losco,

- Made Pidarta. 2000. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Malinowski, B. (1922) *Argonauts of the Western Pacific*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Malinowski, B. (1926) *Sex and Repression in Savage Society*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Malinowski, B. (1929) *The Sexual Life of Savages*, London: Kegan Paul.
- Malinowski, B. (1935) *Coral Gardens and their Magic*, London: Kegan Paul.
- Malinowski, B. (1944) *The Dynamic of Culture Change: An Inquiry Into Race Relation in Africa*, New Haven: Yale University Press.
- Mandel, M. (2018). *Economics: The Basics* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston, MA: Cengage Learning, Inc.
- Mansfield, P. dan Collard, C. (1988) *The Beginning of the Rest of your Life: A Potrait of Newly-Wed Marriage*, Basingstoke.
- Marger, Martin, N. (1985) *Race & Ethnic Relations: American and Global Perspectives*, Belmont, California: Wadsworth, Inc.
- Masinambow, E.K.M. (1997). *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta: AAI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Mateer, D., & Coppock, L. (2018). *Principles of Economics* (2nd ed.). New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- McEachern, W. A. (2012). *Economics: A Contemporary Introduction* (9th ed.). Mason: South-Western Cengage Learning.
- McHenry (2000) "Evolusi Manusia" dalam Adam Kuper dan Jessica Kupper (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 453-457.
- Mead, Margareth (1920) *Coming of Age in Samoa*, New York: Morrow
- Modernisme, Penerjemah A. Gunawan Admiranto, Yogyakarta: Kanisius.
- Murdock, G.P. (1949) *Social Structure*, New York.
- Murdock, G.P. (1978) "World Distribution of Theories of Illness", dalam *Ethnology*, xvii.
- Murdock, G.P. (1980) *Theories of Illness a Cross-Cultural Study*, New Haven: Yale University Press.

- Nagel, E. (1959) "The Place of Science in Liberal Education" ,
Daedalus, Winter. Oliver, Douglas, L. (1964) Invitation to
Anthropology: A Guide to Basic Concepts,
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto .2004. Sosiologi Teks Pengantar
dan Terapan. Jakarta: Prenada Media
- NCSS (1967), Structure in The Social Studies, Washitington DC :
National Education Association
- Noeng Muhadjir. 2000. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori
Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Notosusanto, N. 1979. Sejarah Demi Masa Kini, Jakarta: Universitas
Indonesia Press.
- Notosusanto, N. 1971. Norma2 Dasar Penelitian dan Penulisan
Sejarah, Djakarta: Dephankam Pusdjarah ABRI.
- Pals, Daniel L. (2001) Seven Theories of Religion: dari Animisme E.B.
Taylor, Materialisme Karl Marx Hingga Antropologi Budaya
C.Geertz, Terjemahan Ali Noor Zaman, Yogyakarta: Qalam.
- Parry, J.P. (2000) "Tabu" dalam Adam Kuper dan Jessica Kupper (ed)
Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial, Diterjemahkan Oleh Haris
Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 1081-
1082.
- Philippe Cabin & Jean-François Dortier (ed.). 2008. La sociologie:
Histoire et idées. (penerjemah: Ninik Rochani Sjams).
Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Piaget, Jean (1970) Genetic epistemology dalam E. Duckworth,
penerjemah: New York: Columbia University Press.
- Piget, Jean (1967) Six Psychological Studies, dalam A, Tenzer,
Penerjemah, New York: Random House.
- Popenoe, David, (1983) Sociology, Fifth Edition, Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Popper Karl.R. (1959) The Logic of Scientific Discovery, London:
Hutchinson & Co, Ltd.
- Popper, Karl.R. (1964) The Proverty of Historicism, New York: Harper
Torch Books. Popper, Karl. R. (1962) Conjectures and
Refutations, New York: Basic Books.

- Ragan, C. T. S., & Lipsey, R. G. (2011). *Economics* (13th ed.). Toronto: Pearson Canada Inc.
- Ravik Karsidi. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Solo: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- ROBERT AXELROD, *The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Colaboration*, Princeton University Press, 1997.
- Rogers, Everett, M. (1983) *Diffusion of Innovation*, New York: The Free Press A Division of MacmillanPublishing, Co.
- S. Nasution. 2004. *Sosiologi Pendidikan*, cetakan ketiga. Jakarta: Bina Aksara.
- Sahlins, Marshal (1960) "Evolution: Specific and General" dalam Marshal Sahlin dan dan Elman Service (ed), *Evolutionism and Culture*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Saifuddin, Achmad, F. (2005) *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Jakarta: Prenada Media.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Schneider, D.M.(1968) *American Kinship: A Cultureal Account*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Scott, John. Editor. 2011. *Sosiologi The Key Concepts*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press
- Sjamsuddin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Depdikbud, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Soekanto, Soerjono, (1993) *Kamus Sosiologi*, Edisi Baru, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Stone, L. (1979) *The family, Sex and Marriage in England 1500-1800*,
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi suatu pengantar*. Cet.36. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ST. Vembriarto. 1990. *Sosiologi Pendidikan*, edisi revisi, cetakan pertama. Yogyakarta: Adi Offset.
- Stanford, J. (2008). *Economics for Everyone*. London: Pluto Press.
- STEVEN LEVY, *Artificial Life: A Report from the Frontier Where Computers meet Biology*, Vintage, 1992.
- Storey, John. (ed) (1994) *Cultural Theory and Popular Culture: A Reader*, London: Routledge & Kegan Paul.

- Sumaatmadja (1983), Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan, Bandung : Alumni
- Sunal, C.S., dan Haas, M.E. 1993. Social Studies and The Elementary/Middle School Student, Harcourt Brace Jovanovich, Orlando: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Supardan, Dadang, (2004) Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global, Untuk Integrasi Bangsa (Studi Kuasi Eksperimentl Terhadap Siswa SMU di Kota Bandung), Disertasi Doktor, UPI Bandung.
- Supardan, Dadang. 2015. Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Bandung: Bumi Aksara.
- Suparlan, Parsudi. (1988). Prof. Koentjaraningrat: Bapak Antropologi Indonesia. Makalah untuk menyambut purna kedinasan Koentjaraningrat
- T. S. SMITH, G. T. STEVENS, "Emergence, Self-Organization, and Social Interaction: Arousal-Dependent Structure in Social Systems", *Sociological Theory* 14(2):131-153, 1996.
- Teggartt. 1960. *Theory and Process of History*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Thomas, Jr. W.J. dan Pikelis, A.N. (1953) *International Directory of Anthropological Institution*, New York: Wenner Green Foundation for Anthropological Research, Inc.
- Tukijan, dkk. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Undang – Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang – Undang No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Vygotsky, Lev Semyonovich (1962) *Thought and Language*, Cambridge, Mass, : M.I.T. Press.
- Vygotsky, Lev Semyonovich (1981) “The Genesis of Higher Mental Functions”, dalam
- William A (1999) *Antopologi*, Jilid 1, Alih Bahasa: R.G. Soekadijo, Jakarta: Erlangga.
- Honigmann, John, J. (1959) *The World of Man*, New York: Harper.

- Willis, Roy, (2000) “Magis” dalam Adam Kuper dan Jessica Kupper (ed) Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 600-601.
- Wilmsen, E. (1989) *Land Filled With Lies: Political Economy of the Kalahari*, Chicago.

KEGIATAN BELAJAR 3

Individu, Kelompok, Dan Kelembagaan

Konsep Individu

1) Pengertian Individu

Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil. Istilah “individu” ini berasal dari bahasa Yunani, yakni “individuum” yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosiologi, individu juga diartikan sebagai sebuah organisasi atau perorangan yang bebas dan tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik itu tindakan, pikiran, atau tingkah laku.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, individu memiliki arti organisme tunggal yang hidup dan berdiri sendiri. Secara fisiologis individu mempunyai sifat bebas yang sama dengan pengertian individu dengan berdasarkan konsep sosiologis yang berarti bahwa hidup berdiri sendiri.

Setiap individu dalam masyarakat berperan dengan statusnya yang berbeda-beda. Dalam lingkungan masyarakat individu mempunyai peran sebagai makhluk sosial. Tidak hanya berperan di lingkungan masyarakat saja, individu juga mempunyai peran di dunia politik. Peran individu dalam dunia politik, misalnya sebagai seorang yang menyumbangkan pendapat, salah satu seorang yang berperan dalam kegiatan politik, dan ikut serta dalam membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi maupun dunia politik.

“Manusia” adalah makhluk dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Berbagai pandangan membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Maksud dari pandangan manusia yang secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan perwujudan yang

satu dan berbagai ciri atau karakter yang nyata atau sifat paten manusia yang seimbang dengan berbagai macam segi, yaitu :

- Individu dan sosial
- Jasmani dan rohani
- Dunia dan akhirat

Manusia itu hidup dengan berbagai macam perbedaan, jadi jangan sampai setiap individu saling membedakan satu sama lain. Dan kita sebagai makhluk yang sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya kita harus bersyukur dan saling menghargai.

Sifat-sifat dan ciri-ciri manusia merupakan hal yang secara mutlak disematkan oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Dalam artian manusia tidak bisa diubah dan tidak bisa dipisahkan (keberadaannya) sebagai makhluk yang tunggal dan khas, karena setiap individu itu memiliki suara dan haknya masing-masing. Menurut kamus Echols & Shadaly, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, oknum.¹⁴

Setiap individu mempunyai ciri dan sifat atau karakteristik yang berbeda, dan karakteristik tersebut bisa didapat dari pengaruh lingkungan. Sejauh mana seseorang dilahirkan menjadi seorang individu dengan karakteristik yang dipengaruhi subjek penelitian dan diskusi. Karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat kekal, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hal itu akhirnya terbentuklah suatu contoh karakteristik tingkah laku yang dapat mewujudkan seseorang sebagai individu yang berkarakter beda dengan individu yang lainnya.

Dari berbagai macam perbedaan individu secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif. Sejauh mana perbedaan individu mereka akan mewujudkan kualitas yang terbaik dari berbagai bentuk juga unsur-unsur perbedaan tersebut. Perbedaan ini disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka “perbedaan” dalam “perbedaan individual” menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis.¹⁵

2) Perkembangan Pribadi Individu

¹⁴ Echols, J. M., & Shadily, H. Kamus Inggris-Indonesia. (Jakarta:1975)

¹⁵ Sunarto and Agung hartono, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002),4-6.

Perkembangan pribadi setiap individu secara singkat dapat dikatakan bahwa lingkungan kehidupan sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan pribadi seseorang, yang dimana mereka dibesarkan sejak usia dini hingga dewasa nanti, mereka pastinya memiliki ciri-ciri dan sifat yang berbeda-beda. Ada beberapa perkembangan kehidupan pribadi sebagai individu, yaitu :

1) Pengertian Kehidupan Pribadi dan Karakteristik

Pada hakikatnya manusia merupakan pribadi yang utuh dan memiliki sifat-sifat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pribadi

Seseorang individu, pertama tumbuh dan berkembang dilingkungan keluarga. Perkembangan pribadi menyangkut perkembangan berbagai aspek, yang akan ditunjukkan dalam perilaku. Perilaku seseorang yang menggambarkan perpaduan berbagai aspek itu terbentuk di dalam lingkungan.

3) Perbedaan Individu dalam Perkembangan Pribadi

Lingkungan kehidupan sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan pribadi seseorang amatlah kompleks dan heterogen. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa perkembangan pribadi setiap individu berbeda-beda pula sesuai dengan lingkungan dimana mereka dibesarkan.

4) Upaya Pengembangan kehidupan Pribadi

Kehidupan pribadi yang merupakan rangkaian proses pertumbuhan dan perkembangan, perlu dipersiapkan dengan baik. Untuk itu, perlu pembiasaan dalam hal hidup sehat dan teratur, bertanggung jawab dalam segala hal, hidup bermasyarakat dengan melakukan pergaulan dengan sesama, cara-cara pemecahan masalah yang dihadapi, mengikuti aturan kehidupan dalam keluarga, teman maupun masyarakat, melakukan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.¹⁶

¹⁶ Sunarto and Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, 186-190

Tentunya pengetahuan yang telah dimiliki dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Selain itu kita juga harus mengembangkan pengetahuan baik yang berupa fakta, konsep, teori yang ada di lingkungan sekitar, serta penanaman nilai dan sikap untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Kepribadian atau keunikan individu akan dapat dipahami dengan mempelajari unsur-unsur yang menyebabkan keunikan tersebut. Menurut Koentjaraningrat, unsur-unsur kepribadian meliputi:

1. Pengetahuan

Orang yang memahami atau mengetahui sesuatu disebut mempunyai pengetahuan. Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah kesan dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya. Kita mengenal pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah atau ilmu.

2. Perasaan

Perasaan selalu bersifat subyektif, dan tidak pernah obyektif. Oleh karena itu sulit untuk mendefinisikannya. Perasaan adalah, keadaan batin sewaktu menghadapi (merasa) sesuatu, atau dapat juga diartikan pertimbangan batin atas sesuatu. Misalnya : Perasaan cinta antara remaja yang secara langsung ingin selalu memiliki, tanpa memikirkan tahap persiapan dan masa depannya.

3. Dorongan Naluri

Dorongan naluri adalah sesuatu yang selalu ada pada setiap manusia, atau dengan kata lain merupakan unsur bawaan dengan tanpa memperoleh pengetahuan apa pun sebelumnya. Ada beberapa macam dorongan yang perlu diketahui antara lain:

- a. Dorongan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya
- b. Dorongan sex
- c. Dorongan untuk mencari makan
- d. Dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain
- e. Dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya
- f. Dorongan untuk berbakti
- g. Dorongan akan keindahan.

Individu dan Konteksnya dalam Masyarakat

Kehadiran individu dalam suatu masyarakat biasanya ditandai oleh perilaku individu yang berusaha menempatkan dirinya di hadapan individu-individu lainnya yang telah mempunyai pola-pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan kebudayaan di tempat ia merupakan bagiannya. Perilaku yang telah ada pada dirinya bisa “adjustable” (menyesuaikan diri, namun bisa juga mengalami) “maladjustable” (gagal menyesuaikan diri).

Proses dari individu untuk menjadi pribadi, tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya, tetapi juga didukung dan dihambat oleh kelompok sekitarnya (Nursid Sumaatmadja: 1981).¹⁷

Dalam proses untuk menjadi pribadi, individu dituntut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia berada. Lingkungan tersebut meliputi:

1. Lingkungan fisik

Di sini individu harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan jasmaninya sedemikian rupa untuk berhadapan dengan individu lainnya dengan keadaan jasmani yang sama atau berbeda. Prasarana fisik yang ada harus mampu dimanfaatkan

2. Lingkungan psikis

Individu harus dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang terdiri dari individu-individu yang menganut sistem nilai yang berbeda, mempunyai orientasi dan persepsi lain, dan memiliki keyakinan-keyakinan lain yang berbeda.

Dalam hubungan dengan lingkungannya tersebut, ada dua cara dalam menyesuaikan diri, antara lain:

1. Secara Alloplastis, yaitu individu secara aktif mempengaruhi dan bahkan sering mengubah lingkungannya.
2. Secara Autoplastis, yaitu lingkungan yang akan membentuk kepribadian individu.

Individu dan Kelompok Sosial

¹⁷ Nursid Sumaatmadja. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. (Bandung: Alumni, 1981)

Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok (gregariousness) sebenarnya bukanlah sekedar suatu naluri ataupun keperluan asasi yang diwariskan secara biologis semata-mata. Akan tetapi dalam setiap kenyataan adanya manusia berkumpul, sampai batas-batas tertentu juga menunjukkan adanya suatu ikatan sosial tertentu.

Interaksi antar manusia merupakan suatu kebutuhan, dari pengalamannya manusia belajar bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, individu manusia yang satu memerlukan individu manusia lainnya. Jadi kehidupan berkelompok merupakan kebutuhan mutlak, sebab sendirian saja seorang individu tidak mungkin hidup secara wajar.

Menurut Soerjono Soekanto (1990), bahwa tidak semua himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Suatu himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial apabila:¹⁸

1. Kesadaran setiap anggota bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan.
2. Ada interaksi dan timbal balik antara anggota kelompok satu dengan anggota lainnya.
3. Ada sesuatu yang dimiliki bersama, misalnya tujuan, cita-cita, idiologi, dan kepentingan.
4. Berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku.
5. Bersistem dan berproses.

Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, tetapi selalu berkembang dan mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Kelompok sosial merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, dan memegang peranan.

Manusia merupakan makhluk yang terdiri dari jasmaniah (raga) dan rohaniah

(jiwa). Dari segi rohaniah manusia terdiri dari pikiran dan perasaan, apabila diserasikan akan menghasilkan kehendak yang kemudian menjadi sikap. Sikap itulah yang kemudian menjadi landasan gerak segi jasmaniah manusia. Pola berpikir yang dianut seseorang akan mempengaruhi sikapnya. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda atau keadaan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1990)

Misalnya seseorang yang pola pikirnya materialistis maka akan mempunyai sikap tertentu terhadap pekerjaan tertentu. Dia akan mementingkan pekerjaan tertentu yang menghasilkan materi yang banyak dan kurang memperhatikan kepuasan batiniah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka sikap tersebut akan membentuk perilaku tertentu apabila berlangsung secara berkesinambungan, yaitu materialistis.

Konsep Kelompok Sosial

1) Pengertian Kelompok Sosial

Kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki harapan dan tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok yang diakui pihak luar. Menurut beberapa para ahli, pengertian kelompok adalah:

- *Menurut Sherif and Sherif (1956)*

Suatu unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu.

- *Menurut Abmadi (2007)*

Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karenanya adanya antar hubungan antar mereka.

- *Schein (2003)*

Sejumlah orang yang berbagi nilai (share) terhadap pandangan yang sama dari suatu masalah dan mengembangkan penyelesaian share tersebut.

2) Proses terbentuknya kelompok sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Dengan adanya dorongan pada manusia untuk mengadakan hubungan

dengan manusia lain, maka kemudian terbentuklah kelompok-kelompok dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Lebih lanjut Mac Iver (1961 : 213) dalam Oktayati (2013) mengemukakan bahwa kelompok sosial terbentuk melalui proses interaksi dan sosialisasi, dimana manusia berhimpun dan bersatu dalam kehidupan bersama berdasarkan hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan memiliki kebersamaan untuk tolong menolong".²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok adalah tempat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sosiologis, ekonomis, maupun kebutuhan psikologisnya. Dengan berkelompok, manusia dapat mengembangkan potensi, aktualisasi, dan eksistensi dirinya. Hal ini disebabkan oleh adanya naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain.

Terdapat beberapa syarat dalam terbentuknya kelompok sosial. Beberapa persyaratan sebuah kelompok sosial yaitu:

- a) Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
 - b) Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya.
 - c) Ada satu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antara mereka semakin erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Tentunya faktor memiliki musuh bersama misalnya, dan dapat pula menjadi faktor pengikat/pemersatu.
 - d) Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.
 - e) Bersistem dan berproses.²¹
- 3) Ciri-ciri kelompok sosial

Menurut Kartono (1990), ada beberapa ciri-ciri dari kelompok sosial, yaitu:

- Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain.

¹⁹ Bimo, Walgito. Psikologi Sosial. (Yogyakarta: Andi Offset. 2003)

²⁰ Mac Iver, R. M. & Charles H. Society An Introducing Analysis. (London : Macmilan & Co Ltd. 1961)

²¹ Basrowi, Pengantar Sosiologi. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

- Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya.
- Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing.

4) Macam-macam kelompok sosial

Kelompok sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Syarbaini, 2004: 24):

- a) Primary group dan secondary group: kelompok itu menjadi primer karena masih saling kenal, pertalian darah, dan persahabatan. Sekunder karena sifatnya yang didasari kerja sama atas hitungan untung rugi.
- b) Gemeinschaft dan Gesellschaft: dikatakan gemeinschaft karena didasari ikatan batin yang alamiah, maka ada gemeinschaft by Blood, gof mind, gemeinschaft of place. Sedangkan gesellschaft karena ikatan lahiriah yang mekanis, seperti perjanjian dagang, anggota organisasi, karyawan, dan sebagainya.
- c) Formal group dan informal group, kelompok sosial yang menjadi formal karena sistem hubungan itu sengaja diciptakan, maka setiap orang dalam organisasi itu mempunyai kedudukan. Jika hubungan itu karena pertemuan berulang-ulang secara pribadi, maka disebut informal atau biasanya disebut clique.
- d) Membership dan reference group, kelompok sosial ini disebut reference group karena berusaha mengidentifikasi dirinya pada kelompok di mana ia bukan anggota, misalnya orang yang tidak berhasil menjadi mahasiswa mencoba berperilaku mirip mahasiswa.
- e) In-group dan out-group, hal ini terdapat dalam segala lapisan masyarakat, seperti Rukun Tetangga (RT), kelas siswa, pegawai negeri-swasta, dan sebagainya.

5) Faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial

Ada dua faktor yang mengarahkan pada pilihan yaitu :

- Kedekatan : Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin memungkinkan untuk saling melihat, berbicara, dan

bersosialisasi. Kedekatan fisik meningkatkan peluang untuk berinteraksi.

- Kesamaan : Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, tingkat intelegensi, atau karakter-karakter lainnya.

Konsep Masyarakat

1) Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.²² Menurut beberapa ahli pengertian dari masyarakat adalah:

- Karl Marx

Suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.

- Selo Soemardjan

Orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

- Maclver

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, berbagai golongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan individu (manusia). Keseluruhan yang selalu berubah inilah yang dinamakan dengan masyarakat.

2) Stratifikasi Sosial

Menurut Sorokin, dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian

²² Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137.

hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan tanggung-jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota masyarakat.²³

Fungsi stratifikasi sosial:

- Distribusi hak-hak istimewa yang objektif
Fungsi stratifikasi sosial yang pertama adalah distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Maksud distribusi hak-hak istimewa yang objektif ini termasuk menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan kewenangan pada jabatan atau kedudukan seseorang.
- Menentukan simbol status atau kedudukan
Fungsi stratifikasi sosial lainnya termasuk menentukan simbol status atau kedudukan seseorang. Karena, setiap strata sosial ditandai dengan pangkat atau simbol-simbol yang menunjukkan kedudukannya, peranan khusus dan standar tingkah lakunya dalam kehidupan.
- Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga mampu melestarikan kehidupan masyarakat.²⁴

Konsep Kelembagaan

Kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya.

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam

²³ Dwi Narwoko. Bagong Suyanto. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Kencana, 2006), 153.

²⁴ Dwi Narwoko. Bagong Suyanto. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Kencana, 2006), 160.

bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (terulek) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk kepentingan bersama atau umum (public). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (behaviour). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya (Djogo, dkk, 2003).

Djogo dkk (2003) juga menyebutkan bahwa pada umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam konteks ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikar positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu; “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (value), norma (norm), custom, mores, folkways, usage, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultur dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama. Sementara dalam aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (role). Lebih jauh aspek struktural mencakup: peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur faktual, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. Bentuk perubahan sosial dalam aspek keorganisasian bersifat struktural dan berlangsung relatif cepat (Subagio, 2005).

Konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, institusi-institusi, departemen-departemen di pemerintah pusat dan sebagainya. Sebuah lembaga dapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan juga bisa

mengacu pada fungsi-fungsi administrasi pemerintah.²⁵ Sedangkan menurut Uphoff dalam Shahyuti (2003), istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat interchangeably. Secara keilmuan, social institution dan social organization berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup, sosial form, dan lain-lain yang relatif sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini, istilah “kelembagaan” lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang lebih memilih istilah tersebut. Kelembagaan lebih dipilih karena kata “organisasi” menunjuk kepada suatu sosial form yang bersifat formal, dan akhir-akhir ini semakin cenderung mendapat image negatif.

Sejalan dengan pernyataan Subagio (2005), Koentjaraningrat (1974) menyatakan tujuan dari kelembagaan sosial adalah memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka ia dapat dikategorikan berdasarkan jenis-jenis kebutuhan pokok tersebut Kemudian mengategorikannya ke dalam delapan golongan sebagai berikut:²⁶

- a. Kelembagaan kekerabatan/domestik: memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan. Contoh: pelamaran, poligami, perceraian, dan lain-lain.
- b. Kelembagaan Ekonomi: memenuhi pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, mendistribusikan harta benda. Contoh: pertanian, peternakan, industri, koperasi, perdagangan, sambatan, dan lain-lain.
- c. Kelembagaan pendidikan: memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contoh: pendidikan dasar/ menengah/tinggi, pers, dan lain-lain.
- d. Kelembagaan ilmiah: memenuhi kebutuhan ilmiah manusia dan menyelami alam semesta. Contoh: pendidikan ilmiah, penelitian, metode ilmiah, dan lain-lain.

²⁵ Ehud Yaari, Israel's Armistice with Hamas, Growing Tensions with Abbas. The Washiton Instutute for near east policy (2019)

²⁶ Djarwanto PS, dan Subagyo pangestu. Statistik Induktif. Edisi Kelima. Yogyakarta : BPFE.2005

- e. Kelembagaan estetika dan rekreasi: kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahannya dan rekreasi. Contoh: seni rupa, seni suara, seni gerak, kesusastraan, dan lain-lain.
- f. Kelembagaan keagamaan: memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib. Contoh: upacara, selamatan, pantangan, dan lain-lain.
- g. Kelembagaan politik: memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan kelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. Contoh: pemerintahan, kepartaian, demokrasi, kepolisian, kehakiman, dan lain-lain.
- h. Kelembagaan somatik: memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia. Contoh: pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan kecantikan, dan lain-lain.

Rangkuman

Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil. Istilah “individu” ini berasal dari *social*, yakni “individuum” yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosiologi, individu juga diartikan sebagai sebuah organisasi atau perorangan yang bebas dan tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik itu *social*, pikiran, atau tingkah laku.

Perkembangan pribadi setiap individu secara singkat dapat dikatakan bahwa lingkungan kehidupan *social* budaya yang mempengaruhi perkembangan pribadi seseorang, yang dimana mereka dibesarkan sejak usia dini hingga dewasa nanti, mereka pastinya memiliki ciri-ciri dan sifat yang berbeda-beda.

Kehadiran individu dalam suatu masyarakat biasanya ditandai oleh perilaku individu yang berusaha menempatkan dirinya di hadapan individu-individu lainnya yang telah mempunyai pola-pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan kebudayaan di tempat ia merupakan bagiannya. Perilaku yang telah ada pada dirinya bisa “adjustable” (menyesuaikan diri, namun bisa juga mengalami) “maladjustable” (gagal menyesuaikan diri).

Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok (*gregariousness*) sebenarnya bukanlah sekedar suatu naluri ataupun keperluan asasi yang diwariskan secara biologis semata-mata. Akan tetapi

dalam setiap kenyataan adanya manusia berkumpul, sampai batas-batas tertentu juga menunjukkan adanya suatu ikatan sosial tertentu.

Interaksi antar manusia merupakan suatu kebutuhan, dari pengalamannya manusia belajar bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, individu manusia yang satu memerlukan individu manusia lainnya. Jadi kehidupan berkelompok merupakan kebutuhan mutlak, sebab sendirian saja seorang individu tidak mungkin hidup secara wajar.

Kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki harapan dan tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok yang diakui pihak luar.

Masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.

Kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya.

Referensi

- Muin, Indianto (2013). *Buku sosiologi kurikulum 2013*. Penerbit Erlangga
- Mulyadi, Yad dkk. 2013. *Sosiologi SMA Kelas XI*. Jakarta :Yudhistira
- Mansyur, Cholil. (1980). *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya : Usaha Nasional
- Saidang. (2010). *Sosiologi untuk SMA Kelas XI*. Solo : CV Hamka MJ
- Soekanto, Soerjono (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Horton, Paul B. Dan Hunt, Chester L. (1984). *Sosiologi Edisi Ke Enam Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Christie G. Turin & Theresa J. Ochoa (2014). *The Role of Maternal Breast Milk In Preventing Infantile Diarrhea in the Developing World*. *Curr Trop Med Rep* (2014)1;97-105

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.
- Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Efendi, Rusli dkk. *Teori Hukum, Cet. I; Ujung Pandang*: Hasanuddin Universitas Press.
- Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1977.
- Kusumaatmajaya, Mohtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Binacipta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Jakarta: Kompas, 2009.

KEGIATAN BELAJAR 4

Ruang, Waktu dan Perubahan Sejarah Indonesia

Konsep Waktu dalam Sejarah

Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung.²⁷ Dalam sejarah, unsur waktu merupakan unsur sangat penting. Sebab mempelajari sejarah bukanlah mempelajari sesuatu yang berhenti melainkan mempelajari sesuatu yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Setiap peristiwa sejarah berada pada kurun waktu tertentu yang memiliki latar belakang kurun waktu sebelumnya. Unsur waktu juga memberikan konteks atau setting tertentu bagi berlangsungnya peristiwa sejarah. Oleh sebab itu, dalam mempelajari sejarah, harus ditentukan dengan tegas dan jelas siapa pelakunya, kapan terjadinya, dan dimana peristiwa itu berlangsung. Konsep waktu dalam sejarah menurut Kuntowijoyo mencakup empat hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan.²⁸ Dalam hal perkembangan, sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lain, biasanya dari yang sederhana ke bentuk yang lebih rumit. Dalam sejarah, juga terjadi kontinuitas atau kesinambungan yang melahirkan kondisi baru, namun tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Dalam sejarah, pengulangan terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Sehingga menghasilkan perubahan yang terjadi karena praktik lama dinilai tidak memadai lagi untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan.

²⁷ KBBI. (<https://kbbi.web.id/waktu.html>).

²⁸ Yulia Siska. (2016). *Buku Konsep Dasar IPS untuk SD/MI*.

Konsep waktu terbagi menjadi tiga, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lampau. Akan tetapi, konsep waktu pada masa lampau ini juga memengaruhi peristiwa pada masa kini. Sebagai contoh, pada masa lampau Republik Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan (NKRI) dengan pertimbangan kemajemukan sosial dan adanya ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keputusan pemerintah tetap bertahan sampai sekarang. Oleh sebab itu, keputusan pemerintah pada masa lampau berpengaruh terhadap perkembangan negara pada masa kini dan masa yang akan datang.

Konsep waktu dalam sejarah meliputi dua hal, yakni (1) proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu, (2) kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa yang lampau, sekarang, dan masa yang akan datang.²⁹ Sebagai contoh, pemerintahan Orde Baru yang mengalami kemunduran dengan peristiwa mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 atau contoh lain, Pembacaan Naskah Proklamasi oleh Bung Karno pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945.

Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti kelangsungan (continuity) dan satuan atau jangka berlangsungnya perjalanan waktu (duration). Kelangsungan waktu atas kesadaran manusia terhadap waktu dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu:

- (1) Waktu yang lalu atau the past, menyusul,
- (2) Waktu sekarang atau the present, dan berlanjut,
- (3) Waktu yang akan datang atau the future.

Dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri dan dilupakan begitu saja, sebab sejarah itu berkesinambungan apa yang terjadi dimasa lalu dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak dimasa sekarang serta sebagai pijakan mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Seperti sebuah ungkapan “Semakin anak panah kita tarik kebelakang akan semakin jauh Jangkauannya, dengan belajar sejarah, mengetahui masa lampu maka kita akan dapat menyiapkan masa depan dengan lebih baik”. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak dalam kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi pada

²⁹ Modul Sejarah Kelas X KD 3.1 dan 4.1. Kemendikbud

suatu ruang atau tempat tertentu. Sedangkan makna waktu secara konotatif berarti ruang yang merupakan tempat terjadinya peristiwa. Perspektif waktu merupakan dimensi yang sangat penting dalam sejarah. Sekalipun sejarah itu erat kaitannya dengan waktu lalu, tetapi waktu lalu itu terus berkesinambungan. Sehingga perspektif waktu dalam sejarah, ada waktu lampau, kini dan yang akan datang. Waktu akan memberikan makna dalam kehidupan dunia yang sedang dijalani sehingga selama hidup manusia tidak dapat lepas dari waktu karena perjalanan hidup manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri.³⁰

Keterkaitan antara waktu dengan pembabakan sejarah

Proses dalam sejarah memperlihatkan perubahan, peralihan, dan pergantian. Untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang sejarah, yakni mendapatkan gambaran yang bermakna mengenai masa lampau kehidupan dan masyarakat manusia, maka sejarah harus diberi bentuk tertentu berupa cerita sejarah. Sejarah diberi bentuk dengan mengadakan pelukisan peristiwa-peristiwa sejarah. Salah satu bentuk pelukisan peristiwa sejarah adalah melalui penggolongan sejarah berdasarkan tiga kategori, yakni: kategori ruang, kategori waktu, dan kategori tema kehidupan.

Peristiwa pada masa lampau tidak pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa yang akan datang sehingga waktu dalam perjalanan sejarah adalah suatu kontinuitas (kesinambungan). Oleh karena itu, untuk memudahkan ingatan manusia dalam mempelajari dan memahami peristiwa-peristiwa masa lalu dalam sejarah perlu ditentukan batas-batas waktu dengan cara klasifikasi waktu, dan klasifikasi waktu dalam ilmu sejarah menghasilkan pembagian waktu, yaitu, periode, zaman, babakan waktu atau masa, dan kini. Sedangkan kurun adalah satu kesatuan waktu yang isi, bentuk maupun waktunya tertentu.

Masa lalu yang tidak terbatas kejadian dan waktunya ditentukan isi, bentuk dan waktunya menjadi kurun-kurun. Satu hal yang perlu diketahui bahwa maksud dari periodisasi ialah supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya sehingga mudah dipahami dari urutan-urutan rangkaian peristiwa sejarah. Contoh: adanya masa prasejarah, zaman

³⁰ Ibid.

pengaruh Hindu-Budha, zaman Islam, masa kekuasaan bangsa Belanda, masa Kebangkitan Nasional, serta zaman Kemerdekaan. Pembagian tersebut yang kita namakan periodisasi atau zaman. Di mana setiap periode atau zaman memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan periode yang lainnya.

Sejarah dapat dikenal menurut zaman-zaman tertentu dengan pola-pola tertentu dalam goligasi fakta-fakta sejarah, struktur masyarakat, dan jiwa tertentu dalam kebudayaannya. Menurut Xenopol peristiwa berurutan merupakan objek studi sejarah sebagai ilmu, karena sejarah menitikberatkan urutan (*succession, chronology*) sebagai pokok penelitian. Urutan yang dimaksud adalah pertumbuhan dan perkembangan dalam esensi pengertian tentang perubahan, baik evolusi maupun revolusi.³¹

Pada hakikatnya, sejarah itu berkaitan dengan konsep waktu atau tempo (*time*), di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu adalah berkesinambungan (*continuity*) dan satuan berlangsungnya waktu (*duration*) dengan perubahan-perubahan yang mengarungi ruang geografis. Ruang geografis tersebut berisi berbagai peristiwa mengenai segala aktivitas dan hasil karya manusia dalam perjalanan waktu yang berkesinambungan. Dengan demikian, maka kurun waktu memiliki tiga dimensi, yaitu:

- a. Waktu yang lalu (*the past*), menyusul;
- b. Waktu sekarang (*the present*), dan berlanjut;
- c. Waktu yang akan datang (*the future*).

Dengan demikian jalannya waktu sebagai proses bergerak menurut garis lurus yang bergerak terus dari awal menuju masa depan, jadi penggambaran proses jalur waktu itu selalu lurus (*linear*). Pandangan waktu bervariasi menurut tinjauan dari berbagai peradaban. Menurut filsafat sejarah gambaran siklus waktu berakar pada kosmologi yang masih terikat pada peredaran kosmos dan musim.

Kebudayaan muncul bersamaan dengan munculnya manusia di permukaan bumi. Di dalam perjalanannya, kebudayaan mengalami bermacam-macam proses. Berbagai perubahan kebudayaan yang terjadi pada kelompok-kelompok manusia tidak muncul dengan sendirinya dan tiba-tiba, melainkan mengalami bermacam-macam proses. Proses yang terjadi tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Kurun waktu yang

³¹ Gazalba, 1966. hlm. 3

diperlukan untuk mengubah suatu kebudayaan dapat berbeda-beda. Ada yang berlangsung beberapa tahun saja, ada yang puluhan tahun, bahkan ada yang hingga beberapa abad. Hal tersebut sangat bergantung dengan individu-individu yang terdapat di dalam kelompok manusia yang bersangkutan.

Konsep Perubahan dan Dinamika Kebudayaan

Budaya sebagai hasil budi daya manusia tidak selalu statis, namun bergerak sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Itulah yang dimaksud dengan dinamika. Jadi, sesungguhnya dinamika adalah suatu kekuatan dari dalam suatu materi yang memiliki tenaga atau semangat untuk bergerak sehingga terjadi suatu perubahan. Dalam hal ini, materi yang memiliki kekuatan untuk bergerak adalah sekelompok manusia atau sekelompok individu. Sekelompok manusia atau individu sangat berperan aktif menentukan terjadinya suatu perubahan.³² Seorang individu belum tentu dapat melakukan perubahan. Sekalipun dapat melakukan suatu Proses perubahan budaya hingga membentuk suatu dinamika budaya berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam antropologi dinamika kebudayaan berlangsung dalam beberapa proses berikut :

a) Evolusi Kebudayaan

Evolusi merupakan suatu bentuk pergeseran atau perubahan kebudayaan dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang makin lama makin kompleks.

b) Difusi

Difusi adalah proses penyebaran kebudayaan melalui perpindahan bangsa-bangsa. Kebudayaan tersebar dikarenakan terbawa oleh bangsa-bangsa yang melakukan migrasi.

c) Akulturasi

Akulturasi adalah suatu bentuk perubahan karena adanya pengaruh dari kebudayaan asing yang lambat laun diterima tanpa kehilangan kepribadian kebudayaan aslinya.

³² Wahyu Nur Mahya, 2015, *Dinamika Kebudayaan*(Antropologi Kelas XI Semester 2).

d) *similasi*

Asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih kemudian masing-masing kebudayaan tersebut mengalami perubahan, baik dalam sifat maupun wujud unsur-unsurnya dan berbaur menjadi satu kebudayaan yang baru.

e) *Inovasi*

Inovasi adalah suatu proses perubahan kebudayaan yang tidak terjadi karena adanya pengaruh langsung dari unsur-unsur kebudayaan asing, tetapi karena di dalam kebudayaan itu sendiri terjadi pembaruan yang mengalami penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, pengaturan tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semuanya akan menyebabkan dihasilkannya produk baru.³³

Kebudayaan barat yang sudah mulai merambah ke Indonesia telah membuat masyarakat Indonesia melupakan kebudayaan sendiri. Kebudayaan sendiri dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terhadap berbagai hal. Atau kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai wujudnya, yang mencakup gagasan atau ide, kelakuan dan hasil kelakuan, dimana hal-hal tersebut terwujud dalam kesenian tradisional kita. Oleh karena itu nilai-nilai berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat yang dulunya tertutup menjadi masyarakat yang terbuka, nilai dan norma sosial juga termasuk yang mengalami perubahan. Akibat adanya globalisasi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan transportasi internasional telah mengubah batas-batas budaya setiap bangsa. Dengan adanya hal seperti ini masyarakat Indonesia lebih menyukai hiburan-hiburan dari menonton tayangan televisi, bermain hp, menggunakan layanan internet bahkan ke diskotik, tempat hiburan malam di bandingkan menonton kesenian tradisional, bermain permainan tradisional. Di sisi lain, ada beberapa seni pertunjukan yang tetap eksis tetapi telah mengalami perubahan fungsi. Ada pula kesenian yang mampu beradaptasi dan mentransformasikan diri dengan teknologi komunikasi yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat, misalnya saja kesenian tradisional “ketoprak” yang di

³³ Koentjaraningrat. 1999. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Aksara Baru.

populerkan ke layar kaca oleh kelompok srimulat.kenyataan di atas menunjukkan kesenian ketoprak sesungguhnya memiliki penggemar sendiri ,terutama ketoprak yang di sajikan dalam bentuk siaran televisi,bukan ketoprak panggung. Dari segi bentuk pementasan atau penyajian ,ketoprak termasuk kesenian tradisional yang telah terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Budaya nasional yang seharusnya menjadi kebanggaan dan harusnya di pertahankan sekarang mulai hilang di karenakan masuknya budaya asing (modern). Kita sebagai warga negara indonesia yang mempunyai hak penuh atas kebudayaan tersebut seharusnya melestarikannya bukan malah mengesampingkannya dengan berbagai alasan seperti takut di bilang ketinggalan jaman,kupper,katrok ,dan lain sebagainya.³⁴

Sejarah Pada Masa Pra Sejarah

Pra-sejarah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di saat catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Tidak jauh berbeda dengan istilah pra- aksara yang berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa pra- aksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa pra-sejarah dan pra-aksara disebut juga dengan masa nirleka (nir artinya tidak ada, dan leka artinya tulisan), yaitu masa tidak ada tulisan.³⁵

Masa pra-aksara disebut juga dengan masa pra-sejarah, yaitu suatu masa dimana manusia belum mengenal tulisan. Adapun masa sesudah manusia mengenal tulisan disebut juga dengan masa aksara atau masa sejarah. Mengenai istilah, terdapat pendapat bahwa istilah pra-aksara sebenarnya lebih tepat karena pra-aksara berarti sebelum ada tulisan. Berbeda dengan pra sejarah yang berarti sebelum ada sejarah. Meski manusia belum mengenal tulisan, tidak berarti manusia tidak memiliki sejarah dan kebudayaan. Seperti diungkapkan Colin

³⁴ Cit.Hlm.8

³⁵ R. Sukmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I, (Jakarta: Kanisius, 1990), hlm.1.

Renfrew, zaman pra-sejarah dapat dikatakan permulaan terbentuknya alam semesta, namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di saat kehidupan manusia di Bumi yang belum mengenal tulisan.³⁶

Batas antara zaman pra-sejarah dengan zaman sejarah adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa pra-sejarah adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Berakhirnya zaman pra-sejarah atau dimulainya zaman sejarah untuk setiap bangsa di dunia tidak sama tergantung dari peradaban bangsa tersebut. Contohnya, Bangsa Mesir sekitar tahun 4000 SM masyarakatnya sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat itu, Bangsa Mesir sudah memasuki zaman sejarah. Berbeda dengan zaman pra-sejarah di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti berbentuk yupa yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur baru memasuki era sejarah.

Zaman pra sejarah ini adalah zaman yang paling sulit di temukan bukti sejarahnya. Karena tidak terdapat peninggalan catatan tertulis dari zaman pra- sejarah. Keterangan mengenai zaman ini diperoleh melalui bidang-bidang ilmu seperti Paleontologi, Astronomi, Biologi, Geologi, Antropologi, Arkeologi. Dalam artian bahwa bukti-bukti pra-sejarah didapat dari artefak-artefak yang ditemukan di daerah penggalian situs pra-sejarah.

Tercatat lima peristiwa besar terjadi di Indonesia dalam rentang prasejarah; kelimanya mengkait dengan kawasan regional-global. Peristiwa pertama adalah kehadiran manusia purba pada kala Plestosen Bawah yang mengawali hunian manusia di Nusantara. Peristiwa ini terjadi dalam konteks globalisasi “Out of Africa”, yakni persebaran manusia purba dari Afrika menuju Eropa dan Asia, dan yang salah cabangnya menuju Indonesia. Peristiwa kedua adalah kemunculan Manusia Modern Awal (MMA) di sekitar paruh kedua Plestosen Atas yang juga bagian dari globalisasi persebaran dari Afrik

³⁶ Renfrew & Bahn, “Where? Survey and Excavation of Sites and Features”, dalam *Archaeology: Theories, Methods and Practice* (5th ed.), (London: Thames & Hudson, 2008), hlm.6.

menuju Eropa dan Asia. Kehadirannya di Indonesia berperan dalam pengglobalaan kawasan Melnesia Barat dan Australia. Selanjutnya, peristiwa ketiga berlatarbelakang pada berakhirnya jaman es di sekitar awal Holesen, hingga menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan, tidak terbatas di Indonesia dan kawasan sekitarnya, tetapi juga dalam lingkup global. Munculnya penutur Austronesia disekitar 4.000 tahun lalu sebagai bagian dari proses penggolongan kawasan antara Madagaskar di ujung barat dan Pulau Paskah di ujung timur Mikronesia merupakan peristiwa keempat. Peristiwa terakhir terjadi pada jaman protosejarah. Beberapa abad menjelang Masehi, yang ditandai dengan keterlibatan Indonesia dalam interaksi luar dengan seiring dengan keterlibatan Indonesia dalam interaksi luar seiring dengan semakin maraknya pelayaran dan perdagangan insular. Regional, dan bahkan global.

Di Indonesia periode prasejarah berakhir setelah ditemukan bukti telah mengenal tulisan pada abad IV yang ditandai dengan tulisan pada Prasasti yupa dari kerajaan Kutai, di Kalimantan Timur. Sebelum mengakhiri prasejarahnya, Indonesia menjelang tahun masehi hingga sekitar abad IV memasuki zaman protosejarah. Pada masa itu tulisan-tulisan serta berita asing tentang Indonesia telah ada, seperti misalnya sumber-sumber berita dari India dan berita dari Cina. Periode perotosejarah ditandai dengan dibeberapa wilayah di Indonesia mulai marah hubungan dengan masyarakat di LUr Nusantara khususnya dalam hal perdagangan.³⁷

Sejarah Pada Masa Klasik

Zaman Klasik adalah kurun waktu abad ke-8 Pra-Masehi sampai abad ke-6 Tarikh Masehi dalam sejarah peradaban kawasan Laut Tengah, teristimewa peradaban Yunani Kuno dan peradaban Romawi Kuno, dua serangkai yang lazim disebut Dunia Yunani-Romawi. Pada kurun waktu inilah masyarakat Yunani-Romawi berkembang dan meluaskan pengaruhnya ke seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat.

³⁷ Arfan Diasnyah, Flores Tanjung, dan Abdul Haris N, *Prasejarah Indonesia*, Kita Menulis, 2019 ,3-4

Parthenon, contoh karya budaya Yunani Kuno, salah satu ikon Zaman Klasik yang paling terkenal. Zaman Klasik sudah jamak dianggap bermula pada masa penulisan naskah tertua yang memuat syair-syair gubahan Homeros dalam bahasa Yunani langgam wiracarita (abad ke-8 sampai abad ke-7 SM), masih berlangsung sewaktu agama Kristen naik marak dan Wilayah Barat Kekaisaran Romawi jatuh terpuruk (abad ke-5 M), lantas berakhir manakala kebudayaan Yunani-Romawi meluntur pada penghujung Akhir Abad Kuno (tahun 300–600 M). Rentang sejarah dan bentang wilayah yang sedemikian luas merangkum banyak sekali peradaban dan kurun waktu yang istimewa tiada bandingnya. Istilah "Zaman Klasik" juga mengacu kepada visi muluk orang-orang zaman kemudian tentang apa yang disebut Edgar Allan Poe sebagai "kegemilangan nan dahulu Gerika, dan kemegahan nan dahulu Roma". Istilah lain untuk Zaman Klasik adalah Era Klasik, Abad Klasik, dan Abad Kuno Klasik.

Kebudayaan bangsa Yunani Kuno serta beberapa unsur kebudayaan masyarakat Timur Dekat Kuno mendasari tolok-tolok ukur kesempurnaan di bidang seni rupa, filsafat, tata kemasyarakatan, dan pendidikan Dunia Yunani-Romawi sampai dengan Zaman Kekaisaran Romawi. Bangsa Romawi melestarikan, meniru, dan menyebarkan tolok-tolok ukur kesempurnaan ini ke seluruh Eropa sampai mereka mampu bersaing dengan kebudayaan Yunani, yakni ketika penggunaan bahasa Latin sudah meluas ke mana-mana, dan Dunia Yunani-Romawi sudah terbiasa bertutur dalam bahasa Yunani sekaligus bahasa Latin. Asas kebudayaan Yunani-Romawi ini sangat besar pengaruhnya terhadap bahasa, politik, hukum, sistem pendidikan, filsafat, ilmu pengetahuan, hal ihwal berperang, seni puisi, historiografi, etika, retorika, seni rupa, dan arsitektur Zaman Modern. Semenjak abad ke-14, suatu gerakan kebangunan kembali berangsur tumbuh di atas sisa-sisa warisan peninggalan Zaman Klasik, yakni gerakan yang kelak disebut Renaisans di Eropa. Gerakan ini kembali mencuat ketika gerakan-gerakan neoklasik marak bermunculan pada abad ke-18 dan ke-19.

Selain itu, Penulisan sejarah Islam biasanya diklasifikasikan menjadi periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik identic dengan masa kejayaan Islam. Pada saat dunia Islam mengalami kemajuan pesat, kondisi dunia barat sebaliknya. Tetapi orang-orang barat akhirnya mampu mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat Muslim. Kesempatan itu memang sangat besar

karena pemerintahan Islam terkenal sebagai pemerintah yang sangat toleran terhadap para penganut agama selain Islam. Sikap toleran itulah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW selama memimpin umat Islam. Pimpinan-pimpinan berikutnya juga sangat toleran. Misalnya, Khalifah ibn al-Khattab ketika menguasai Bityl Maqdis, atau para pemimpin lainnya, baik dikawasan Islam timur maupun Barat.³⁸

Sejarah Pada Masa Kolonial

Kondisi Bangsa Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1934-1942 Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan letaknya yang sangat strategis. Dan Bangsa-bangsa di dunia tertarik untuk menguasai Indonesia, terutama bangsa-bangsa Barat diantaranya Belanda yang ingin sekali menguasai Indonesia. Pengaruh kolonialisme bangsa asing terutama Belanda telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 sampai awal abad ke-20 yang membawa banyak pengaruh dalam perubahan dan pembentukan stratifikasi sosial masyarakat Indonesia. Yang semula lebih ditentukan oleh kriteria pemilikan tanah pertanian dan kedudukan untuk mempertahankan kekuasaannya.³⁹

Kedudukan negara Indonesia di waktu zaman Belanda membuat bangsa Indonesia lebih menderita.⁴⁰ Pemerintah kolonial Belanda yang membuat bangsa Indonesia menderita diantaranya menerapkan sebuah kebijakan politik segregasi terhadap penduduk jajahannya. Politik segregasi adalah sebuah kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk membuat kelas-kelas sosial dalam penduduk jajahannya yang berdasarkan ras dan agama yang membagi penduduk menjadi tiga golongan yaitu kelas paling rendah adalah Inheemschen (atau Inlander), untuk bumi putra atau pribumi; di atasnya adalah Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) yang

³⁸ Ahmad Chiril R. *Sejarah Islam Periode Klasik*. Malang: Gunung Samudra, 2017. Hlm2.

³⁹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, (Bandung: PT.Salamadani Pustaka Semesta, 2009.)hlm. 453

⁴⁰ S.J. Rutgers. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* ,(Yogyakarta:Ombak Anggota IKAPI, 2012)hlm. 103

meliputi suku Arab ,Tionghoa, India dan lain sebagainya dan yang paling tinggi adalah golongan warga kulit putih yaitu Eropa, Amerika, Jepang.⁴¹ Pada awal abad ke 20 Ratu Belanda Wilhelmania membuat pengumuman pada pidatonya bahwa kebijakan baru yaitu politik Etins akan diterapkan Di Hindia Belanda. Politik Etnis ini merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang 2 S.J. Rutgers. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia.Cara mencapai standar kehidupan pendudukan asli adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan Ekonomi, dipromosikan dengan slogan Irigasi, Pendidikan, dan Emigrasi. Namun pendekatan ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam meningkatkan standar kehidupan penduduk asli.Kebijakan Politik Etnis yang diterapkan pemerintah klonial pada masyarakat Indonesia, menyebabkan efek samping yang besar.

Komponen pendidikan dalam politik ini berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi masyarakat Indonesia untuk mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap Pemerintah Kolonial. Politik Etnis memberikan kesempatan, untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kebebasan dan demokrasi. Dengan diberlakukannya kebijakan politik etis dari pemerintah kolonial di Hindia Belanda Ahmad Mansur Suryanegara. Dari pendidikan ini kemudian menghasilkan para pemuda pelajar Indonesia yang berhasil menyusun suatu konsep nasionalisme Indonesia dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.5 Peristiwa ini dapat dimaknai sebagai momentum awal dari bulatnya tekad para pemuda Indonesia untuk mengakhiri masa ketertindasan yang telah berjalan selama beratus-ratus tahun dibawah kekuasaan kaum kolonialis saat itu. Keadaan sosial ekonomi bangsa Indonesia pada tahun 1930-1942 ditandai oleh satu perkembangan yang pesat sekali dalam bidang perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan. Hasilnya tidak ada taranya dalam sejarah Indonesia, dan boleh dikatakan sangat meningkat sehingga mendorong ekspor serta menarik berbagai negara antara lain Amerika Serikat dan Jepang. Tepatlah apabila dikatakan bahwa Indonesia terbuka lebar bagi lalu lintas dunia.

⁴¹ Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993)hlm. 231

Perkembangan peroses produksi sangat cepat dengan hasil yang bertambah besar serta upah yang sangat rendah, memerlukan penyesuaian tidak hanya terhadap evolusi dari dunia luar Hindia Belanda tetapi juga terhadap hak-hak asasi penduduk peribumi Pemerintah kolonial terlalu didasarkan atas kekuasaan dan kurang memperhatikan. Kepentingan rakyat terlalu diabaikan, Sementara politik terlalu ditentukan oleh pihak penguasa serta terlalu terarah pada kepentingan dan menuntut sementara ukuran Barat. Seharusnya Indonesia sendirilah yang menjadi pusat politik kolonial Belanda.⁸ Dengan perkembagan yang sangat pesat dari perusahaan-perusahaan, lebih banyak orang belanda datang ke Indonesia. Yang mencolok adalah mereka lebih memberikan ke belandaanya serta lebih mengutamakan keuntungan yang hendak dikumpulkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kadaan seperti ini secara mendadak berubah karena Hindia belanda terseret kedalam krisis ekonomi yang merajalela diseluru dunia. Krisis ekonomi ini yang berakibat diberlakukanya kebijakan proteksi secara menyeluruh Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional...p.64 69 di tambah dengan harga-harga, yang menurun dan Indonesia masuk kedalam suatu krisis Ekonomi yang tak pernah sepenuhnya teratasi sebelum penaklukan oleh bangsa Jepang pada tahun 1942. Sebagai negeri yang lama banyak mengekspor, Hindia Belanda sangat terpukul. Lebih-lebih karena beberapa tahun tidak mau melepaskan standar emasnya.

Dampak ini berakibat pada penurunan upah dan pemecatan secara besar-besaran yang ujungujungnya membawa penderitaan berat bagi rakyat .Kondisi ini semakin mempertajam garis pemisah antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia, Golongan-golongan politik Indonesia mulai memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia dalam suatu negara yang merdeka. Garis-garis pemisah kedua bangsa bertambah tajam dan perasaan kaum pribumi yang dibedakan serta dibelakangkan. Kepentingan- kepentingan menjadi dasar kukuh kehidupan kolonialisme. Pada Tahun 1931-1936 Gubernur Jenderal de Jonge membuka halaman baru dalam politik kolonial di Indonesia, tindakan Gubernur Jendral de Jonge bersifat sangat reaksioner disebabkan oleh kerisis ekonomi (malaise) yang melanda dunia termasuk

Indonesia. Gubernur Jendral de Jonge membatasi terhadap pergerakan nasional, beberapa peraturan mengenai larangan untuk berkumpul. Dengan demikian apa artinya partai atau organisasi jika tidak dapat mengumpulkan anggotanya selain itu Gubernur Jendral de Jonge memberi hukuman bagi pegawai yang menggabungkan diri pada kegiatan nasionalis yang radikal. Politik menindas juga diterapkan terhadap partai-partai yang bersikap nonkoperatif. Pada Tahun 1934 para tokoh-tokoh nasional di tangkap oleh pemerintah dkolonial Belanda dengan tuduhan menghasut untuk mengadakan pemembrontakan. Salah satunya penangkapan terhadap tokoh PNI yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial tanggal 25 Januari 1934 Drs. Mohamad Hatta bersama dengan 11Sagimun M.D, Perlawanan dan pengasingan pergerakan...p59 71 Bondan, Sutan Syahrir di tangkap di Jakarta dan dimasukkan kedalam penjara Glodok. Pada Waktu bersamaan di Bandung juga dilakukan penangkapan terhadap tokoh PNI diantaranya Maskun Bahrudin, dan Marwoto. Mereka dimasukkan kedalam penjara Sukamiskin. Kemudian berdasarkan perintah Gubernur Hindia Belanda tanggal 16 November Mohamad Hatta dan kaawan-kawan di putuskan untuk diasingkan ke Digul. Sebelumnya Ir.Soekarno diasingkan terlebih dahulu ke Digul. Pada awal Januari 1935 Drs. Mohamad Hatta dan kawan-kawan berangkat ke Digul.

Dengan melalui Makasar dan Ambon, maka pada tanggal 20 Maret 1935 sampailah Hatta dan rombongan ke Digul.Kemudian atas keputusan Pemerintah Kolonial Belanda Hatta dan Syahrir pada tanggal 11 Februari 1936 dipindahkan ke Bandaneira. Sebelumnya di Bandaneira juga telah dilakukan pembuangan terhadap tokoh pergerakan nasional Cipto mangunkusumo. Sesudah di tahan beberapa lama Dr. Cipto mangunkusumo di Bandaneira maka pada tahun 1940 di Sagimun M.D, pada tanggal 1942 Hatta dan Syahrirpun di pindahkan di Jakarta. Penangkapan dan pembuangan terhadap pemimpinpemimpin terkemuka pergerakan nasional mulai dilakukan oleh pemerintah kolonial pada tahu 1933. Pembuangan terbanyak adalah ke Digul yang umumnya terdiri dari tokoh PNI-Baru, PARI, PSII, PERMI dan PARTINDO. Hampir seluruh pemimpin terkemuka pergerakan telah ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keadaan ini berlangsung sampai saat terakhir berkuasanya pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. 14 Pada Tahun 1941 Jepang berperang melawan beberapa Negara, Namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris,

dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara.

Tujuan Jepang menyerang dan menduduki India Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam terutama Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang Paerl Harbor, Hongkong Filipina, dan Malaysia. Negeri Belanda segera mengikuti jejak sekutu-sekutunya dengan menyatakan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 10 Januari 1942, penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai pada Tanggal 15 Februari, Pangkalan Inggris di Singapura, yang menurut dugaan tidak terkalahkan, menyerah dan pada akhir bulan itu bala tentara Jepang menghancurkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia dan Amerika dalam pertempuran di laut Jawa pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan gubernur Jendral van Starckenborgh Stachower di tawan oleh pihak Jepang. Karena peristiwa itu akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yang diberi nama perjanjian kalijati yang merupakan upaya diplomasi yang dilakukan Belanda akibat kekalahan terhadap Jepang.

Sejarah Pada Masa Perang Kemerdekaan

1. Pertempuran Surabaya

Pasukan sekutu pimpinan Mallaby mendarat di Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kehadiran pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI ini menimbulkan kecurigaan tentara dan para pemuda, bahwa kedatangannya diboncengi oleh NICA. Ternyata dugaan mereka benar dan bahkan banyak tawanan Belanda yang dibebaskan, dan mereka hanya melucuti tentara Jepang saja. Akhirnya pada tanggal 27 Oktober 1945 pertempuran tidak dapat dihindarkan antara pasukan sekutu dengan para pejuang bangsa Indonesia. Dalam pertempuran yang terus menjalar ke seluruh kota, mengakibatkan tewasnya Brigjen Mallaby. Pasukan sekutu kemudian mengutus Mayjen Mansergh untuk membalas kematian Mallaby. Tanggal 10 November Surabaya diserang baik dari darat, laut maupun udara oleh pasukan sekutu. Namun para pejuang terus berusaha mempertahankan kota itu sampai hampir saja tiga minggu lamanya.

Tetapi karena kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya Surabaya dikuasai oleh sekutu. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebani Waras, yang dikenal dengan nama Markas Kali, untuk terus melakukan perjuangan meskipun dengan kekuatan yang sangat kecil.⁴²

2. Pertempuran di Ambarawa

Pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945, terjadi pertempuran sengit di Ambarawa antara pemuda Indonesia dengan TKR melawan pasukan Inggris. Peristiwa ini dipicu ketika pasukan sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945, mereka diperbolehkan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Sekutu ternyata diboncengi tentara NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Hal ini tidak dapat diterima oleh para pemuda dan TKR sehingga mengakibatkan Insiden Magelang yang kemudian mendorong Pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu terdesak dan akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang.⁴³

3. Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen TED Kelly mendarat di Sumatera Utara. Disinipun pasukan Sekutu diboncengi orang-orang NICA. Dalam rangka menghormati pasukan Sekutu, pemerintah RI diperkenankan menempati beberapa hotel di kota Medan. Sebagian mereka ditempatkan di Binjai dan Tanjung Manawa. Mereka kemudian membebaskan para tawanan perang dan bahkan mempersenjatainya. Ternyata orang-orang NICA dan kelompok tawanan yang dibebaskan diberi senjata dan dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sikap orang-orang Belanda yang congkak menimbulkan rasa tidak senang dikalangan para pemuda dan TKR. Hal ini lebih dipertajam lagi ketika mereka dibentuk menjadi “Medan Batalyon KNIL”. Faktor

⁴² Theorina, V. (2007b). Pertempuran 10 November 1945 Di Surabaya (Issue November 1945) [Universitas Sanata Dharma]. Repository.usd.ac.id

⁴³ Suparti, Oni, U.F., & Asmara, A. (2018). Ambarawa Kota Perjuangan : Jejak-Jejak Heroisme Mempertahankan Kemerdekaan. Kabupaten Semarang : MGMP Sejarah Kabupaten Semarang.

inilah yang memicu timbulnya berbagai pertempuran pada tanggal 13 Oktober 1945.

Pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaris Medan Area di berbagai sudut kota di Medan. Tindakan ini semakin membakar semangat para pemuda dan TKR. Pada tanggal 10 Desember 1945 berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepas akan tetapi berhasil digagalkan.

Di Tebing Tinggi pada tanggal 10 Agustus 1946 setelah Sekutu menguasai kota Medan, diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang markasnya dipusatkan di Sudi Mengerti (Trepes). Dari sinilah para pejuang yang tergabung dalam resimen ini meneruskan perjuangan di Medan Area.

4. Peristiwa Bandung Lautan Api

Seperti halnya di kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung juga aksi perjuangan melawan sekutu berlangsung. Pasukan sekutu menduduki Bandung sejak bulan Oktober 1945. Para pemuda dan TKR juga berusaha melucuti tentara Jepang dan merebut senjatanya. Pasukan sekutu menyerukan bahwa para pemuda harus menyerahkan senjata hasil rampasan. Sekutu juga memerintahkan agar TKR meninggalkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 1945. Namun maklumat ini tidak diindahkan oleh TKR pimpinan Aruji Kartawinata, bahkan melakukan penyerangan-penyerangan terhadap markas sekutu.

Maklumat pertama tidak diindahkan, Sekutu kemudian mengeluarkan maklumat yang kedua bahwa TKR yang saat itu namanya diganti menjadi TRI harus meninggalkan kota Bandung. Atas berkat maklumat Markas Besar TRI di Yogyakarta perlahan-lahan TRI meninggalkan kota Bandung sambil melakukan sabotase dan penyerangan terhadap markas Sekutu di kota Bandung. Serangan-serangan ini menimbulkan kebakaran-kebakaran sehingga Bandung

Selatan dibumihanguskan. Peristiwa inilah yang kerap kali dikenal sebagai Bandung Lautan Api.⁴⁴

5. Peristiwa 5 Hari di Semarang

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada 17 Agustus 1945, masih cukup banyak prajurit Jepang yang belum bisa pulang ke negaranya. Tidak sedikit serdadu Jepang yang dipekerjakan, misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain. Seiring dengan itu, pasukan Sekutu, termasuk Belanda, mulai datang ke Indonesia dengan maksud melucuti senjata dan memulangkan para mantan tentara Jepang yang masih tersisa. Latar Belakang penyebab terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya dr. Karyadi. Dokter Karyadi tewas ditembak oleh tentara Jepang saat akan melaksanakan tugas untuk memeriksa Reservoir Siranda di Candi Lama, salah satu sumber mata air di Kota Semarang. Pemeriksaan tersebut berdasarkan berita bahwa Jepang menebarkan racun di mata air tersebut. Akibatnya, rakyat Semarang semakin marah dan melakukan serangan balasan kepada tentara Jepang.

Upaya penentangan dari para mantan prajurit Jepang mulai terlihat di Semarang. Mereka bergerak melakukan perlawanan dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang yang ditawan. Pertempuran Lima Hari di Semarang dimulai sejak 15 hingga 20 Oktober 1945. Pada dini hari tanggal 15 Oktober, kurang lebih 2.000 orang dari Kidobutai mendatangi Kota Semarang.⁴⁵ Kedatangan mereka ternyata disambut oleh angkatan muda Semarang dengan dukungan TKR. Pertempuran pun terjadi selama lima hari antara kedua pihak. Ternyata, Kidobutai juga didampingi oleh pasukan Jepang lain di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Perang ini terjadi di empat titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu (Simpang Lima). Lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama adalah di Simpang Lima atau yang kini disebut daerah Tugu Muda. Agar pertikaian tidak berlarut-larut, maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono mewakili Indonesia, sedangkan dari Jepang hadir Letnan

⁴⁴ R.W. Smail, John. 2011. Bandung Awal Revolusi. Jakarta: KA Bandung

⁴⁵ Ahmad Muslih dan kawan-kawan dalam buku ajar Ilmu Pengetahuan Sosial (2015:189)

Kolonel Nomura, Komandan Tentara Dai Nippon. Selain itu, ada pula perwakilan dari pihak Sekutu yakni Brigadir Jenderal Bethel. Perdamaian antara kedua belah pihak pun terjadi. Pada 20 Oktober 1945, pihak Sekutu melucuti seluruh persenjataan para tentara Jepang. Peristiwa Pertempuran Lima Hari kemudian dikenang dengan pembangunan Tugu Muda di Simpang Lima, Kota Semarang.⁴⁶

6. Serangan Umum 1 Maret 1949

Perlawanan rakyat Indonesia sampai hengkangnya Belanda dari bumi Indonesia terus beralngsung baik di Jawa maupun luar Jawa. Beberapa pertempuran sengit terjadi antara pasukan Indonesia melawan Sekutu ataupun melawan Belanda. Perlawanan lain misalnya terjadi di Bali, Manado, Biak, dan Kalimantan. Dalam hal perjuangan ini, peristiwa besar yang patut dicatat dalam sejarah perjuangan adalah peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Setelah dua kali Belanda melakukan Agresi Militer, yakni tahun 1947 dan 1949, Belanda merasa bahwa pemerintahan Indonesia telah lumpuh, yang ada hanyalah kekuatan Belanda. Belanda mengklaim bahwa TNI telah kalah dan mundur ke hutan-hutan melakukan gerilya. Dugaan ini ternyata meleset karena pada tanggal 1 Maret 1949 TNI melakukan serangkaian serangan yang dipersiapkan dengan rapih. Insiden ini kemudian dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret 1949.

Serangan terorganisir ini dilakukan oleh TNI dibawah komando Letkol Soeharto. Serangan dilakukan dalam 5 sektor yakni sektor Utara yang dipimpin oleh Mayor Kusno, sektor Barat Letkol Ventje Samual, sektor Selatan dan Timur oleh Mayor Sarjono, dan kota dipimpin oleh Letnan Amir.⁴⁷ Serangan dimulai pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB dan berhasil memporakporandakan tentara Belanda dan memaksanya untuk keluar dari Yogyakarta. Namun pasukan TNI yang berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam segera keluar dari kota Yogyakarta sebelum pasukan Belanda yang lebihh besar kembali. Peristiwa ini dampaknya cukup besar dalam

⁴⁶ Monumen Perjuangan: Volume 2 (2008)

⁴⁷ Ibid., hlm. 52

rangka membakar semangat TNI diwilayah lain yang juga berhadapan dengan Agresi Militer Belanda. Adapun keberhasilan dari serangan ini tidak terlepas dari peran penting Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberi peluang kepada TNI untuk bergerak bebas menyusup di dalam kota Yogyakarta.

Sejarah Orde Lama dan Orde Baru

1. Runtuhnya Orde Lama

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Namun selama dekrit itu berlaku dan menandai diterapkannya sistem Demokrasi Terpimpin, dalam pelaksanaannya masih banyak ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang tidak dilaksanakan menurut aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah telah menafsirkan salah bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya Indonesia yakni UUD 1945.

Dapat dilihat dalam bidang ketatanegaraan, banyak ditumbuhkan lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan jiwa dan bunyi UUD 1945. Lembaga-lembaga ketatanegaraan yang ada dan waktu itu masih bersifat sementara saja, tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan. Lembaga-lembaga tersebut tidak memperoleh penempatan yang semestinya. Dalam kondisi yang demikian, sangat memberi peluang kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk menjalankan peranan-peranan yang dapat merugikan jalannya pemerintahan negara.

Dalam bidang politik, Demokrasi Terpimpin telah menarik berbagai pihak untuk bergelut dalam pemerintahan, sehingga berakibat pada situasi politik yang tidak stabil. Tampilnya PKI dalam pemerintahan, memunculkan kecumburuan dan kekhawatiran banyak kalangan. Dalam situasi demikian, tampilnya kekuatan politik Angkatan Darat tidak dapat dihindarkan. Akhirnya kekacauan politik memuncak dengan meletusnya Gestapu 1965, yang telah mendorong runtuhnya pemerintahan Soekarno.

2. Munculnya Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)

Dalam keadaan yang serba kacau, akhirnya berdampak pada semakin buruknya situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Muncullah aksi-aksi yang menuntut dituntaskannya peristiwa Gestapu. Aksi tersebut dipelopori Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia

(KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPI), kemudian (KPPI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI). Akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1965 kesatuan-kesatuan aksi ini membentuk suatu front bersama yang dikenal dengan Front Pancasila.

Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, telah mendorong semakin bertambahnya perpecahan yang menjurus ke arah konflik politik. Gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin meluas sejak terbentuknya Front Pancasila. Mereka kemudian mengajukan tuntutan kepada pemerintah yang dikenal dengan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat atau lebih dikenal dengan Tiga Tuntutan Rakyat (TRITURA). Tuntuntutan ini diajukan kepada pemerintah oleh Front Pancasila dengan mendatangi gedung DPR-GR pada tanggal 12 Januari 1966 dengan mengajukan tiga buah tuntutan rakyat (Tritura). Adapun isi dari Tritura itu adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan kembali secara murni dan konsekuen UUD 1945
- b. Pembubaran Partai Komunis Indonesia
- c. Penurunan harga barang-barang.

Menanggapi tuntutan tersebut, presiden Soekarno semakin kehilangan arah kepemimpinan. Wibawa pemerintah semakin merosot. Terlebih lagi manakala AD dengan RPKAD-nya mendukung aksi-aksi demonstrasi tersebut. Presiden kemudian mereshuffle Kabinet Dwikora pada tanggal 21 Februari 1966, dan diberi nama Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Namun tindakan tersebut justru semakin memperbesar kekecawaan rakyat terhadap presiden. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang-orang komunis atau pro PKI yang masuk dalam jajaran kabinet. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah mengabaikan Tritura.

Untuk menandingi aksi Tritura, presiden Soekarno juga telah membentuk Barisan Soekarno. Hampir semua golongan termasuk beberapa anggota Dewan Mahasiswa (Universitas Indonesia) menyatakan dukungannya. Akan tetapi ABRI menolak pembentukan Barisan Soekarno secara formal. Tanggal 18 Januari kemudian ABRI mengumumkan larangan terhadap pembentukan Barisan

Soekarno yang diikuti oleh daerah-daerah. Setelah gagalnya pembentukan Barisan Soekarno, presiden kemudian memberi komando kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyusun Barisan Pembela Pemimpin Besar Revolusi. Namun komando ini juga tidak membuahkan hasil, malah justru menambah panasnya situasi politik dan pemerintahan.

Pada hari pelantikan kabinet baru tanggal 24 Februari 1966, para demonstran yang dipelopori oleh KAMI berusaha menghalangi dan menggagalkan upacara pelantikan. Para demonstran melakukan aksi serentak memblokir jalan-jalan dan mengempeskan ban-ban mobil sehingga lalu lintas lumpuh. Aksi ini berdampak pada bentrokan yang tidak dapat dihindarkan didepan istana. Dalam bentrokan ini gugur seorang demonstran Arief Rachman Hakim, mahasiswa UI karena tertembak oleh Pasukan Cakrabirawa.

Aksi-aksi demonstrasi tersebut menimbulkan kemarahan presiden Soekarno. Kemudian pada tanggal 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI. Tetapi tindakan ini juga tidak mampu meredam aksi-aksi demonstrasi, melinkan justru semakin menambah merosotnya wibawa presiden. Mantan anggota KAMI kemudian bergabung dengan KPPI membentuk Resimen Arief Rachman Hakim dibawah lindungan ABRI. Mereka menamakan dirinya Angkatan 66.⁴⁸

3. Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)

Pada tanggal 10 Maret 1966, presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan memanggil Front Pancasila, Partindo dan PNI serta wakil-wakil partai. Dalam pertemuan itu presiden menekankan agar partai politik dan organisasi masa mengutuk demonstrasi Tritura. Dalam pertemuan ini Front Pancasila tidak mau mengutuk demonstrasi Trirura. Mereka tetap menuntut agar PKI segera dibubarkan. Akhirnya pertemuan ini tidak membuahkan hasil, dan tuntutan Front Pancasila agar PKI dibubarkan tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Pada tanggal 11 Maret 1966, pemerintah menyelenggarakan sidang kabinet untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi krisis yang semakin memuncak. Akan tetapi sidang terhenti karena presiden

⁴⁸ Kentli, Fulya Damla.2009. Comparison of Hidden Curriculum Theories'.
Dalam European Journal of Educational Studies 1(2), hal 83-88

diberi tahu oleh Brigjend Subur, Komandan Cakrabirawa, bahwa sidang akan dikacau oleh kekuatan sosial-politik yang menentangnya. Presiden kemudian meninggalkan sidang diikuti oleh Soebandrio dan Chairul Saleh terbang dengan helikopter menuju Bogor. Sidang kemudian ditutup oleh Dr. J. Leimena dan langsung menyusul ke Bogor dengan menggunakan mobil.

Dalam keadaan yang demikian, pimpinan AD menawarkan jasa untuk memulihkan keadaan agar pemerintah tidak terganggu. Jenderal Soeharto kemudian mengutus tiga Jenderal yakni M. Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rachmad untuk menemui presiden di Istana Bogor dan menyampaikan tawaran untuk memulihkan keadaan. Pesan Soeharto berpesan kepada tiga jenderal itu adalah bahwa dirinya siap dan sanggup untuk mengatasi keadaan yang senakin memburuk. Pertemuan tiga Jenderal dengan presiden Soekarno ini menghasilkan keluarnya keputusan presiden yang berupa Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau Supersemar. Isinya berupa surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan bahaya. Keluarnya Supersemar ini telah mengakibatkan adanya dualisme kepemimpinan dan menandai mulai tampilnya Orde Soeharto atau Orde baru.

4. Tampilnya Orde Baru

Supersemar adalah tonggak sejarah lahirnya Orde Baru atau kepemimpinan Soeharto. Dengan keluarnya Supersemar, Presiden Soekarno sudah kehilangan sebagian besar kekuasaannya. Jenderal Soeharto yang diberi wewenang untuk mengatasi keadaan bahaya melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.

5. Pembubaran PKI

Pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto mengeluarkan keputusan No. 1/3/1966 tentang pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Pembubaran PKI adalah tuntutan rakyat sebagaimana

tertuang dalam Tritura. Supersemar telah menjadi senjata yang ampuh untuk membubarkan PKI yang selama itu berseteru dengan AD.⁴⁹

6. Membersihkan Kabinet dari Unsur PKI

Melalui pengumuman Presiden No.5 tanggal 18 Maret 1966 yang tertanda Jenderal Soeharto atas nama presiden dilakukan penangkapan beberapa menteri Kabinet Dwikora yang dianggap tersangkut dengan PKI. Diantara para menteri yang ditangkap terdapat pula menteri luar negeri Dr. Subandrio.

7. Penataan Lembaga-Lembaga Pemerintahan

Tindakan ini dimaksudkan untuk menertibkan kembali fungsi-fungsi lembaga pemerintahan dan kehidupan sosial yang diharapkan. Untuk mewujudkan tujuan ini, AD melancarkan gerakan kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Langkah selanjutnya adalah menata MPRS dengan membersihkan anggotanya dari unsur-unsur PKI. Setelah dilakukan penataan terhadap MPRS, lembaga tertinggi ini melakukan sidangnya yang ke IV yakni dari tanggal 20 Juni-5 Juli 1966. Sidang ini dipimpin oleh Jenderal A.N. Nasution, dan menghasilkan ketetapan-ketetapan penting yang diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Tap. No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan Supersemar.
- b. Tap. No. XII/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia.
- c. Tap. No. XIII/MPRS/1966 tentang pemberian wewenang kepada Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera.
- d. Tap. No. XVIII/MPRS/1966 tentang pencabutan Tap. No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
- e. Tap. No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan setiap untuk menyebarkan ajaran komunis-marxisme-leninisme.

Dengan dikukuhkannya Supersemar dalam ketetapan MPRS, maka presiden Soekarno tidak dapat mencabutnya, melainkan justru sebaliknya dituntut untuk mendukungnya.

8. Pembentukan Kabinet Ampera

⁴⁹ Edman, Peter. 2015. Komunisme ala Aidit, kisah partai komunis Indonesia dibawah kepemimpinan D.N Aidit 1950-1965. Yogyakarta: PT. Buku Seru

Berdasarkan pada kekuatan Tap. No. XIII/MPRS/1966, maka Jenderal Soeharto kemudian membentuk Kabinet Ampera. Kabinet ini diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Dengan demikian, dualisme kepemimpinan tidak dapat dihindarkan. Terdapat tiga tokoh utama dalam kabinet ini adalah Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Adam Malik. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah melaksanakan Dwi Dharma dan programnya Catur Karya. Dwi Dharma adalah menciptakan:

- a. Kestabilan politik, dan
- b. Kestabilan ekonomi.⁵⁰

Sedangkan program Catur Karya adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan pangan dan sandang
- b. Menyelenggarakan Pemilu
- c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, dan
- d. Meneruskan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme

Pada sidang umum MPRS 1966, presiden Soekarno selaku mandataris MPRS diminta untuk memberi pertanggungjawaban atas peristiwa-peristiwa nasional selama Demokrasi Terpimpin khususnya masalah peristiwa Gestapu dan kebangkrutan ekonomi. Pada tanggal 22 Juni 1966 presiden menyampaikan pidato pertanggungjawaban dihadapan sidang MPRS yang diberi judul Nawaksara. Sidang MPRS tidak puas dengan pidato presiden karena pidato yang panjang lebar itu sama sekali tidak menyebut-nyebut masalah Gestapu. Oleh sebab itu MPRS meminta kepada presiden untuk melengkapi pidatonya yang berjudul Nawaksara itu.

Pada tanggal 10 Januari 1967, presiden melengkapi pidato Nawaksara pertanggungjawabannya. Namun isinya tidak memuaskan berbagai kalangan. Kemudian pada tanggal 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar menggelar

⁵⁰ Luiten, Jan van Zanden & Daan Marks. (2012). *Ekonomi Indonesia, 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara dan KITLV Jakarta, terjemahan Abdul Wahid.

Sidang Istimewa. Melihat situasi yang sudah tak terkendali, akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno melimpahkan kekuasaan pemerintahan negara kepada Jenderal Soeharto sebagai pemegang Supersemar. Meskipun Presiden Soekarno sudah menyerahkan kekuasaan, namun MPRS tetap menggelar Sidang Istimewa pada tanggal 22 Februari 1967. Dalam sidang tersebut, MPRS mengeluarkan Ketetapan yakni Tap. MPR No. XXXIII/MPRS/1967 yang isinya sebagai berikut.

- a. Mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno.
- b. Presiden Soekarno tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik sampai diselenggarakannya Pemilu.
- c. Mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

Rangkuman

Konsep waktu terbagi menjadi tiga, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lampau. Akan tetapi, konsep waktu pada masa lampau ini juga memengaruhi peristiwa pada masa kini. Sebagai contoh, pada masa lampau Republik Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan (NKRI) dengan pertimbangan kemajemukan sosial dan adanya ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keputusan pemerintah tetap bertahan sampai sekarang. Oleh sebab itu, keputusan pemerintah pada masa lampau berpengaruh terhadap perkembangan negara pada masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam antropologi dinamika kebudayaan berlangsung dalam beberapa proses berikut: Evolusi Kebudayaan, Difusi, Akulturasi, Asimilasi, Inovasi. Batas antara zaman pra-sejarah dengan zaman sejarah adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa pra-sejarah adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Berakhirnya zaman pra-sejarah atau dimulainya zaman sejarah untuk setiap bangsa di dunia tidak sama tergantung dari peradaban bangsa tersebut.

Zaman Klasik adalah kurun waktu abad ke-8 Pra-Masehi sampai abad ke-6 Tarikh Masehi dalam sejarah peradaban kawasan Laut Tengah, teristimewa peradaban Yunani Kuno dan peradaban Romawi Kuno, dua serangkai yang lazim disebut Dunia Yunani-Romawi. Pada kurun waktu inilah masyarakat Yunani-Romawi berkembang dan meluaskan pengaruhnya ke seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Pada

tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945, terjadi pertempuran sengit di Ambarawa antara pemuda Indonesia dengan TKR melawan pasukan Inggris.

Referensi

- Yulia Siska.(2016).*Buku Konsep Dasar IPS untuk SD/MI*.
- Koentjaraningrat. 1999. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Aksara Baru.
- R. Sukmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I, (Jakarta: Kanisius, 1990).
- Renfrew & Bahn, “Where? Survey and Excavation of Sites and Features”, dalam *Archaeology: Theories, Methods and Practice* (5th ed.), (London: Thames & Hudson, 2008)
- Arfan Diasnyah, Flores Tanjung, dan Abdul Haris N, *Prasejarah Indonesia*, Kita Menulis, 2019 ,3-4
- Ahmad Chiril R. *Sejarah Islam Periode Klasik. Malang: Gunung Samudra, 2017. Hlm2.*
- Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, (Bandung: PT.Salamadani Pustaka Semesta, 2009.)hlm. 453
- S.J. Rutgers. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (Yogyakarta:Ombak Anggota IKAPI, 2012)hlm. 103
- Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993)hlm. 231
- Theorina, V. (2007b). *Pertempuran 10 November 1945 Di Surabaya* (Issue November 1945) [Universitas Sanata Dharma].
Repository.usd.ac.id
- Suparti, Oni, U.F., & Asmara, A. (2018). *Ambarawa Kota Perjuangan : Jejak-Jejak Heroisme Mempertahankan Kemerdekaan*. Kabupaten Semarang : MGMP Sejarah Kabupaten Semarang.
- R.W. Smail, John. 2011. *Bandung Awal Revolusi*. Jakarta: KA Bandung
- Ahmad Muslih dan kawan-kawan dalam buku ajar Ilmu Pengetahuan Sosial (2015:189)

- Kentli, Fulya Damla.2009. Comparison of Hidden Curriculum Theories!. Dalam *European Journal of Educational Studies* 1(2), hal 83-88
- Edman, Peter. 2015. Komunisme ala Aidit, kisah partai komunis Indonesia dibawah kepemimpinan D.N Aidit 1950-1965. Yogyakarta: PT. Buku Seru
- Luiten, Jan van Zanden & Daan Marks. (2012). *Ekonomi Indonesia, 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara dan KITLV Jakarta, terjemahan Abdul Wahid.

KEGIATAN BELAJAR 5

Perubahan dan Konflik Sosial

Perilaku Sosial

1. Pengertian Perilaku Sosial

Menurut Rusli Ibrahim Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia.⁵¹ Sebagai bukti bahwa manusia dalam memnuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan diantara satu orang dengan yang lainnya. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat.

Menurut Krech, Crutchfield dan Ballachey dalam Rusli Ibrahim perilaku sosial seseorang itu tampak dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi. Perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain.⁵² Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya dalam melakukan kerja sama, ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar dan selalu mementingkan

⁵¹ Ibrahim Rusli, *Promosi Kesehatan Dengan Pendekatan Teori Prilaku, Media, Dan Aplikasinya*. (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.)

⁵² Baron & Byrne. *Social Psychology. sixth edition : Understanding human interaction*. (United States of America : Allyn and Bacon. 1991)

kepentingan bersama diatas kepentingan pribadinya. Sementara di pihak lain, ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran dan hanya ingin mencari untung sendiri.

Sesungguhnya yang menjadi dasar dari uraian di atas adalah bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial.⁵³ Sejak dilahirkan manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memuhi kebutuhan biologisnya. Pada perkembangan menuju kedewasaan, interaksi social diantara manusia dapat merealisasikan kehidupannya secara individual. Hal ini dikarenakan jika tidak ada timbal balik dari interaksi sosial maka manusia tidak dapat merealisasikan potensi-potensinya sebagai sosok individu yang utuh sebagai hasil interaksi sosial. Potensi-potensi itu pada awalnya dapat diketahui dari perilaku kesehariannya.

Pada saat bersosialisasi maka yang ditunjukkannya adalah perilaku sosial. Pembentukan perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pada aspek eksternal situasi sosial memegang peranan yang cukup penting. Situasi sosial diartikan sebagai tiap-tiap situasi di mana terdapat saling hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain.⁵⁴ Dengan kata lain setiap situasi yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial dapatlah dikatakan sebagai situasi sosial. Contoh situasi sosial misalnya di lingkungan pasar, pada saat rapat, atau dalam lingkungan pembelajaran pendidikan jasmani.

2. Faktor-Faktor Pembentuk Perilaku Social

Baron dan Byrne berpendapat bahwa ada kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang, yaitu :⁵⁵

a. Perilaku dan karakteristik orang lain

Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia

⁵³ Gerungan, W.A.. *Psychologi-sosial suatu ringkasan*. (Jakarta: PT Eresco 1978) h.28

⁵⁴ Gerungan, W.A.. *Psychologi-sosial suatu ringkasan*. (Jakarta: PT Eresco 1978) h.77

⁵⁵ Jurnal Ilmiah Mahasiswa. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 192-204 Agustus 2016)

akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku seperti itu. Pada aspek ini guru memegang peranan penting sebagai sosok yang akan dapat mempengaruhi pembentukan perilaku sosial siswa karena ia akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu perbuatan.

b. Proses kognitif

Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Misalnya seorang calon pelatih yang terus berpikir agar kelak dikemudian hari menjadi pelatih yang baik, menjadi idola bagi atletnya dan orang lain akan terus berupaya dan berproses mengembangkan dan memperbaiki dirinya dalam perilaku sosialnya. Contoh lain misalnya seorang siswa karena selalu memperoleh tantangan dan pengalaman sukses dalam pembelajaran penjas maka ia memiliki sikap positif terhadap aktivitas jasmani yang ditunjukkan oleh perilaku sosialnya yang akan mendukung teman-temannya untuk beraktivitas jasmani dengan benar.⁵⁶ Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku sosialnya seolah keras pula, ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut dan halus dalam bertutur kata.⁵⁷

⁵⁶ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.4.

⁵⁷ Malcom Mcfee, “*Social Organization II: Kinship*,” dalam E. Hunter dan Philip Whitten, *The Study of Culture Anthropology* (New York: Harper and Row, 1997), h.124.

- c. Tatar Budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi

Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda. Dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani yang terpenting adalah untuk saling menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap anak.

3. Bentuk Dan Jenis Perilaku Sosial

Bentuk dan perilaku sosial seseorang dapat pula ditunjukkan oleh sikap sosialnya. Sikap menurut Akyas Azhari adalah “suatu cara bereksiterhadap suatu perangsang tertentu.”⁵⁸ Sedangkan sikap sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap obyek sosial yang menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap salah satu obyek sosial.⁵⁹

Berbagai bentuk dan jenis perilaku sosial seseorang pada dasarnya merupakan karakter atau ciri kepribadian yang dapat teramati ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain.⁶⁰ Seperti dalam kehidupan berkelompok, kecenderungan perilaku sosial seseorang yang menjadi anggota kelompok akan terlihat jelas diantara anggota kelompok yang lainnya. Perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antarpribadi, yaitu:⁶¹

1. Kecenderungan Perilaku Peran

- a. Sifat pemberani dan pengecut secara sosial

Orang yang memiliki sifat pemberani secara sosial, biasanya dia suka mempertahankan dan membela haknya, tidak malu-malu

⁵⁸ Akyas Azhari, Psikologi Umum dan Perkembangan. (Jakarta Selatan: Penerbit Teraju. 2004) h. 161

⁵⁹ Gerungan, W.A.. *Psikologi-sosial suatu ringkasan*. (Jakarta: PT Eresco 1978) h151-152

⁶⁰ Ivancevich. *Pembinaan perilaku dan sikap*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta 2008)

⁶¹ *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan (Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 192-204 Agustus 2016)*

atau tidak segan melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai norma di masyarakat dalam mengedepankan kepentingan diri sendiri sekuat tenaga. Sedangkan sifat pengecut menunjukkan perilaku atau keadaan sebaliknya, seperti kurang suka mempertahankan haknya, malu dan segan berbuat untuk mengedepankan kepentingannya.

b. Sifat berkuasa dan sifat patuh

Orang yang memiliki sifat sok berkuasa dalam perilaku sosial biasanya ditunjukkan oleh perilaku seperti bertindak tegas, berorientasi kepada kekuatan, percaya diri, berkemauan keras, suka memberi perintah dan memimpin langsung. Sedangkan sifat yang patuh atau penyerah menunjukkan perilaku sosial yang sebaliknya, misalnya kurang tegas dalam bertindak, tidak suka memberi perintah dan tidak berorientasi kepada kekuatan dan kekerasan.

c. Sifat inisiatif secara sosial dan pasif

Orang yang memiliki sifat inisiatif biasanya suka mengorganisasi kelompok, tidak suka mempersoalkan latar belakang, suka memberi masukan atau saran-saran dalam berbagai pertemuan, dan biasanya suka mengambil alih kepemimpinan.⁶² Sedangkan sifat orang yang pasif secara sosial ditunjukkan oleh perilaku yang bertentangan dengan sifat orang yang aktif, misalnya perilakunya yang dominan diam, kurang berinisiatif, tidak suka memberi saran atau masukan.

d. Sifat mandiri dan tergantung

Seperti yang diungkapkan oleh Marcel Maus, Orang yang memiliki sifat mandiri biasanya membuat segala sesuatunya dilakukan oleh dirinya sendiri, seperti membuat rencana sendiri, melakukan sesuatu dengan cara-cara sendiri, tidak suka berusaha mencari nasihat atau dukungan dari orang lain, dan secara

⁶² Emizal Amri, *Perkembangan Teori Pertukaran, Struktural Fungsional, dan Ekologi Budaya*: (Padang: IKIP, 1997)

emosional cukup stabil.⁶³ Sedangkan sifat orang yang ketergantungan cenderung menunjukkan perilaku sosial sebaliknya dari sifat orang mandiri, misalnya membuat rencana dan melakukan segala sesuatu harus selalu mendapat saran dan dukungan orang lain, dan keadaan emosionalnya relatif labil.

2. Kecenderungan Perilaku Dalam Hubungan Sosial

a. Dapat diterima atau ditolak oleh orang lain

Orang yang memiliki sifat dapat diterima oleh orang lain biasanya tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, loyal, dipercaya, pemaaf dan tulus menghargai kelebihan orang lain. Sementara sifat orang yang ditolak biasanya suka mencari kesalahan dan tidak mengakui kelebihan orang lain.⁶⁴

b. Suka bergaul dan tidak suka bergaul

Orang yang suka bergaul biasanya memiliki hubungan sosial yang baik, senang bersama dengan yang lain dan senang bepergian. Sedangkan orang yang tidak suka bergaul menunjukkan sifat dan perilaku yang sebaliknya.

c. Sifat ramah dan tidak ramah

Orang yang ramah biasanya periang, hangat, terbuka, mudah didekati orang, dan suka bersosialisasi. Sedangkan orang yang tidak ramah cenderung bersifat sebaliknya.⁶⁵

d. Simpatik atau tidak simpatik

Orang yang memiliki sifat simpatik biasanya peduli terhadap perasaan dan keinginan orang lain, murah hati dan suka membela

⁶³ Mauss, Marcel. *Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1992.) h.3-6.

⁶⁴ Mcfee, Malcom. *Social Organization II: Knship*, dalam E. Hunter dan Philip Whitten, *The Study of Culture Anthropology*. (New York: Harper and Row, 1997) h.130.

⁶⁵ Arry H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Tentang Bagaimana Problem Pendidikan*. (Jakarta : PT. Rineka Cita, 2000) h. 35-36.

orang tertindas. Sedangkan orang yang tidak simpatik menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya.

3. Kecenderungan Perilaku Ekspresif
 - a. Sifat suka bersaing (tidak kooperatif) dan tidak suka bersaing (suka bekerjasama). Orang yang suka bersaing biasanya menganggap hubungan sosial sebagai perlombaan, lawan adalah saingan yang harus dikalahkan, memperkaya dirisendiri. Sedangkan orang yang tidak suka bersaing menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya
 - b. Sifat agresif dan tidak agresif. Orang yang agresif biasanya suka menyerang orang lain baik langsung ataupun tidak langsung, pendendam, menentang atau tidak patuh padapenguasa, suka bertengkar dan suka menyangkal. Sifat orang yang tidak agresif menunjukkan perilaku yang sebaliknya.
 - c. Sifat kalem atau tenang secara sosial. Orang yang kalem biasanya tidak nyaman jika berbeda dengan orang lain, mengalami kegugupan, malu, ragu-ragu, dan merasa terganggu jika ditonton orang.
 - d. Sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Orang yang suka pamer biasanya berperilaku berlebihan, suka mencari pengakuan, berperilaku aneh untuk mencari perhatian orang lain.

Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan Sosial

Menurut Selo Sumarjan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan adalah hal yang pasti terjadi pada suatu komunitas masyarakat di tingkat apapun. Suatu tatanan sosial tertentu

tidak berlanjut selama beberapa dekade, katakanlah ratusan tahun atau lebih. Pasti ada beberapa perubahan.⁶⁶

Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan-perubahan, karena tidak ada masyarakat yang bersifat mandek (stagant). Perubahan tersebut ada yang sedikit dan ada juga yang banyak, ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Pengaruh perubahan hanya dapat diketahui oleh seseorang yang sempat mengadakan penelitian susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu, yang kemudian dibandingkan pada suatu waktu lain.

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat adalah perubahan-perubahan norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, susunan kekuasaan dan wewenang.⁶⁷ Setelah terjadi perubahan unsur-unsur sosial, ada sebagian anggota masyarakat yang tidak dapat menyesuaikan antara unsur-unsur sosial yang ada dalam kehidupan sosialnya, sehingga tidak akan terwujud pola kehidupan masyarakat yang serasi. Apabila di dalam masyarakat proses integrasi sosial tidak bekerja dengan baik, dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi dan disintegrasi sosial. Disorganisasi sosial akan mendahului disintegrasi sosial. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan paham mengenai tujuan sosial, sistem norma yang tidak ketat, adanya perilaku menyimpang, dan pengendalian sosial kurang berfungsi, serta sistem tindakan sosial yang kurang berfungsi.⁶⁸

Perubahan dalam norma sosial telah banyak diteliti para pengkaji memiliki hubungan dengan perubahan sosial. Apabila norma adalah suatu dasar dari keteraturan kehidupan sosial, maka perubahan sosial terjadi dalam struktur masyarakat, terjadi sebagai akibat dari perubahan dalam norma-norma sosial. Banyaknya kecenderungan-kecenderungan yang buruk masa kini, seperti pemogokan buruh industri, tindakan-tindakan kriminal, kebebasan sex

⁶⁶ Syarifudin Jurdi, *Awal Mula Sosiologi Modern: Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012) h. 78.

⁶⁷ Dra Siti Waridah dkk. *Sosiologi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 109.

⁶⁸ Dra Siti Waridah dkk. *Sosiologi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 110.

adalah hasil dari kebobrokan moral, dan hanya dapat diatasi dengan regenerasi moral⁶⁹.

2. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

a. Perubahan Sosial secara Lambat

Perubahan evolusi terjadi dalam waktu yang lama secara perlahan dan bertahap dan melalui proses evolusi. Perubahan seperti itu tidak terlalu drastis atau luar biasa. Mereka berjalan secara bertahap seperti proses pengkondisian dan orang-orang belajar menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut secara bertahap. Perubahan tersebut terjadi tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Penyebab perubahan sosial evolusioner ini yaitu karena masyarakat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Contohnya yaitu perubahan alat komunikasi maupun sistem transportasi.⁷⁰

b. Perubahan Sosial secara Cepat

Bentuk-bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial ini merupakan kebalikan dari perubahan evolusioner. Ketika perubahan di berbagai sektor sistem sosial kita terjadi secara tiba-tiba, drastis, dan cukup untuk membedakannya dari perubahan bertahap dan lambat, itu disebut perubahan sosial revolusioner.⁷¹ Perubahan ini terjadi bisa karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Revolusi biasanya diawali oleh ketegangan ketegangan atau konflik dalam masyarakat.⁷² Contohnya yaitu peristiwa terjadinya revolusi industri di Inggris, di mana terjadi pada tahap produksi yang awalnya tanpa

⁶⁹ David Berry. *The Principles of Sosiologi*. Trjrn Paulus Wirutomo, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), Ed. I, Cet ke-3, h. 67.

⁷⁰ Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: TiaraWacana, 2020), h. 20.

⁷¹ Robert H. Laurer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 4.

⁷² Eva Etzioni-Halevy dan Amitai Etzioni, *Sosial Change: Sources, Patterns and Consequences* (New York: Basic Book, 1994), h. 56

mesin, kemudian berubah menjadi tahap produksi menggunakan mesin.

c. Perubahan Sosial Kecil

Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung / berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan.⁷³

d. Perubahan Sosial Besar

Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi - industrialisasi.⁷⁴

e. Perubahan Sosial yang Direncanakan (Dikehendaki)

Bentuk-bentuk perubahan sosial berikutnya yaitu perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat.

Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *Agentofchange* (agen perubahan), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga - lembaga kemasyarakatan, serta memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial.

f. Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan (Tidak Dikehendaki)

Bentuk-bentuk perubahan sosial yang terakhir yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan (tidak dikehendaki) merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan / dikehendaki oleh masyarakat dan

⁷³ Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial dalam Teori Makro* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 11

⁷⁴ Daddi H. Gunawan, *Perubahan Sosial di Pedesaan Bali* (Salatiga: Program Pascasarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana, 2013), h. 34.

di luar jangkauan pengawasan masyarakat.⁷⁵ Konsep perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki tidak mencakup pengertian apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena bisa terjadi, perubahan yang tidak direncanakan / tidak dikehendaki ternyata diharapkan dan diterima oleh masyarakat, misalnya saja reformasi yang terjadi di Indonesia.

Konflik Sosial

1. Pengertian konflik sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah percekocan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik atau pertentangan di dalam suatu masyarakat juga mungkin menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial dalam suatu komunitas masyarakat. Pertentangan-pertentangan ini mungkin terjadi antar individu ataupun antar suatu kelompok dalam suatu masyarakat.

Masyarakat tradisional Indonesia, pada umumnya bersifat kolektif. Segala kepentingan didasarkan pada kepentingan masyarakat. Kepentingan-kepentingan individu walupun diakui mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul pertentangan antara kepentingan-kepentingan individu dengan kelompok tersebut, dalam dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Misalnya di kalangan suku batak yang sistem kekeluarganya adalah patrinal murni.

Pertentangan antar kelompok mungkin saja terjadi antara generasi tua dengan generasi muda. Pertentangan tersebut kerap terjadi apalagi pada masyarakat yang sedang berada pada tahap berkembang dari tradisional ke tahap modern. Generasi muda yang keberibadainnya belum terbentuk, lebih mudah untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang dalam beberapa bidang memiliki taraf yang lebih tinggi. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perubahan-

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Grafindo, 1982), h.337.

perubahan tertentu dalam masyarakat, misalnya pergaulan yang lebih bebas antara pria dan wanita, kedudukan wanita yang sederajat dengan kaum lelaki di dalam masyarakat dan juga lain sebagainya.⁷⁶

Sebenarnya pertentangan ini bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, karena terkadang pertentangan ini dapat membantu menghilangkan unsur-unsur yang memisahkan dalam suatu antar hubungan sosial dan untuk membangun kesatuan kembali. Selain pertentangan itu dapat menyelesaikan ketegangan antar pihak-pihak yang bertentangan, ia juga berfungsi menstabilkan dan menjadi satu komponen yang menyatukan antara hubungan sosial.⁷⁷

Dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, masyarakat, dan negara sering ditemukan peristiwa konflik sosial. Konflik sosial dalam keseharian seringkali dikawatirkan sebagai hal yang negatif, merusak, dan membuat tidak nyaman. Meskipun sebenarnya, perbedaan kepentingan yang ada di dalam masyarakat, sama pentingnya dengan keberadaan kesepakatan, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Artinya, konflik sosial bisa dipandang juga memiliki fungsi bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Konflik tidak selamanya menghadirkan dua individu atau lebih. Konflik bisa saja dialami oleh seorang individu, dalam psikologi konflik semacam ini disebut konflik dalam diri (*bathin*). Dalam ilmu komunikasi, konflik ini masuk dalam ranah komunikasi intrapersonal. Konflik yang dialami oleh seorang individu dapat membuatnya serba dilematis. Dalam level keluarga, konflik sosial dapat terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara kakek/nenek dengan cucu atau bahkan antar keluarga besar/kerabat. Konflik di keluarga dapat disebabkan oleh banyak hal dan konflik keluarga dapat berakibat pada keretakan, ketidakharmonisan, perpecahan keluarga dan perceraian. Konflik di keluarga dapat mewujudkan dalam bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Di balik konflik sosial dalam level keluarga,

⁷⁶ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h. 305

⁷⁷ Soekandarwiriaatmadja. *Pokok-Pokok Sosiologi*. (Jakarta: Yasaguna, 1991), H. 115.

ada sisi positif yang dapat diambil pelajaran, diantaranya masing masing anggota keluarga melakukan instropeksi diri, dan harmoni.⁷⁸

2. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

- a) **Perbedaan antar perorangan**, Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat.
- b) **Perbedaan kebudayaan**, Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, seperti perilaku atau tata sikap. Konflik bisa terjadi karena kelainan tata sikap dan perilaku sosialnya. Jika tidak ada titik temu atau kesepakatan akan konflik akan meluas. Perbedaan kebudayaan identik dengan daerah yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan mereka yang berasal dari daerah yang sama memiliki kebudayaan yang berbeda karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidaklah sama. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial.
- c) **Perbedaan kepentingan**, Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial. Karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Ketika individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka akan merasakan kepuasan. Sebaliknya ketika mengalami kegagalan dalam memenuhi kepentingannya maka akan menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun lingkungannya.
- d) **Perubahan sosial**, yang terlalu cepat Konflik sosial bisa terjadi dampak dari revolusi atau perubahan sosial yang terlalu cepat di masyarakat. Konflik adalah salah satu penyebab

⁷⁸ Akdon H, Wahyudi, *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*, (Bandung : Alfabeta.2006)

perubahan sosial yang cepat di atas. Bila kasus revolusi dijadikan acuan, konflik adalah faktor penggerak revolusi. Sebuah revolusi biasanya diawali oleh rentetan atau gelombang aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan di masyarakat. Bahkan bisa terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

3. Jenis-Jenis Konflik

Konflik yang terjadi pada manusia ada berbagai macam ragamnya, bentuknya, dan jenisnya. Soetopo mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu:⁷⁹

- a. Konflik tujuan yaitu konflik terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif.
- b. Konflik peranan yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.
- c. Konflik nilai yaitu konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi.
- d. Konflik kebijakan yaitu suatu konflik dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.

Menurut Fisher, berdasarkan polanya, konflik dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Konflik latent sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.
- b. Konflik terbuka adalah konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya.

⁷⁹ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press.1999)

- c. Konflik dipermukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.⁸⁰ Selain itu Soerjono Soekanto dalam Furkan Abdi, membagi konflik sosial kedalam lima bentuk khusus berdasarkan tingkatannya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
 - b. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan ras.
 - c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
 - d. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
 - e. Konflik yang bersifat Internasional yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan Negara.⁸¹
4. Tahapan Konflik

Tahapan Situasi konflik akan selalu berubah dari waktu ke waktu apabila konflik tersebut terus dibiarkan terjadi tanpa adanya upaya penanganan atau lainnya. penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Fisher elal, menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah

⁸⁰ Fisher, Simon. *et al. Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak*, (Jakarta. Indonesia. Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N.Kartikasari, dkk. The British Council 2001)

⁸¹ Abdi, Rianse. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung CV. ALFABETA.2009)

penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda.⁸² Tahap- tahap ini adalah:

- a. Pra-Konflik: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.
- b. Konfrontasi: pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
- c. Krisis: ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak.
- d. Akibat: kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak pertikaian. Untuk menghentikan
- e. Pasca-Konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra konflik.

⁸² Fisher, Simon. *et al. Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak*, (Jakarta. Indonesia. Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N.Kartikasari,dkk. The British Council 2001)

5. Akibat Konflik

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, antara lain:⁸³

- a. Bertambahnya solidaritas in-group Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga/kelompok biasanya akan tambah erat.
 - b. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok. Hal ini terjadi apabila timbul pertentangan antar golongan dalam suatu kelompok.
 - c. Adanya perubahan kepribadian individu. Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental.
 - d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban Jiwa Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa raga manusia.
 - e. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.
- ## 6. Resolusi Konflik Di Masyarakat

Penyelesaian atau resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidakcocokkan utama di antara mereka, menerima keberadaan satu sama lain dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain.

⁸³ Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. (Jakarta: Salemba Humanika. 2010)

Menurut Nasikun, pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu:

- a) **Negosiasi** adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara. Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
- b) **Konsiliasi (Conciliation)**, Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik.⁸⁴

Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal:

- a. Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain,
- b. Lembaga harus bersifat monopolistik, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian,
- c. Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik,
- d. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis.
- e. Konsiliator nantinya memiliki secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

Mediasi (Mediation), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikannya nasihat, berkaitan dengan penyelesaian

⁸⁴ Nasikun. *System Social Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993)

terbaik terhadap konflik yang mereka alami bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantumenyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator. Oleh karena itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur antaralain: Merupakan Sebuah Proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan; Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan; Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari terlibat, wawancara mendalam, studi literatur dan studi dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data. penyelesaian. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, putusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang dapat berbentuk nilai-nilai atau norma norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

Arbitrasi (Arbitration), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbitrer.⁸⁵

Pengendalian Sosial

1. Pengertian pengendalian social

⁸⁵ Irwandi, Endah R. Chotim. *analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta*, (jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, Bandung 2017) h. 27-40

Menurut Peter L. Berger,⁸⁶ yang dimaksud pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara itu, menurut Roucek,⁸⁷ pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal. Menurut Soerjono Soekarto⁸⁸, yang dimaksud pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Proses sosialisasi, secara normatif, tidak hanya mendatangkan manfaat bagi masyarakat dalam arti memungkinkan terwujudnya tertib sosial akan tetapi juga mendatangkan manfaat bagi warga masyarakat secara individual. Melalui proses-proses sosialisasi inilah warga-wargamasyarakat dapat belajar bagaimana bertingkah pekerti dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat tanpa menemui kesulitan apapun juga.

Norma-norma merupakan petunjuk dan pedoman mengenai bagaimana caranya dan bagaimana sebaiknya, menyelesaikan urusan-urusan hidup di dalam masyarakat ini. Demikianlah karena proses sosialisasi itu pada akhirnya bersifat *rewarding* artinya mendatangkan *reward*, manfaat atau keuntungan tertentu bagi individu-individu warga masyarakat normaliter para warga masyarakat tidak seseorangpun akan menentang (secara total) berbagai sosialisasi yang di selenggarakan terhadapnya, baik sosialisasi yang bersifat otoriter maupun (apalagi) yang bersifat ekualitas. Bahkan apa yang sering kali terjadi adalah para warga masyarakat itu justru sukarela akan

⁸⁶ Berger P. The Problem of Multiple Realities: Alfred Schutz and Robert Musil, in *Phenomenology and Sociology* (edited by T. Luckmann, Penguin Books, New York 1978)

⁸⁷ Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohamad Radjab, Bhartara, Jakarta (Selanjutnya disingkat Roscou Pound II), 1965)) h.62.

⁸⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia, Jakarta. 1981) h. 40

menyerahkan dirinya untuk disosialisasi, tanpa banyak keberatan apa-apa bersedia menginternalisasi norma-norma dan pola-pola yang disosialisasikan terhadapnya itu.

Sementara itu pada individu-individu tertentu atau pada waktu-waktu dan keadaan tertentu, daya *self-enforcing* dari norma-norma itu seiring kali melemah atau bahkan hilang sama sekali. Dalam hal demikian ini individu-individu pada saat situasi-situasi tertentu mungkin saja merasa bahwa mengikuti bunyi sesuatu norma tertentu itu justru malahan tidak rewarding bahkan sebaiknya mengalami kerugian. Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Karena-kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.
- 3) Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
- 4) Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.⁸⁹

Pengendalian sosial tercakup dalam segala proses bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial, pengendalian sosial atau kontrol social dimaksudkan agar seseorang mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial terutama remaja. Hal ini dikarenakan remaja adalah kelompok masyarakat yang paling rentan menerima pengaruh dari berbagai sumber, baik pengaruh positif dan negative sehingga remaja

⁸⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia, Jakarta. 1981) h.45

memerlukan orang yang lebih dewasa untuk mengendalikan dan mengarahkan perilakunya.⁹⁰

Pada masa perkembangannya melalui tahap-tahp yang harus dilalui dan ini terjadi secara alami, apabila tidak terjadi keadaan tidak sesuai dengan harapannya maka remaja sulit menerima dan mencari perhatian serta melakukan hal hal negative dan biasanya perilaku yang dianggap baik bagi dirinya namun bagi orang lain justru menyimpang seperti perilaku seks pranikah, obat-obtaan dan narkoba.⁹¹

Sistem kontrol sosial atau pengendalian sosial terhadap perilaku masyarakat meliputi dasar yang memiliki tujuan antara lain :

- a) Sistem mengajak bertujuan mengarah, agar perbuatan seseorang didasarkan terhadap norma-norma dan tidak menurut kemauan individu-individu.
- b) Sistem mendidik memiliki tujuan agar didalam diri seseorang terdapat perubahan sikap, dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku bertindak sesuai dengan norma-norma dan blia tidak mau menaati kaidah ataupun norma. Maka akan dikenakan sanksi.

Pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi “mengancam sanksi” disebut kontrol sosial yang bersifat preventif. Sedangkan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula disebut kontrol sosial yang bersifat represif.⁹²

2. Jenis-Jenis Pengendalian Sosial

Kontrol sosial atau pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselaran dalam kehidupan sosial, untuk maksud tersebut dikenal dari beberapa jenis pengendalian. Penggolongan dibuat menurut sudut pandang antara lain :

⁹⁰Soekanto, Soerjono *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988) h. 41

⁹¹Sarwono. Prawirohardjo, *Ilmu kandungan*. (Edisi 2 Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono, 2007) h. 65

⁹² Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. (Jakarta : Kencana. 2013) h.134

- a) Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi (mengancam sanksi) atau bisa dikatakan usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi usaha pengendalian sosial bersifat preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan.
- b) Pengendalian represif merupakan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar semua bisa berjalan seperti semula, dengan menjalankan sesuai versi (menjatuhkan dan membebaskan sanksi). Pengendalian ini berfungsi sebagai cara untuk mengembalikan keserasian yang terganggu atas adanya pelanggaran norma dan perilaku yang menyimpang, mengembalikan keadaan seperti semula jadi perlu diadakan pemulihan bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut dan sekaligus agar dapat mematuhi norma-norma sosial.
- c) Pengendalian sosial gabungan suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau bisa disebut preventif sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif), usaha pengendalian dengan cara memadukan ciri preventif dan represif agar perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan walaupun terjadi penyimpangan maka tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.
- d) Pengendalian resmi atau disebut formal merupakan pengawasan yang didasari atas penugasan oleh badan-badan resmi dari Negara maupun agama.
- e) Pengendalian tidak resmi atau informal dilaksanakan agar terpeliharanya peraturan-peraturan secara tidak resmi milik masyarakat, diaktakan tidak resmi sebab peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas maka tidak ditemukan dalam

hukum secara tertulis. Tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.

- f) Pengendalian kepribadian merupakan pengaruh baik dan buruk yang datang dari orang tertentu, bisa dikatakan tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal, bahkan silsilah dan riwayat hidupnya dan teristimewa ajarannya juga dikenal.
- g) Pengendalian institusional pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga tertentu, pola-pola kelakuan dan kaidah-kaidah lembaga tidak bisa mengontrol para anggota lembaga. Tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut.

3. Fungsi Dan Tujuan Pengendalian Sosial

Tujuan utama dari upaya kontrol sosial, pengendalian dan pengawasan sosial merupakan cara untuk menciptakan dan menjaga kedamaian serta ketentraman masyarakat, dengan adanya pengendalian dan juga pengawasan. Menurut Mintarti keteraturan sosial di masyarakat dapat terwujud, pada pelaksanaan kontrol sosial memiliki fungsi dan tujuan. Beberapa fungsi dan tujuann pengendalian sosial adalah sebagai berikut: ⁹³

- a) Menjaga ketertiban Masyarakat
Dalam suatu masyarakat selalu ada norma-norma dan nilai yang berlaku sebagaimana batasan berperilaku di masyarakat, dan terdapat konsekuensi atau hukuman atas pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut sehingga umumnya individu akan takut dan memilih untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Memberikan Imbalan Bagi Yang Taat Aturan
Masih menyangkut harga diri, setiap orang yang mengikuti aturan dan juga norma serta berlaku mendapatkan imbalan baik secara langsung atau tidak langsung, salah satu contoh imbalannya adalah dalam bentuk kemudahan dalam mengurus berkas surat berkelakuan baik dari pejabat masyarakat.
- c) Menciptakan Sistem Hukum

⁹³NPD Mintarti, W Novianti. *Fungsi Kontrol Sosial Islam Dalam Pencegahan Pergaulan Bebas Remaja*. (Jurnal Mimbar. Vol 29 No 02.2013) h. 160

Kontrol sosial juga dapat berfungsi sebagai sistem hukum atau aturan yang disusun secara resmi dimana di dalamnya terdapat sanksi atau hukuman bagi warga yang melanggarnya.

- d) Meyakinkan Masyarakat Untuk Mematuhi Norma
Kontrol sosial yang dilakukan dengan baik, akan membentuk dan meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa peraturan yang berlaku di masyarakat akan membawa kebaikan bagi semua orang.
- e) Mengembangkan Budaya Malu
Pada dasarnya semua orang mempunyai rasa malu, apalagi jika menyangkut harga dirinya, hukuman sosial yang diterima seseorang yang melanggar aturan akan membuat orang merasa malu.⁹⁴

Menurut Romli Atmasasmita tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam sudut pandangan tentang kesusilaan/morality dan seseorang tersebut bebas melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya, selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku di dalam masyarakat.⁹⁵Teori kontrol sosial berawal dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai keinginan yang sama dengan kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”, jadi baik ataupun jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung kepada masyarakat, mereka menjadi baik baik saja jika masyarakat sekitar membuatnya seperti itu.

4. Sanksi –Sanksi Pengendalian Social

Seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan

⁹⁴NPD Mintarti, W Novianti. *Fungsi Kontrol Sosial Islam Dalam Pencegahan Pergaulan Bebas Remaja*. (Jurnal Mimbar. Vol 29 No 02. 2013) h. 162

⁹⁵Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 122

penyimpangan terhadap norma tersebut. Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu :

- a. Sanksi yang bersifat fisik
- b. Sanksi yang bersifat psikologik, dan
- c. Sanksi yang bersifat ekonomik

Sanksi fisik adalah sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada mereka yang dibebani sanksi tersebut, misalnya didera, dipenjara, diikat, dijemur di panas matahari, tidak diberi makan dan sebagainya. Berbeda halnya dengan sanksi fisik, pada sanksi psikologik beban penderitaan yang dikenakan pada si pelanggar norma itu bersifat kejiwaan, dan mengenai perasaan, misalnya hukuman dipermalukan di muka umum, diumumkannya segala kejahatan yang telah pernah di perbuat, dicopot tanda kepangkatan di dalam suatu upacara dan lain sebagainya. Pada jenis sanksi yang ketiga sanksi ekonomik, beban penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar norma adalah berupa pengurangan kekayaan atau potensi ekonomiknya, misalnya pengenaan denda, penyitaan harta kekayaan, dipaksa membayar ganti rugi, dan sebagainya. Sebagaimana halnya dengan sanksi-sanksi pun incentive itu bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Incentive yang bersifat fisik
- b. Incentive yang bersifat psikologi dan
- c. Incentive bersifat ekonomi

Incentive fisik tidaklah begitu banyak ragamnya, serta pula tidak begitu mudah diadakan, andaikata bisa diberikan rasa nikmat jasmaniah yang diperoleh daripadanya tidaklah akan sampai swwkstram rasa derita yang dirasakan didalam sanksi fisik. Jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan, ciuman, makan-makan, tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas penderitaan sanksi fisik, seperti hukuman cambuk hukuman kerja paksa, hukuman gantung sampai mati, dan lain sebagainya. Bernilai sekadar sebagai simbol, kebanyakan incentive fisik lebih tepat dirasakan sebagai incentive psikologik, sementara itu, disamping incentive fisik dan psikologik, tidak kalah seringnya adalah incentive ekonomik. Incentive

ekonomik kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang atau ke arah penghasilan uang yang lebih banyak.⁹⁶

Rangkuman

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, diantaranya; Perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat serta Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang direncanakan serta perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dan perubahan yang tidak direncanakan.

Hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan dalam suatu komunitas masyarakat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada juga yang bersumber dari luar. Contoh : Bertambah atau berkurangnya penduduk misalnya perubahan pesat yang terjadi di pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, Konflik atau pertentangan di dalam suatu masyarakat juga mungkin menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial dalam suatu komunitas masyarakat. Pertentangan-pertentangan ini mungkin terjadi antar individu ataupun antar suatu kelompok dalam suatu masyarakat sebenarnya pertentangan itu dapat menyelesaikan ketegangan antar pihak-pihak yang bertentangan, ia juga berfungsi menstabilkan dan menjadi satu komponen yang menyatukan antara hubungan sosial.

Baron dan Byrne berpendapat bahwa ada kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang, yaitu :

- a. Perilaku dan karakteristik orang lain
- b. Proses kognitif
- c. Faktor lingkungan

⁹⁶ Narwoko, J. Dwi. *Sosiologi Teks dan Terapan*. (Jakarta: Kencana. 2011). h.134

- d. Tatar Budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi

Perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antarpribadi, yaitu :

1. Kecenderungan Perilaku Peran
 - a. Sifat pemberani dan pengecut secara sosial
 - b. Sifat berkuasa dan sifat patuh
 - c. Sifat inisiatif secara sosial dan pasif
 - d. Sifat mandiri dan tergantung
2. Kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial
 - a. Dapat diterima atau ditolak oleh orang lain
 - b. Suka bergaul dan tidak suka bergaul
 - c. Sifat ramah dan tidak ramah
 - d. Simpatik atau tidak simpatik
3. Kecenderungan perilaku ekspresif
 - a. Sifat suka bersaing (tidak kooperatif) dan tidak suka bersaing (suka bekerjasama)
 - b. Sifat agresif dan tidak agresif
 - c. Sifat kalem atau tenang secara sosial
 - d. Sifat suka pamer atau menonjolkan diri

Perubahan dalam norma sosial telah banyak diteliti para pengkaji memiliki hubungan dengan perubahan sosial. Apabila norma adalah suatu dasar dari dari keteraturan kehidupan sosial, maka perubahan sosial terjadi dalam struktur masyarakat, terjadi sebagai akibat dari perubahan dalam norma-norma sosial. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial yaitu Perubahan Sosial secara Lambat, Perubahan evolusi terjadi dalam waktu yang lama secara perlahan dan bertahap dan melalui proses evolusi. Perubahan seperti itu tidak terlalu drastis atau luar biasa. Perubahan Sosial secara Cepat. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial ini merupakan kebalikan dari perubahan evolusioner. Ketika perubahan di berbagai sektor sistem sosial kita terjadi secara tiba-tiba, drastis, dan cukup untuk membedakannya dari perubahan bertahap dan lambat, itu disebut perubahan sosial revolusioner. Perubahan Sosial Kecil. Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial

yang tidak membawa pengaruh langsung / berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan.

Perubahan Sosial Besar. Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi - industrialisasi. Perubahan Sosial yang Direncanakan (Dikehendaki). Bentuk-bentuk perubahan sosial berikutnya yaitu perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan (Tidak Dikehendaki). Bentuk-bentuk perubahan sosial yang terakhir yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan (tidak dikehendaki) merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan / dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat.

Konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. faktor penyebab terjadinya konflik yaitu Perbedaan antar perorangan, Perbedaan kebudayaan, Perbedaan kepentingan, Perubahan social. Jenis-jenis konflik yaitu konflik tujuan, konflik peranan, konflik nilai, konflik kebijakan. Menurut Fisher berdasarkan polanya, konflik dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu: Konflik latent, konflik terbuka, konflik diprmukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar. Selain itu Soerjono Soekanto dalam Furkan Abdi, membagi konflik sosial kedalam lima bentuk khusus berdasarkan tingkatannya, yaitu sebagai berikut: Konflik atau pertentangan pribadi, konflik rsial, konflik anatar kelas kelas sosial, konflik politik, konflik yang bersifat internasional.

Ada beberapa tahapan konflik Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda (Fisher, 2001). Tahap- tahap ini adalah:

- a. Pra-Konflik, konfrontasi, krisis, akibat, pasca-konflik. akibat konflik
- a. Bertambahnya solidaritas in-group Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga/ kelompok biasanya akan tambah erat.

- b. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok. Hal ini terjadi apabila timbul pertentangan antar golongan dalam suatu kelompok.
- c. Adanya perubahan kepribadian individu. Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental.
- d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban Jiwa Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa raga manusia.
- e. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Resolusi konflik di masyarakat Menurut Nasikun pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu:

1. Negosiasi,
2. Konsiliasi (Conciliation),
3. Mediasi (Mediation),
4. Arbitrasi (Arbitration).

Pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Jenis-jenis Kontrol Sosial Penggolongan dibuat menurut sudut pandang antara lain : a) Pengendalian preventif, b) Pengendalian represif, c) Pengendalian sosial gabungan suatu usaha, d) Pengendalian resmi atau disebut formal, e) Pengendalian tidak resmi atau informal, f) Pengendalian kepribadian, g) Pengendalian institusional. Fungsi dan Tujuan Kontrol Sosial Tujuan utama dari upaya kontrol sosial, pengendalian dan pengawasan sosial merupakan cara untuk menciptakan dan menjaga kedamaian serta ketentraman masyarakat, dengan adanya pengendalian dan juga pengawasan. Beberapa fungsi dan tujuann pengendalian sosial adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketertiban Masyarakat,
- b. Memberikan Imbalan Bagi Yang Taat Aturan ,
- c. Menciptakan Sistem Hukum ,
- d. Meyakinkan Masyarakat Untuk Mematuhi Norma,
- e. Mengembangkan Budaya Malu.

Sanksi – Sanksi Kontrol Sosial Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu :

- a. Sanksi yang bersifat fisik
- b. Sanksi yang bersifat psikologik, dan
- c. Sanksi yang bersifat ekonomik

Referensi

- Abdi, Rianse. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi). Bandung CV. ALFABETA.2009.
- Abdulsyani, Sosiologi Sistematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012
- Agus Salim, Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia Yogyakarta: Tiara Wacana, 2020.
- Akdon H,Wahyudi, Manajemen Konflik Dalam Organisasi, Bandung : Alfabeta.2006.
- Akyas Azhari, Psikologi Umum dan Perkembangan. Jakarta Selatan: Penerbit Teraju. 2004.
- Arry H Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Tentang Bagaimana Problem Pendidikan. Jakarta : PT. Rineka Cita, 2000.
- Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Mengelola Hutan Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Baron & Byrne. Social Psychology. sixth edition : Understanding human interaction. United States of America : Allyn and Bacon. 1991
- Berger P. The Problem of Multiple Realities: Alfred Schutz and Robert Musil, in Phenomenology and Sociology edited by T. Luckmann, Penguin Books, New York.1978
- Daddi H. Gunawan, Perubahan Sosial di Pedesaan Bali. Salatiga: Program Pascasarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana, 2013
- David Berry. The Principles of Sosiologi. Trjrn Paulus Wirutomo, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Ed. I, Cet ke-3. 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Dra Siti Waridah dkk. Sosiologi, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong.,Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta : Kencana. 2013.
- Elly M. Setiadi. Usman Kolip. Pengantar Sosiologis Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Elly M. Setiadi. Usman Kolip. Pengantar Sosiologis Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Emizal Amri, Perkembangan Teori Pertukaran, Struktural Fungsional, dan Ekologi Budaya: Padang: IKIP, 1997.
- Eva Etzioni-Halevy dan Amitai Etzioni, Sosial Change: Sources, Patterns and Consequences New York: Basic Book, 1994.
- Fisher, Simon. et al. Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak, (Jakarta. Indonesia. Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N.Kartikasari,dkk. The British Council 2001).
- Fisher, Simon. et al. Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak, Jakarta. Indonesia. Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N.Kartikasari,dkk. The British Council 2001).
- Gerungan, W.A.. Psychologi-sosial suatu ringkasan. Jakarta: PT Eresco 1978.
- HB Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.1999.
- Ibrahim Rusli, Promosi Kesehatan Dengan Pendekatan Teori Prilaku, Media, Dan Aplikasinya. Semarang: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Irwandi, Endah R. Chotim. analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta, jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, bandung 2017.
- Ivancevich. Pembinaan prilaku dan sikap. Jakarta : PT. Rineka Cipta 2008.
- Jacobus Ranjabar, Perubahan Sosial dalam Teori Makro. Bandung: Alfabetha, 2008.
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 192-204 Agustus 2016.
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 192-204 Agustus 2016.
- Malcom Mcfee, "Social Organization II: Kinship, dalam E. Hunter dan Philip Whitten, The Study of Culture Anthropology. New York: Harper and Row, 1997.

- Mauss, Marcel. Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1992.
- Mcfee, Malcom. Social Organization II: Knship, dalam E. Hunter dan Philip Whitten, The Study of Culture Anthropology. New York: Harper and Row, 1997.
- Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Narwoko, J. Dwi. Sosiologi Teks dan Terapan. Jakarta: Kencana. 2011.
- Nasikun. System Social Indonesia. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 1993
- NPD Mintarti, W Novianti.Fungsi Kontrol Sosial Islam Dalam Pencegahan Pergaulan Bebas Remaja. Jurnal Mimbar. Vol 29 No 02.2013.
- Paisol Burlian. Patologi Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2016.
- Peter Salim, Yanny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi I. Jakarta:Modern English Pers, 1991.
- Robert H. Laurer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Romli Atmasasmita, Globalisasi Kejahatan Bisnis. Jakarta: Kencana, 2010.
- Roscou Pound, Pengantar Filsafat Hukum (diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohamad Radjab, Bhratara, Jakarta (Selanjutnya disingkat Roscou Pound II), 1965
- Sarwono.Prawirohardjo, Ilmu kandungan. Edisi 2 Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono, 2007.
- Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, Ed. I.1964.
- Selo Sumarjan dan Soelaiman Soemardi.Setangkai Bunga Sosiologi Jakarta: Fakultas Ekonom UI, , Ed, I. 1964.
- Siti Waridah dkk.Sosiologi. Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Soekandarwiraatmadja.Pokok-Pokok Sosiologi. Jakarta: Yasaguna, 1991.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Soekanto,Soerjono Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Grafindo, 1982.

- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pres, 1990.
- Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta. 1981.
- Syarifudin Jurdi, Awal Mula Sosiologi Modern: Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Wirawan. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.

KEGIATAN BELAJAR 6

Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan

Konsep Dasar Perilaku Ekonomi

Teori tentang pengertian perilaku ekonomi mengemukakan bahwa orang, dengan preferensi dan batasan mereka, mampu membuat keputusan rasional. Hal tersebut dapat dicapai secara efektif dengan menimbang biaya dan keuntungan dari setiap pilihan yang tersedia untuk mereka. Keputusan yang telah dibuat nantinya akan menjadi pilihan terbaik bagi individu. Orang yang rasional memiliki kendali atas dirinya sendiri dan tidak tergerak oleh emosi dan faktor eksternal. Dan, karenanya, mereka mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya sendiri.⁹⁷

Pengertian perilaku ekonomi mengacu pada psikologi dan ekonomi untuk mengeksplorasi mengapa orang terkadang membuat keputusan yang tidak rasional. Hal ini menyangkut mengapa dan bagaimana perilaku mereka tidak mengikuti prediksi model ekonomi. Keputusan seperti berapa banyak yang harus dibayar untuk secangkir kopi, apakah akan melanjutkan ke sekolah pascasarjana, apakah akan menerapkan gaya hidup sehat, dst terkait dengan hal ini. Semua hal itu adalah jenis keputusan yang dibuat kebanyakan orang pada suatu saat. Pengertian perilaku ekonomi persis menyoroti bagaimana mereka memutuskan untuk memilih A dan bukan B.

Dasar perilaku ekonomi pada manusia adalah karakteristik manusia sebagai makhluk yang emosional dan mudah teralih fokusnya membuat keputusan mereka cenderung berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. Misalnya, menurut teori pilihan rasional, jika seseorang

⁹⁷ Widarjono, Agus. (2017)). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* Disertai Panduan Eviews. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.

ingin menurunkan berat badan dan dibekali informasi tentang jumlah kalori yang tersedia di setiap produk yang dapat dimakan, ia akan memilih produk dengan kalori minimal. Akan tetapi, pengertian perilaku ekonomi melihat dan bergerak lebih jauh dari sekadar sisi rasional.⁹⁸

Perilaku ekonomi tak jauh dengan istilah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian lainnya yaitu tindakan individu dalam menentukan pilihan dan menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kegiatan ekonomi sendiri mengacu pada kegiatan memproduksi, membeli, menjual dan mendistribusikan barang dan jasa yang melibatkan transaksi moneter. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai proses dimana persediaan modal atau sumber daya baik berupa barang maupun jasa yang dapat dimanfaatkan individu dalam memenuhi kebutuhannya. Keseluruhan proses ini tidak hanya melibatkan produksi barang dan jasa namun juga distribusinya di antara individu-individu yang berbeda dalam suatu komunitas.

Motif Ekonomi

Setiap orang pasti memiliki alasan tertentu saat akan melakukan suatu kegiatan, seperti seseorang bekerja dengan niat untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu tergantung dari niatnya artinya bahwa segala kegiatan yang kita lakukan harus dibarengi dengan niat. Motif merupakan alasan atau niat dari suatu kegiatan. Semua yang dilakukan manusia pasti ada dorongan atau alasan tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa, motif ekonomi adalah sebuah alasan tertentu yang mendasari seseorang dalam melakukan aktivitas perekonomian baik di lingkup kecil maupun lingkup besar.⁹⁹ Seseorang melakukan aktivitas ekonomi selalu menggunakan fikiran dan akal sehatnya ketika dianggap memungkinkan maka ia akan melakukannya tapi ketika tidak memungkinkan maka ia akan mengurungkan niatnya tersebut. Dari alasan itulah, motif ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu:

⁹⁸ Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁹⁹ Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.

1. Motif Ekonomi Instrinsik

Motif ekonomi instrinsik adalah suatu alasan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri dengan tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain. Dan dari diri sendirilah yang menentukan perilaku ekonomi seperti menjual barang yang ia miliki dan kegiatan ekonomi lainnya. Akan tetapi motif ini masih tergantung pada suasana hati dan emosional yang dimiliki oleh individu tersebut, bila suasana hati baik maka kegiatan ekonomi akan mudah terlaksana namun ketika suasana hatinya kurang bagus maka ia tidak akan melakukan aktivitas ekonominya.

2. Motif Ekonomi Ekstrinsik

Motif ekonomi ekstrinsik merupakan motif yang terpengaruh oleh situasi di luar individu seperti ajakan dari orang lain untuk berbisnis, situasi dan kondisi lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Motif ini biasa terjadi karena stimulus yang berasal dari pihak luar seperti teman ataupun situasi dan kondisi. Misalnya saja seorang bekerja karena tuntutan dari keluarga dan anak untuk membayar keperluan dan kebutuhan sehari-hari, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan sebuah keuntungan dan keamanan, serta contoh lain seperti ajakan untuk menjadi reseller atau mendirikan usaha.

Dua motif tersebut adalah pengelompokan motif ekonomi yang didasarkan atas alasan dari suatu pihak ketika melakukan suatu kegiatan atau aktivitas perekonomian. Selanjutnya adalah pembagian motif ekonomi yang pembagiannya berdasarkan aspeknya, yaitu:

a. Mendapatkan sebuah keuntungan

Keuntungan atau sering disebut laba adalah salah satu tujuan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan perekonomian, motif inilah yang menjadi motif paling terlihat dari semua golongan yang melakukan kegiatan perekonomian. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan lebih dari kegiatan ekonomi yang telah mereka lakukan, baik keuntungan berupa uang maupun

- barang. Motif inilah yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan kegiatan perekonomian.
- b. Mencari sebuah kekuasaan dalam perekonomian
- Memiliki sebuah posisi menjadi seorang pemimpin di bidang perekonomian menjadi sebuah motif untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Hal ini biasa terjadi pada pihak yang sudah mapan atau makmur tetapi ingin mendapatkan sesuatu yang lebih yaitu sebuah kekuasaan. Misalnya, sebuah pedagang besar yang memiliki banyak kekuatan dari segi modal berusaha untuk melakukan segala kegiatan yang bisa menarik perhatian konsumen dan bisa menyingkirkan semua pesaingnya yaitu dengan cara menjual produk lebih murah, menjual produk yang tidak ada di pedagang lain. Ketika pedagang tersebut mampu memperluas jangkauannya atau bisa membentuk cabang-cabang di berbagai daerah saat itulah kekuasaan ekonomi ada di tangannya.
- c. Mendapatkan penghargaan dari pihak lain
- Semua manusia memiliki sifat dasar untuk menjadi yang terbaik diantara yang lainnya. Karena itulah motif ini menjadi salah satu alasan atau dorongan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau aktivitas ekonomi. Keinginan seperti itulah yang menjadikan Mereka menginginkan adanya sebuah penghargaan dari pihak lain, baik atas keahlian yang mereka miliki, atas etos kerja yang mereka lakukan dan keunggulan lainnya yang mereka miliki.
- d. Dorongan untuk perbuatan sosial
- Motif ekonomi yang selanjutnya adalah motif ekonomi yang didasari atas sikap kepedulian sosial dari suatu pihak terhadap pihak lain. Tak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain dan kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Motif inilah yang nantinya patut dikembangkan dan diapresiasi serta disosialisasikan dalam melakukan aktivitas perekonomian untuk tujuan membantu pihak lain yang kurang mampu.
- e. Memenuhi kebutuhan hidup dan mencari sebuah kesejahteraan.
- Memenuhi kebutuhan hidup dari setiap individu merupakan motif yang tidak bisa dipungkiri lagi. Pasti semua orang melakukan kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan

hidupnya dengan tujuan untuk memperoleh sebuah kesejahteraan dalam kelangsungan hidupnya. Contohnya dari motif ini adalah seorang bekerja dari pagi hingga sore hari dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang berupa biaya pendidikan anak, biaya tagihan listrik dan lain sebagainya.

Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi merupakan suatu usaha yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Dalam kegiatan sehari-hari kita tentu saja menerapkan prinsip ekonomi. Jadi, prinsip yang pertama menunjukkan bahwa dalam melakukan pemilihan harus didasarkan pada pemilihan biaya yang paling efisien. Sedangkan yang kedua menunjukkan bahwa pemilihan berdasarkan pada aspek produktivitas. Tingkat efisiensi dan produktivitas merupakan dua istilah yang melekat dan menjiwai kegiatan ekonomi.¹⁰⁰ Prinsip ekonomi sendiri terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu :

1. Tiap orang menghadapi tarik ulur

Dalam aspek ini kehidupan manusia apabila ingin mendapatkan sesuatu maka terdapat suatu harga dari barang yang ingin kita dapatkan itu. Dengan kata lain, kita mesti mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Hal yang biasa dikorbankan dalam mendapatkan sesuatu itu biasanya berupa uang, kesempatan, maupun barang lainnya. Setiap individu akan menghadapi situasi tarik ulur ini. Misalnya saja, kita mengunjungi tempat wisata kita harus siap untuk mengorbankan uang dan waktu serta kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas lainnya.

2. Konsep biaya

Aspek selanjutnya adalah tentang biaya. Kita biasanya hanya menilai biaya adalah nilai yang mesti dibayar untuk mendapatkan yang dibutuhkan. Namun arti sebenarnya biaya tidak hanya menyangkut

¹⁰⁰ Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*.
Jakarta : Rineka Cipta.

masalah uang atau barang saja tetapi juga kesempatan. Konsep tentang kesempatan ini ialah harga yang harus dibayarkan atau dihilangkan untuk mendapatkan suatu yang kita inginkan baik berupa barang maupun kesempatan lain yang kita ingin.¹⁰¹

3. Berpikir pada margin

Berpikir pada margin artinya setiap individu yang akan melakukan kegiatan ekonomi akan berpikir rasional. Konsep ekonomi rasional merupakan suatu konsep dimana seseorang akan melakukan hal terbaik untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan dengan kesempatan yang ada. Dengan demikian konsep ekonomi rasional berfokus pada batas yang dapat dilakukan seseorang dengan pemikiran rasional untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan secara maksimal.

4. Reaksi terhadap insentif

Insentif dapat berupa hadiah atau hukuman untuk membujuk seseorang agar bertindak. Dalam ilmu ekonomi, insentif menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk membaca pergerakan pasar dengan menerapkan insentif dan nantinya akan diketahui bagaimana reaksi seseorang apabila diberi insentif. Pemberian insentif akan membuat seseorang lebih aktif dan antusias dalam bekerja hal itu disebabkan karena mereka menerima keuntungan tambahan dari pekerjaan sehari-harinya.¹⁰²

5. Pertukaran barang

Dalam kegiatan ekonomi tidak akan luput dengan pertukaran barang. Pertukaran barang disebabkan oleh faktor keterbatasan suatu negara atau pelaku ekonomi lainnya dalam memproduksi barang atau hal yang menjadi kebutuhannya. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa diantaranya yaitu dari sumber daya yang mereka milik, keterbatasan sumber daya manusianya, biaya, kesempatan, dan hal lainnya yang menunjang proses produksi. Setiap negara memproduksi suatu barang sesuai dengan kemampuan yang paling optimal dengan biaya rendah, kemampuan produksi maksimal dan kualitas barang yang

¹⁰¹ Hakim Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2012.

¹⁰² Fitria, Tira Nur., 2016, "Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02, No. 03, diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 17.10

bagus. Kemudian negara menjual barang produksi dalam negeri ke negara lain yang tidak memproduksi barang tersebut ataupun produksinya belum maksimal. Sebagai contoh yaitu Indonesia mengekspor minyak mentah untuk diolah di negara lain dan mengimpor kendaraan bermotor untuk digunakan di Indonesia.¹⁰³

6. Mekanisme pasar untuk mengatur kegiatan ekonomi

Mekanisme pasar merupakan suatu cara untuk mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Mekanisme yang seperti ini bertumpu pada keputusan kolektif dari rumah tangga serta perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya. Fungsi utama pasar adalah mengumpulkan perusahaan dan rumah tangga untuk memberikan penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa.

7. Pemerintah meningkatkan kinerja pasar

Mekanisme pasar dapat dianggap sebagai hal yang penting untuk mengatur kegiatan pasar, seolah-olah peran pemerintah tidak banyak. Namun, peran pemerintah dalam meningkatkan kinerja pasar sama pentingnya dengan mekanisme pasar. Tidak ada pemerintah yang menyediakan infrastruktur untuk aktivitas pasar; mekanisme pasar tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsinya. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk mencegah penipuan pasar. Terkadang intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan pasar. Kehadiran pemerintah mencegah kemungkinan pasar dikuasai oleh individu atau dimonopoli oleh pasar, sehingga mencegah kegagalan kinerja pasar.

8. Inflasi terjadi ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah banyak

Banyak faktor yang menyebabkan inflasi yang terjadi di suatu negara. Salah satunya adalah ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Tingginya produksi uang akan mengakibatkan peningkatan peredaran uang. Hal ini dapat menyebabkan nilai mata uang semakin

¹⁰³ Isnowati, Sri. 2014. Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol (21) (1)

turun sehingga dapat menyebabkan inflasi. Inflasi sendiri memiliki arti proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga disini tidak hanya pada satu atau dua barang saja namun juga terjadi pada barang-barang lainnya.¹⁰⁴

Penjelasan diatas merupakan contoh prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh di atas mungkin juga sering kita lakukan, beberapa di antaranya biasa kita lihat di siaran berita. Dengan demikian, prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari kehidupan manusia.

Perilaku Ekonomi Produksi

Produksi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian yang lebih luas, produksi didefinisikan sebagai setiap perilaku yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah “nilai guna” suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, tidak semua kegiatan atau proses produksi merupakan perubahan bentuk suatu barang. Dalam proses produksi untuk menambah nilai guna suatu barang dapat ditempuh melalui:

1. Mengubah suatu bentuk barang menjadi barang baru;
2. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
3. Mengatur waktu penggunaan suatu barang; dan
4. Menciptakan suatu jasa.

Sementara barang-barang yang dihasilkan dalam suatu proses produksi dapat dibedakan menjadi:

- a. Barang konsumsi yakni barang-barang yang langsung dapat memuaskan pemakai; dan
- b. Barang produksi yakni barang-barang yang sengaja diproduksi untuk proses produksi untuk menghasilkan barang-barang lain.

Akan tetapi, perbedaan antara barang produksi dan konsumsi tidak selalu jelas. Hal itu dikarenakan pada kondisi tertentu suatu barang dapat digolongkan sebagai barang konsumsi tetapi di saat lain justru digolongkan sebagai barang produksi. Barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam proses produksi memiliki keterbatasan sumber daya

¹⁰⁴ Parakkasi, Idris., 2016, “Inflasi dalam Perspektif Islam”, LAA MAISYIR, Vol. 3 No. 1, Juni 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 21.05

yang berupa: sumber daya alam (*land*), tenaga kerja (*labour*), modal (*capital*) dan kewirausahaan (*enterprise*) sementara kebutuhan manusia dengan barang dan jasa tidak terbatas.¹⁰⁵ Oleh karena itu, dalam menghasilkan barang dan jasa, produsen harus mempertimbangkan faktor produksi tersebut, yakni:

1) Sumber daya alam (*land*)

Sumber daya alam atau *land* ini berkaitan dengan sumber daya alami seperti lahan, air, matahari, hutan, mineral dan minyak bumi yang merupakan faktor utama bagi produksi. Seluruh sumber daya alam merupakan faktor produksi karena sudah tersedia.

2) Modal (*capital*)

Modal atau *capital* berkaitan dengan keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi seperti alat mesin, perlengkapan, pabrik, gudang, pengangkutan dan fasilitas distribusi yang digunakan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen akhir. Modal tidak hanya terbatas pada uang tetapi juga keseluruhan barang-barang modal biasa disebut sebagai investasi.

3) Tenaga kerja (*labour*)

Tenaga kerja merupakan unsur yang paling mendasar dalam proses produksi. Pengetahuan yang dimiliki seorang pekerja sangat bergantung pada aktivitas yang dilakukan orang tersebut dalam proses produksi. Pekerjaan produksi adalah kegiatan praktis yang paling mendasar. Dunia kerja merupakan sumber utama pengetahuan bagi seseorang untuk berkembang.¹⁰⁶ Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi dapat digolongkan menjadi:

- a) tenaga kerja terdidik yaitu golongan tenaga kerja yang telah mengikuti jenis dan jenjang pendidikan tertentu;

¹⁰⁵ Modul Bahan Belajar PGSD-IPS 2021, diakses pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 18.20

¹⁰⁶ Isnowati, Sri. 2014. Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol (21) (1)

- b) tenaga kerja terlatih yaitu golongan tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman tertentu; dan
 - c) tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu golongan tenaga kerja yang menangani pekerjaan yang tidak memiliki keahlian khusus.¹⁰⁷
- 4) Kewirausahaan (*enterprise*)

Kewirausahaan atau *enterprise* merupakan teknik dalam menggabungkan sumber-sumber daya yang ada dalam menghasilkan barang ataupun jasa. *Enterprise* ini juga berperan dalam membuat keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kebijakan dasar usaha yakni keputusan tidak rutin yang menjadi acuan jalannya bisnis perusahaan. *Enterprise* merupakan cara-cara yang diperkenalkan sebagai dasar bisnis sebuah produk baru, teknik-teknik produk baru dan format baru organisasi perusahaan.

Perilaku Ekonomi Distribusi

Distribusi merupakan suatu proses menyalurkan barang dan jasa yang berasal dari produsen sampai pada konsumen. Proses penyaluran barang dan jasa ini meliputi beberapa pihak yang saling mempengaruhi satu sama lain yaitu produsen, perantara (distributor) dan konsumen. Produsen perlu memikirkan saluran yang bagaimana yang akan dipilih untuk menyalurkan barang dan jasanya dengan tepat dan biaya murah, antara lain:

1. Membangun saluran distribusi

Secara ekonomi, kegiatan distribusi merupakan suatu upaya untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat. Dalam memutuskan saluran distribusi biasanya melibatkan:

- a. jumlah pedagang perantara yang akan dilibatkan;
 - b. bagaimana memelihara saluran-saluran komunikasi antara berbagai tingkat dari pedagang perantara;
 - c. seleksi pedagang perantara yang khusus;
 - d. penempatan menurut letak geografis dari persediaan barang; dan
 - e. lokasi dari pusat-pusat distribusi
2. Jenis-jenis saluran distribusi

¹⁰⁷ Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jenis saluran distribusi dapat terbagi menjadi tiga yaitu

- 1) Bentuk intensif merupakan jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil;
- 2) Bentuk selektif dengan hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer; dan
- 3) Bentuk eksklusif dengan hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk.

3. Saluran Distribusi

Distribusi langsung dari produsen ke konsumen yaitu perpindahan atau pergerakan material dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya adalah peternak mengirimkan susu ternaknya langsung ke rumah konsumen atau melalui toko pengecer miliknya sendiri dan melalui pos.

- 1) Produsen – grosir – pengecer

Barang yang didistribusikan dengan cara ini adalah yang tahan lama dan mudah didapatkan seperti barang yang terbuat dari logam, obat-obatan dan bahan makanan.

- 2) Produsen – pengecer – konsumen

Contoh barang yang didistribusikan dengan cara semacam ini adalah alat-alat rumah tangga, furniture dan alat-alat sekolah. Terkadang produsen membuat gudang-gudang cabang untuk memenuhi permintaan produk di daerah lain.

4. Lembaga-lembaga distribusi

- a) *Wholesaler* (grosir), Merupakan pedagang perantara yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali terutama kepada pengusaha lain dan bukan kepada konsumen. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan menyebarkan.
- b) Agen, Merupakan pedagang perantara yang tidak membeli dan memiliki barang yang mereka jual. Fungsi utamanya adalah melakukan penjualan bagi produsen. Agen biasanya dibayar dengan komisi berdasarkan volume penjualannya.
- c) Pedagang eceran, Merupakan perusahaan yang membeli barang-barang dari produsen atau dari grosir kemudian menjualnya

kepada konsumen. Lembaga yang berniaga secara eceran antara lain:

1) Toserba (*Department store*)

Merupakan lembaga pemasaran eceran yang menjual berbagai jenis barang yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen (bagian).

2) Pasar swalayan (Supermarket)

Merupakan toko yang sangat besar terutama menjual bahan pangan dengan harga-harga rendah. Setiap konsumen bekerja atas dasar melayani sendiri dan pembayaran dilakukan secara kontan.

3) Toko khusus

Toko yang strategi pemasarannya dengan menawarkan pilihan yang banyak dari barang-barang yang sejenis. Toko semacam ini banyak dijumpai di pusat-pusat perbelanjaan. Contoh toko khusus antara lain toko perhiasan, toko mainan dan toko sepatu.

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.

Selain dari pembangunannya, upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup salah satunya dengan berwirausaha ataupun mendirikan industri kecil. Tujuan dari berwirausaha ini akan menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa tercapainya kesejahteraan hidup. Sedangkan pengertian industri kecil itu sendiri adalah kegiatan ekonomi dilakukan oleh perorangan, rumah tangga atau pun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperniagakan secara komersial dengan jumlah tenaga kerja dan modal kecil .

Dalam industri kecil mempunyai empat aspek yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan sektor industri kecil, ada pun aspek tersebut adalah

a. Aspek Pemasaran

Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran¹⁷. Keberhasilan dalam berwirausaha ini tidak lepas dari adanya pemasaran yang baik. Pemasaran ini sangat penting bagi seseorang yang akan berwirausaha, apalagi untuk pengusaha kecil. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang dulunya berawal dari usaha kecil. Keberhasilan perusahaan tersebut salah satunya berkaitan dengan konsep pemasaran. Dalam pemasaran terdapat beberapa konsep yaitu pertama konsep produksi, pada konsep ini mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dimana pun dan harganya murah. Kedua konsep produk, dalam konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan menyukai barang-barang yang berkualitas. Ketiga konsep pemasaran, kunci untuk mencapai tujuan adalah mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Keempat konsep pemasaran sosial, organisasi menentukan kebutuhan, keinginan pasar tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan konsumen. Konsep pemasaran perusahaan ini diharapkan mampu untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pasar sekaligus memenuhinya dan membuat apa yang dapat di jual bukan menjual apa yang dibuat oleh perusahaan.

b. Aspek Manajemen Operasional

Manajemen operasional adalah proses yang mengubah input menjadi output berupa barang dan jasa, melalui kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarah dan mengawasi²⁰. Pada manajemen operasional ini mengubah input seperti: bahan baku, tenaga kerja, modal, energi, dan informasi menjadi output yang berupa barang dan jasa, Contoh jenis operasional universitas yang inputnya adalah dosen, staf, buku, fasilitas, dan pengetahuan dari input ini akan diubah menjadi output berupa mahasiswa terdidik, adanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen operasional antara lain:

1) Pemimpin

Seorang pemimpin sangat berpengaruh dengan perusahaan. keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin

sangat berpengaruh besar salah satunya terhadap kebijakan sebuah perusahaan

2) Tingkah laku karyawan

Tingkah laku karyawan ini juga berpengaruh terhadap manajemen operasional. Tingkah laku karyawan ini berhubungan dengan komunikasi dan karyawan juga mempunyai peran penting dalam berkomunikasi karena dengan cara seseorang berkomunikasi akan menentukan tingkat sukses atau gagalnya hubungan antar manusia.

3) Tingkah laku kelompok

Dalam hubungan kelompok setiap orang mempunyai kebutuhan tertentu. Dalam organisasi terdapat dua cara berkelompok yaitu kelompok kerja dan kelompok persahabatan.

Perilaku Ekonomi Konsumsi

Konsumsi adalah suatu aktivitas pemakaian barang dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung oleh individu atau kolektif individu dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Setiap anggota masyarakat tentu mengharapkan kehidupan layak yang sangat ditentukan oleh pemenuhan ketersediaan barang dan jasa dari segi kualitas dan juga kuantitas yang memadai. Kelayakan untuk hidup sangat bergantung pada tiga faktor yaitu pendapatan, ketersediaan barang dan jasa serta harga barang dan jasa tersebut karena bagi masyarakat konsumtif masalah yang saling bertentangan yakni kebutuhan dan penghasilan.¹⁰⁸

Penghasilan yang minim dan terbatas berbanding terbalik dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Jenis kebutuhan dasar manusia itu mencakup: kebutuhan biologis untuk hidup, kebutuhan yang timbul dari budaya peradaban dan kebudayaan manusia itu sendiri dan kebutuhan lain yang khas menurut masing-masing perorangan. Manusia mengatur hidupnya secara bijaksana dan terencana dengan menyesuaikan antara penghasilan dan kebutuhan serta norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

¹⁰⁸ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Perhatikanlah bagan di bawah ini tentang pola perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi supaya Anda dapat memiliki pemahaman yang utuh dengan topik konsumsi ini. Konsumsi merupakan tindakan pemenuhan kebutuhan dengan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Setiap orang akan berupaya memaksimalkan nilai guna barang dan jasa yang dikonsumsi. Syarat yang harus dipenuhi adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberi nilai batas yang sama besar dengan barang/jasa yang diperolehnya.¹⁰⁹

Perekonomian Indonesia Menurut UUD 1945

Sistem perekonomian Indonesia, dari awal sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini yang tercantum dalam UUD '45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Dalam UUD '45 pada ayat 1 berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan." Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan jika perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik. Dalam jurnal penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian Indonesia, Pasal 33 ayat (1) juga bisa dimaknai jika perekonomian disusun mulai dari tingkat nasional hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Seluruh susunan perekonomian ini didasarkan pada asas kekeluargaan.

Ayat 2 berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara." Dan ayat 3 berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat." Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3)

¹⁰⁹ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 3-4.

disebutkan jika negara menguasai berbagai cabang produksi yang memiliki kepentingan luas, bumi dan air serta kekayaan alam yang ada.¹¹⁰

Dapat kita ketahui bahwa hal yang termaktub dalam ayat tersebut dimaksudkan supaya seluruh komponen tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan rakyatnya. Penguasaan oleh negara ini juga memiliki artian bahwa perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja. Melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta untuk memakmurkan rakyatnya. Maka dari itu, penguasaan hal penting yang menyangkut kepentingan umum, dalam sistem perekonomian yang berdasar pada demokrasi ekonomi terdapat tiga bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi utama, yaitu usaha negara, koperasi, dan usaha swasta.

Ketiganya harus saling berinteraksi dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Interaksi ini pada dasarnya bertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali. Mekanisme pasar terkendali dapat menjamin tercapainya efisiensi penggunaan sumber dana masyarakat serta mendorong dilakukannya investasi di bidang-bidang usaha, dan Indonesia memiliki keunggulan komparatif, sehingga produk Indonesia dapat bersaing dengan hasil produksi negara-negara lain. Melalui proses persaingan yang sehat, mekanisme pasar terkendali juga mendorong industri untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi yang paling tepat untuk melaksanakan tugasnya.¹¹¹

Selain ketiga bentuk usaha, usaha negara, koperasi dan swasta, harus diperhatikan pula adanya lembaga-lembaga ekonomi lain dalam masyarakat misalnya konsumen, rumah tangga, dan serikat pekerja. Konsumen merupakan salah satu lembaga ekonomi yang sangat penting. Produsen dan pemerintah harus memberikan perhatian dan kepentingan konsumen dalam proses ekonomi, baik dengan mengusahakan lancarnya mekanisme permintaan dan penawaran maupun dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Serikat pekerja atau organisasi buruh merupakan wadah penting bagi para pekerja sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, bersama pengusaha harus memperhatikan nasib dan meningkatkan

¹¹⁰ Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*, (jakarta: 15-8-1990), hal. 5

¹¹¹ : Suwaldiman. *Tujuan Pelaporan Keuangan: Konsep, Perbandingan, dan Rekayasa Sosial*, Ekonisia FE UII 2005. Hlm. 60-63

kualitas pekerja, serta mengusahakan agar pekerja memiliki kesadaran dalam turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan.

Dari uraian diatas mengenai gambaran ringkas sistem perekonomian Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sistem perekonomian Indonesia secara normatif adalah sebagai berikut:

1. Dasar sistem perekonomian Indonesia adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia mendasari lahirnya sistem demokrasi ekonomi, yang sebenarnya merupakan mekanisme campuran antara mekanisme pasar dan mekanisme terpusat. Ciri khususnya adalah perimbangan antara pengendalian ekonomi oleh pemerintah dan pengendalian pasar.
2. Pengakuan kepemilikan pribadi yang terbatas. Sumber-sumber ekonomik yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat yang harus dikuasai oleh negara.
3. Swasta, pemerintah melalui BUMN dan koperasi adalah sebagai pelaku ekonomi yang utama.
4. Setiap pelaku ekonomi (termasuk didalamnya business enterprises) dituntut untuk ikut serta mewujudkan tanggungjawab sosialnya dalam mencapai kemakmuran bersama, disamping usahanya untuk memperoleh tujuan perusahaan secara individual perusahaan secara individual (misalnya laba).

Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dengan begitu, orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, sementara yang melakukan konsumsi disebut konsumen, dan adapun yang melakukan distribusi disebut distributor. Namun, pelaku ekonomi dalam produksi dan konsumsi tidak hanya produsen dan konsumen, tetapi meliputi juga pemerintah dan masyarakat luar negeri. Berikut beberapa penjelasan tentang pemerintah dan masyarakat luar negeri.

a. Rumah Tangga Konsumsi

Rumah tangga konsumsi memiliki faktor-faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sebagai pemilik faktor produksi, rumah tangga konsumsi akan menjual faktor-faktor produksi kepada produsen sehingga mendapat kompensasi berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan. Dalam kegiatan perekonomian, pihak konsumen memiliki peran antara lain:

- 1) Sebagai pemakai barang atau barang yang dihasilkan oleh produsen.
- 2) Menyediakan faktor-faktor produksi.
- 3) Dapat memengaruhi kebijaksanaan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen.
- 4) Memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa.
- 5) Dapat menaikkan harga faktor-faktor produksi, artinya dapat menaikkan harga sewa, upah, bunga, dan laba.

b. Rumah Tangga Produsen

Sebagai pelaku ekonomi kelompok rumah tangga produksi berperan melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut.

- 1) Sebagai penghasil barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
- 2) Sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen.
- 3) Dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya.
- 4) Memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen
- 5) Dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa
- 6) Sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produksi barang atau jasa.
- 7) Melakukan pembayaran faktor-faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Rumah Tangga Pemerintah

Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi guna menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, yakni

kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan keuangan internasional.

Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengatur, mengendalikan dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian masyarakat. Sementara sebagai pelaku produksi rumah tangga, pemerintah berperan menanamkan berbagai investasi untuk menghasilkan barang dan atau jasa lebih lanjut. Dengan begitu, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah:

1. Menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 2. Membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang kebutuhan pemerintah.
 3. Meminjam uang dari luar negeri.
 4. Menyewa tenaga kerja.
 5. Menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat.
- d. Masyarakat Luar Negeri

Peran masyarakat luar negeri dalam pelaku ekonomi adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang dagangan ke luar negeri, sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi adalah:

- 1) Menyediakan kebutuhan barang impor.
- 2) Membeli hasil barang ekspor suatu negara.
- 3) Menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri.
- 4) Masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur devisa, peminta kredit, dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia.
- 5) Sebagai penghubung antara pasar uang dalam negeri dan luar negeri.

Perekonomian Dua Sektor (Perekonomian Tertutup)

Perekonomian dua sektor merupakan hubungan antara dua pelaku ekonomi yaitu rumah tangga konsumen atau RTK dengan rumah

tangga produsen yaitu RTP. Sesuai dengan gambar di atas, aliran 1 atau pasar faktor, di mana RTP sebagai produsen memberikan barang dan jasa kepada RTK, dan sebagai timbal balik, RTK sebagai konsumen ada harga yang harus dibayar kepada RTP.

Untuk aliran 2, atau pasar produk, RTK sebagai pemasok faktor produksi kepada RTP, memberikan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Sebagai pengguna faktor produksi, maka RTP harus memberikan gaji, pendapatan, bunga, keuntungan, dan lain-lain kepada RTK.

Perekonomian Tiga Sektor

Sesuai dengan namanya yaitu perekonomian 3 sektor, berarti diagram ini merupakan hubungan antara 3 sektor yaitu RTK, RTP, dan Pemerintah. Pemerintah sebagai konsumen, membeli barang dan jasa dari RTP, dan timbal baliknya RTP sebagai produsen membayarkan pajak kepada pemerintah dan memberikan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pemerintah sebagai produsen memberikan retribusi barang dan jasa, gaji, bunga, dan juga berbagai subsidi kepada RTK, dan sebagai gantinya RTK membayarkan kepada pemerintah berupa pajak dan juga pemasok faktor produksi kepada pemerintah.

Perekonomian Empat Sektor (Perekonomian Terbuka)

Perekonomian empat sektor terdiri dari RTK, RTP, RTN atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Meskipun gambar circular flow diagram 4 sektor di atas terlihat rumit, namun kalau elo udah paham konsep diagramnya dari perekonomian dua sektor dan tiga sektor pasti kalian langsung paham. Interaksi antar pelaku ekonomi antara RTP-RTK, RTK-RTN, RTP-RTN, pada dasarnya sama, yang membedakan adalah adanya hubungan RTP dengan masyarakat luar negeri, dan hubungan antara RTK dengan masyarakat luar negeri. RTP sebagai produsen untuk masyarakat luar negeri yaitu melakukan ekspor, dan masyarakat luar negeri sebagai produsen untuk RTK atau masyarakat negara kita yaitu melakukan impor. Kurang lebih itu ya, penjelasan mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian beserta dengan hubungan antar pelaku ekonominya.

Rangkuman

Pengertian perilaku ekonomi mengacu pada psikologi dan ekonomi untuk mengeksplorasi mengapa orang terkadang membuat keputusan yang tidak rasional. Hal ini menyangkut mengapa dan bagaimana perilaku mereka tidak mengikuti prediksi model ekonomi. Keputusan seperti berapa banyak yang harus dibayar untuk secangkir kopi, apakah akan melanjutkan ke sekolah pascasarjana, apakah akan menerapkan gaya hidup sehat, dst terkait dengan hal ini. Semua hal itu adalah jenis keputusan yang dibuat kebanyakan orang pada suatu saat. Pengertian perilaku ekonomi persis menyoroti bagaimana mereka memutuskan untuk memilih A dan bukan B.

Dasar perilaku ekonomi pada manusia adalah karakteristik manusia sebagai makhluk yang emosional dan mudah teralih fokusnya membuat keputusan mereka cenderung berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. Misalnya, menurut teori pilihan rasional, jika seseorang ingin menurunkan berat badan dan dibekali informasi tentang jumlah kalori yang tersedia di setiap produk yang dapat dimakan, ia akan memilih produk dengan kalori minimal. Akan tetapi, pengertian perilaku ekonomi melihat dan bergerak lebih jauh dari sekadar sisi rasional.

Perilaku ekonomi tak jauh dengan istilah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian lainnya yaitu tindakan individu dalam menentukan pilihan dan menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kegiatan ekonomi sendiri mengacu pada kegiatan memproduksi, membeli, menjual dan mendistribusikan barang dan jasa yang melibatkan transaksi moneter. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai proses dimana persediaan modal atau sumber daya baik berupa barang maupun jasa yang dapat dimanfaatkan individu dalam memenuhi kebutuhannya. Keseluruhan proses ini tidak hanya melibatkan produksi barang dan jasa namun juga.

motif ekonomi adalah sebuah alasan tertentu yang mendasari seseorang dalam melakukan aktivitas perekonomian baik di lingkup kecil

maupun lingkup besar.¹¹² Seseorang melakukan aktivitas ekonomi selalu menggunakan fikiran dan akal sehatnya ketika dianggap memungkinkan maka ia akan melakukannya tapi ketika tidak memungkinkan maka ia akan mengurungkan niatnya tersebut.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 3-4.
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Fitria, Tira Nur., 2016, “Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Widarjono, Agus. (2017)). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*, (jakarta: 15-8-1990), hal. 5.
- Isnowati, Sri. 2014. *Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi jawa tengah*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol (21) (1).
- KEGIATAN BELAJAR Bahan Belajar PGSD-IPS 2021,
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

¹¹² Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.

- Parakkasi, Idris., 2016, “Inflasi dalam Perspektif Islam”, LAA MAISYIR, Vol. 3 No. 1, Juni 2016.
- Suwaldiman. Tujuan Pelaporan Keuangan: Konsep, Perbandingan, dan Rekayasa Sosial, Ekonisia FE UII 2005. Hlm. 60-63
- Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: IDEA ,1998)
- Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Rhenald Kasali, KEGIATAN BELAJAR Kewirausahaan, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2010)
- Irmayanti Hasan, Manajemen Operasional Perspektif Integratif, (Malang : UIN-Maliki press, 2011)
- Originally published February 2, 2021 , Updated by Silvia Dwi
- Ning Faidah, Harti, Waspodo Tjipto Subroto, pengaruh pengalaman ekonomi, control diri serta pendapatan siswa terhadap perilaku ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.

KEGIATAN BELAJAR 7

Demografi Indonesia

Fertilitas

1. Definisi Fertilitas

Fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Konsep ini memberikan makna fertilitas menyangkut jumlah kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita atau sekelompok wanita. Suatu kelahiran disebut sebagai lahir hidup apabila pada waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan seperti berteriak, bernafas, jantung berdenyut. Apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda seperti itu, maka disebut sebagai lahir mati yang didalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. Dengan demikian fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fekunditas adalah kemampuan biologis wanita untuk menghasilkan anak lahir hidup.

Seorang wanita yang secara biologis subur (fecund) tidak selalu melahirkan anak, misalnya bila menggunakan kontrasepsi. Fecunditas merupakan potensi fisik yang dimiliki oleh seorang wanita atau sekelompok wanita untuk melahirkan anak. Jika mereka menggunakan kontrasepsi maka potensi tersebut tidak mereka pergunakan. Fecunditas merupakan lawan dari arti kata sterilitas. Natalitas mempunyai arti sama dengan fertilitas.

Lahir hidup (live birth) menurut UN dan WHO adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Lahir mati (still birth) adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Abortus, kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu. Ada 2 macam abortus yaitu disengaja (induced) dan tidak disengaja (spontaneous). Induced abortion dapat karena alasan medis, misalnya karena mempunyai pengakit jantung yang berat sehingga membayakan jiwa si ibu, dan ada tidak berdasarkan alasan

medis. Masa reproduksi (*childbearing age*), masa dimana wanita mampu melahirkan, yang disebut juga usia subur (15-49 tahun).¹¹³

Konsep yang perlu dipahami berkaitan dengan fertilitas sebagai berikut:

a. Lahir Hidup (*Live Birth*)

United Nation dan *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan bahwa lahir hidup adalah suatu kelahiran seorang bayi yang menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, seperti: menangis, adanya gerakan-gerakan otot, bernafas, jantung berdenyut, tanpa memperhitungkan lama bayi dalam kandungan.

b. Lahir Mati (*Still Birth*)

Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi tanpa disertai adanya tanda-tanda kehidupan dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu.

c. Abortus

Abortus merupakan keluarnya janin dari dalam rahim ibu yang disengaja (*induced*) dan tidak disengaja (*spontaneous*). Penyebab abortus disengaja yaitu:

- Berdasarkan alasan medis, karena untuk menyelamatkan nyawa ibu
- Tidak berdasarkan alasan medis

d. Masa Reproduksi (*Childbearing age*)

Adalah masa dimana wanita mampu menghasilkan keturunan atau melahirkan bayi, disebut juga usia subur (15-49) tahun.¹¹⁴

2. Pengukuran dan Pola Fertilitas

Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang wanita hanya meninggal satu kali, namun akan dapat melahirkan berkali-kali, resiko untuk mengalami kematian hanya sekali, sedangkan resiko melahirkan bekalikali. Kompleksnya pengukuran fertilitas juga berkaitan dengan

¹¹³ A A I N Marhaeni, "Pengantar Kependudukan Jilid 1", (Denpasar:CV Sastra Utama, 2018) hlm 65

¹¹⁴ Lucy Radita Alma, *Ilmu Kependudukan* (Malang: Wineka Media, 2019), hlm. 18

kelahiran yang melibatkan 2 orang (suami dan istri), sedangkan kematian hanya melibatkan satu orang (orang yang meninggal tersebut). Selain itu tidak semua perempuan mengalami resiko untuk melahirkan jika dia tidak memperoleh pasangan, demikian juga ada mereka yang bercerai, atau janda.

Ada 2 macam pengukuran fertilitas yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas tahunan adalah mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko untuk melahirkan pada tahun tersebut.

Ada 4 ukuran-ukuran fertilitas tahunan yaitu:

a. Tingkat fertilitas kasar (Crude Birth Rate/CBR)

CBR adalah banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun.

$$CBR = B/P_m \times k$$

CBR = Crude Birth Rate

B = Jumlah kelahiran pada tahun tertentu

P_m = Penduduk pertengahan tahun

k = bilangan konstan yang biasanya bernilai 1000

Contoh:

Pada tahun 2015 jumlah penduduk pertengahan tahun sebanyak 136 juta orang. Jumlah kelahiran pada tahun tersebut 5.834.400 jiwa, maka CBR pada tahun tersebut adalah: $(5.834.400 : 136.000.000) \times 1000 = 42,9$. Angka tersebut berarti bahwa pada tahun 2015 tiap 1000 penduduk terdapat 42,9 kelahiran bayi.

b. General Fertility Rate/GFR (Tingkat Fertilitas Umum).

CBR sebagai ukuran fertilitas dianggap terlalu kasar karena membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Penduduk yang mempunyai resiko hamil adalah wanita usia reproduksi yaitu 15-49 tahun. Dengan demikian ukuran fertilitas perlu direvisi/dilakukan penyempurnaan.

$$GFR = B \times k \text{ Pf (15-49)}$$

Pf (15-49) = jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun.

Contoh:

Jumlah penduduk wanita 15-49 tahun pada pertengahan tahun 2010 adalah 30.351 dengan jumlah kelahiran 2.982 kelahiran, maka nilai GFR adalah: $2.982/30351 \times 1000 = 98,25$, ini berarti pada tahun 2010 setiap 1000 wanita umur 15-49 tahun, terdapat kelahiran sebanyak 98,25 3).

c. Age specific fertility rate (ASFR)

Di antara kelompok wanita usia reproduksi 15-49 tahun terdapat variasi kemampuan melahirkan, karena itu perlu dihitung tingkat fertilitas wanita pada tiap-tiap kelompok umur tersebut.

$$\text{ASFR}_i = \text{Bi}/\text{Pfi} \times k$$

ASFR_i = Tingkat fertilitas menurut kelompok umur tertentu

Bi = Jumlah kelahiran pada kelompok umur i

Pfi = Jumlah wanita kelompok umur i pada pertengahan tahun

No	Kelompok umur	Jumlah wanita	Jumlah kelahiran	ASFR per 1000 wanita
1	15-19	1.170.505	151.697	129,6
2	20-24	859.154	208.001	242,1
3	25-29	777.519	186.138	239,4
4	30-34	842.807	169.910	201,6
5	35-39	810.804	103.621	127,8
6	40-44	683.817	44.927	65,7
7	45-49	504.942	4999	9,9
8	Total			1016,1

Sumber: Data Hipotetis

Data perhitungan ASFR menunjukkan bahwa angka ASFR sangat bervariasi menurut kelompok umur. Pola yang terlihat dapat dikatakan seperti huruf U terbalik, yaitu angka ASFR meningkat dengan meningkatnya umur wanita, sampai pada titik tertinggi yaitu pada kelompok umur 25-29 tahun,

kemudian terus menurun sampai terendah pada kelompok umur 45-49 tahun.

- d. Tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran (birth order specific fertility rate/BOSFR)

Tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran sangat penting untuk mengukur tinggi rendahnya fertilitas suatu negara. Kemungkinan seorang istri untuk menambah kelahirannya sangat tergantung dari jumlah anak yang telah dilahirkannya.

$$\text{BOSFR} = \frac{\text{Jumlah kelahiran urutan ke } i \text{ (Boi)} \times k}{\text{Jumlah perempuan 15-49 tahun mid year}}$$

k = bilangan konstan yang nilainya 1000 Total dari BOSFR pada seluruh kelompok umur perempuan sama dengan GFR (General Fertility Rate)¹¹⁵

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fertilitas

Faktor sosial, akan mempengaruhi fertilitas melalui variabel antara, yang berjumlah 11 variabel antara yang dapat dibedakan menjadi:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan kelamin pada usia reproduksi:
- 1) Umur memulai hubungan kelamin
 - 2) Selibat permanen, yaitu proporsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin
 - 3) Lamanya masa reproduksi yang hilang karena:
 - perceraian, perpisahan, atau ditinggal pergi oleh suami;
 - suami meninggal dunia
 - Abstinensi sukarela
 - 4) Abstinensi karena terpaksa (impotensi, sakit, berpisah sementara yang tidak dapat dihindari)
 - 5) Frekuensi hubungan seks (tidak termasuk abstinensi)
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan konsepsi
- 1) Kesuburan dan kemandulan biologis (fekunditas dan infekunditas) yang disengaja

¹¹⁵ A A I N Marhaeni, "Pengantar Kependudukan Jilid 1", (Denpasar:CV Sastra Utama, 2018) hlm 65-68.

- 2) Menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi baik dengan cara kimiawi dan cara mekanis atau cara-cara lain
 - 3) Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disengaja, misalnya sterilisasi.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi selama kehamilan dan kelahiran
- 1) Kematian janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja
 - 2) Kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja. Kesemua
 - 3) variabel antara tersebut dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap fertilitas atau kelahiran.

Kondisi ini akan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Faktor-faktor sosial,ekonomi, dan budaya akan mempengaruhi fertilitas/kelahiran melalui variabel antara.¹¹⁶

Mortalitas

1. Konsep Mortalitas

Tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu wilayah tidak hanya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, namun juga menjadi sebuah barometer tentang kesehatan dan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Mortalitas atau kematian penduduk adalah salah satu dari variabel demografi yang penting. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi jumlah penduduk,tetapi juga mencerminkan kualitas SDM yang ada ditempat tersebut, yang sekaligus juga mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Definisi mati adalah peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah terjadi kelahiran hidup. Jadi mati hanya dapat terjadi setelah terjadi kelahiran hidup.

2. Sumber Data Mortalitas

¹¹⁶ A A I N Marhaeni, "*Pengantar Kependudukan Jilid 1*", (Denpasar:CV Sastra Utama, 2018) hlm 70

1) Registrasi,

Apabila sistem registrasi ini bekerja dengan baik, maka registrasi merupakan sumber data kematian yang ideal. Dalam registrasi kejadian kematian dilaporkan dan dicatat segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi. Namun di Indonesia data hasil registrasi penduduk masih jauh dari memuaskan (banyak peristiwa kematian yang belum tercatat dan kualitas datanya rendah) atau underestimate.

Banyak data atau peristiwa yang menyangkut peristiwa vital penduduk seperti kelahiran, kematian, maupun migrasi penduduk tidak dilaporkan oleh penduduk ke tingkat yang paling bawah misalnya lurah atau desa, sehingga jumlah yang dilaporkan akan menjadi jauh lebih sedikit daripada yang sebenarnya terjadi. Jika itu digunakan untuk menghitung peristiwa-peristiwa demografi tertentu, maka nilainya akan rendah yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian pengambilan kebijakan atau pembuatan keputusan untuk program-program tertentu jika menggunakan data yang berasal dari registrasi penduduk akan menghasilkan informasi yang kurang valid.

2) Sensus/survei

Selain data kematian atau mortalitas yang berasal dari data registrasi penduduk, juga terdapat sumber data lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber untuk menghitung atau mengetahui kondisi mortalitas penduduk. Dalam data Sensus Penduduk meskipun dilakukan melalui sensus, namun data tentang mortalitas dikumpulkan juga melalui survei atau sensus sampel yang hasilnya diberlakukan terhadap seluruh populasinya. Tingkat mortalitas yang dihitung berdasarkan data sensus penduduk adalah dengan menggunakan indirect method atau metode tidak langsung dengan menggunakan data rata-rata anak masih hidup dan rata-rata anak yang dilahirkan hidup.

- a) Rumah sakit
- b) Dinas pemakaman
- c) Kantor polisi lalu lintas, dan sebagainya.

Data kematian yang diperoleh dari hasil registrasi penduduk, dapat digunakan secara langsung untuk menghitung ukuran-ukuran kematian, seperti yang diminta oleh metode untuk menghitung pengukuran mortalitas. Berbeda halnya dengan data

yang bersumber dari hasil registrasi, data yang berasal dari hasil sensus penduduk dan survai dapat digunakan untuk menghitung ukuran-ukuran kematian dengan cara yang tidak langsung (indirect method).

3. Pengukuran Mortalitas

Seperti halnya pengukuran fertilitas, dalam mortalitas juga dikenal ada beberapa pengukuran, seperti berikut.

1) Angka Kematian Kasar/Crude Death Rate (CDR)

Adalah banyaknya kematian pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun.

$$CDR = D/P_m \times k$$

D = banyaknya kematian dalam tahun tertentu

P_m = Penduduk pertengahan tahun dalam tahun tersebut

k = bilangan konstan yang BERNILAI 1000.

Contoh:

Jumlah penduduk suatu daerah pada pertengahan tahun 136.000 jiwa. Jumlah kematian sepanjang tahun tersebut 2.298 jiwa. $CDR = 2.298/136.000 \times 1000 = 16,9$. Ini berarti pada tahun tersebut setiap 1000 penduduk terdapat kematian sebanyak 16,9 jiwa.

2) Age Specific Death rate (ASDR)/Tingkat Kematian Menurut Umur

Pengukuran CDR yang telah disampaikan sebelumnya masih sangat kasar, karena tingkat kematian akan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, dan pekerjaan.

$$ASDR = \frac{\text{Jumlah kematian pada kelompok umur } i}{\text{Jumlah penduduk kelompok umur } i \times 1000}$$

$$ASDR_i = D_i/P_{mix} \times 1000$$

Bila tingkat kematian dilihat dari segi jenis kelamin, maka tingkat kematian perempuan lebih rendah dibandingkan tingkat kematian laki-laki. Contoh tahun 1971 CDR laki-laki 21,8 sedangkan CBR perempuan 19,5.

Bila dilihat dalam kelompok umur, tingkat kematian pada kelompok umur 0-4 tahun sangat tinggi, lebih-lebih pada tingkat kematian bayi, sehingga perhitungan tingkat kematian bayi dibuat perhitungan tersendiri.

3) Infant Mortality rate (IMR)/Tingkat Kematian Bayi

IMR menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan suatu kelompok masyarakat. Jika IMR tinggi, maka kondisi kesejahteraan atau kesehatan masyarakat tersebut rendah, demikian sebaliknya. Salah satu indikator dibidang kesehatan yang selalu diprogramkan untuk diturunkan secara terus menerus adalah tingkat kematian bayi/IMR.

$$IMR = D_0/B \times 1000 (k)$$

D_0 = Jumlah kematian bayi pada tahun tertentu (di bawah 1 tahun)

B = jumlah kelahiran pada tahun tertentu

k = bilangan konstan yang bernilai 1000

Contoh :

Di suatu daerah pada tahun tertentu terdapat jumlah kematian bayi sebanyak 263.000 dan jumlah kelahiran pada tahun yang sama sebanyak 1.594.000. Jadi besarnya IMR pada tahun tersebut adalah:

$$134.000/1.367.000 \times 1000 = 98$$

Ini berarti pada tahun tersebut dari 1000 bayi yang lahir terdapat 98 kematian bayi sebelum bayi mencapai umur 1 tahun. Tingkat kematian bayi sangat bervariasi baik menurut daerah tempat tinggal (desa-kota), golongan sosial ekonomi, maupun antar provinsi. Tingkat kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat.

Selain itu tingkat kematian bayi tidak hanya sebagai refleksi masalah kesehatan yang bertanggung jawab langsung terhadap kematian bayi seperti penyakit diare, gizi buruk dan sebagainya, namun tingkat kematian bayi juga mencerminkan atau merefleksikan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan dan secara umum cermin dari tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Tingkat kematian bayi sebagai indikator tingkat perkembangan kondisi sosial

ekonomi masyarakat, berlaku baik untuk negara yang sedang berkembang maupun di negara maju. Kenyataan menunjukkan baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang, terdapat hubungan yang negatif antara status ekonomi orang tua dengan tingkat kematian bayi.

Beberapa istilah berkaitan dengan kematian dalam rahim (intra uterin)

- 1) Abortus, adalah kematian janin menjelang dan sampai umur 16 minggu
- 2) Immatur, adalah kematian janin antara umur kandungan di atas 16 minggu sampai sampai umur kandungan 28 minggu
- 3) Prematur , adalah kematian janin di dalam kandungan pada umur di atas 28 minggu sampai waktu lahir.

Kematian bayi di luar rahim (extra uterin)

- 1) Lahir mati (still birth), kematian bayi yang cukup masanya pada waktu keluar dari rahim, tidak ada tanda-tanda kehidupan.
- 2) Kematian baru lahir (neo natal death) adalah kematian bayi sebelum berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun
- 3) Kematian lepas baru lahir (post neo natal death) adalah kematian bayi setelah berumur satu bulan tetapi kurang dari setahun
- 4) Kematian bayi (infant mortality), adalah kematian setelah bayi lahir hidup hingga berumur kurang dari satu tahun.¹¹⁷

Mobilitas

1. Pengertian

Menurut Mantra (1985:157) dalam Erdiana (2017), mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu mobilitas permanen

¹¹⁷ A A I N Marhaeni, "Pengantar Kependudukan Jilid 1", (Denpasar:CV Sastra Utama, 2018) hlm 74-78

atau migrasi dan mobilitas non permanen atau mobilitas sirkuler. Migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik/negara ataupun batas administrasi/ batas bagian dari suatu negara.

2. Jenis-jenis Migrasi

Migrasi dapat di bedakan menjadi beberapa jenis:

- a. Migrasi masuk (*in migration*)
Yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah asal.
- b. Migrasi keluar (*out migration*)
Yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal.
- c. Migrasi neto (*net migration*)
Merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar.
- d. Migrasi bruto (*gross migration*)
Jumlah migrasi masuk dan keluar
- e. Migrasi total (*total migration*)
Adalah seluruh kejadian migrasi, mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi pulang.
- f. Migrasi internasional (*international migration*)
Adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.
- g. Migrasi semasa hidup (*life time migration*)
Adalah migrasi berdasarkan tempat kelahiran, adalah mereka yang pada waktu pencacahan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan daerah tempat lahirnya.
- h. Migrasi parsial (*partial migration*)
Adalah jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari satu daerah Osasal atau dari daerah asal ke satu daerah tujuan.
- i. Arus migrasi (*migration stream*)
Jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu.
- j. Urbanisasi (*urbanization*)
Bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan atau akibat dari perluasan kota.
- k. Transmigrasi (*transmigration*)
Adalah pemindahan dan perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di

dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan Negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Ukuran-ukuran migrasi

- a. Angka Mobilitas : adalah rasio dan banyaknya penduduk yang secara lokal dalam jangka waktu tertentu dengan banyaknya penduduk.

$$m = \frac{M}{P} k$$

m = angka mobilitas

M = jumlah mover

P = Penduduk

K = 1000

- b. Angka Migrasi Masuk: angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 orang penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

$$M1 = \frac{I}{P} k$$

M1 = angka migrasi masuk

I = jumlah migrasi masuk

P = penduduk pertengahan tahun

- c. Angka Migrasi keluar: angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 orang penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun.

$$M0 = \frac{O}{P} k$$

M0 = angka migrasi keluar

O = Jumlah migrasi keluar

P = penduduk pertengahan tahun

- d. Angka Migrasi Neto : selisih banyaknya migran masuk dan keluar ke dan dari suatu daerah per 1000 penduduk dalam satu tahun.

$$Mn = \frac{I-O}{P} k$$

Mn = angka migrasi neto

I = jumlah migrasi masuk

O = jumlah migrasi keluar
 k = penduduk pertengahan tahun

- e. Angka Migrasi Bruto: Angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk tempat asal dan jumlah penduduk tempat tujuan.

$$Mg = \frac{I-O}{P_1+P_2} k$$

Mg = angka migrasi bruto k = 1000

P1 = Penduduk di tempat tujuan

P2 = Penduduk ditempat asal

K = Konstanta nilai 1000¹¹⁸

4. Usia Produktif

Penduduk terbagi menjadi bermacam golongan diantaranya yaitu penduduk belum produktif, penduduk usia produktif dan penduduk non produktif. Penduduk belum produktif adalah penduduk yang memiliki usia dibawah 15 tahun. Penduduk usia tersebut diktakan sebagai penduduk yang belum mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam kegiatan ketenaga kerjaan. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang masuk dalam rentang usia antara 15- 64 tahun . Penduduk usia itu dianggap sudah mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam proses produksi . Sedangkan dalam katagori terakhir adalah penduduk yang berusia lebih dari 64 tahun Penduduk yang masuk dalam usia tersebut sudah tidak mampu lagi menghasilkan barang maupun jasa dan hisupnya ditanggung oleh penduduk yang termasuk dalam usia produktif. Penduduk usia produktif dianggap sebagai bagan dari penduduk yang ikut andil dalam kegiatan ketenagakerjaan yang sedang berjalan. Mereka dianggap sudah mampu dalam proses ketenagakerjaan dan mempunyai beban untuk menanggung hidup penduduk yang masuk dalam katagori penduduk belum produktif dan non produktif. Penduduk usia produktif saat ini tidak hanya di dominasi oleh masyarakat dengan rentang usia diatas 20 tahun yang sudah selesai menepuh pendidikannya. Saat ini, remaja usia muda yang masih bersekolahpun sudah banyak yang memiliki usahanya sendiri. Di beberapa kota kejadian seperti ini sudah biasa terlihat.

¹¹⁸ Lucy Radita Alma, *Ilmu Kependudukan* (Malang: Wineka Media, 2019), hlm. 29-31

Keterlibatan kaum muda dalam bekerja diawali sebagai tenaga pembantu di usaha keluarga, sebelum akhirnya mereka berusaha sendiri (BKKBN, 2014 : 29). Keikutsertaan remaja usia muda dalam kegiatan ekonomi dapat membantu memudahkan pemerintah mensosialisasikan bonus demografi. Bonus demografi ini dapat dimanfaatkan oleh remaja untuk membuka usaha kreatifnya sendiri. Untuk memanfaatkan bonus demografi pemerintah tidak hanya dengan menggunakan sektor industri tapi juga dapat menggunakan usaha kreatif yang dikelola oleh para remaja.¹¹⁹

5. Angkatan Kerja

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mempunyai potensi untuk membangun dan memproduksi yang sangat besar. Sumber daya alam (Natural Resources) dan sumber daya manusia (Human Resources) banyal tersedia dan seakan-akan tak kunjung habis. Besarnya sumber daya manusi, ini dapat dilihat pada banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja dai terhimpun dalam angkatan kerja.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja dan yang lazim dipakai adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas atau 15—64 tahun. Dapat dikatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang secara potensial dapat bekerja. Dengan perkataan lain tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang-barang dan jasa-jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Pengertian yang dipakai di Indonesia berdasar Sensus Penduduk 1971 mengatakan bahwa tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Menurut data Sensus Penduduk tahun 1971, banyaknya Tenaga Kerja (10 tahun ke atas) di Indonesia adalah 53,4% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi

¹¹⁹ Adisti Sukmaningrum, Ali Imron, *Memanfaatkan Usia Produktif Dengan Usaha Kreatif Industri Pembuatan Kaos pada Remaja di Gresik*, Vol. 05 No. 3 (2007). Hlm 3.

tenaga kerja terdiri dari angkatan Kerja (Labor Force) dan bukan Angkatan Kerja (Not in the Labor Force).

Yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja tapi siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah mereka yang menyumbangkan tenaga untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa dengan menerima imbalan upah berupa uang dan/atau barang. Dengan demikian, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif tersebut (yaitu memproduksi barang-barang dan jasa-jasa).

Angkatan Kerja di Indonesia pada tahun 1971 tercatat 41,3 juta atau 34,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Menurut "Labor Force Concept" yang digolongkan bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, baik mereka bekerja penuh (full time) maupun tidak bekerja penuh (part time). Yang termasuk dalam golongan kerja misalnya: pekerja tetap, petani, dokter dan sebagainya. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada tahun 1971 adalah 37,6 juta.

Yang termasuk dalam kelompok penganggur adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja menurut referensi waktu tertentu atau mereka yang pernah bekerja/dibebastugaskan tetapi sedang menganggur dan mencari pekerjaan. Menurut Sensus Penduduk 1971, penduduk Indonesia yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan tercatat 3,6 juta orang. Yang dimaksud dengan pengangguran tak kentara adalah mereka yang dimasukkan dalam kelompok bekerja, tetapi sesungguhnya mereka adalah kaum penganggur ditinjau dari segi produktivitasnya. Misalnya: Mereka yang bersama-sama bekerja dalam jenis pekerjaan yang sesungguhnya dapat dikerjakan sendiri. Yang termasuk dalam golongan ini adalah anggota rumah tangga yang membantu usaha yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga tanpa mendapat upah atau imbalan jasa.

Misalnya: Anggota rumah tangga yang membantu usaha yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga lainnya. Yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya

angkatan kerja dengan banyaknya tenaga kerja (untuk Indonesia penduduk berumur 10 tahun ke atas).

Rumus:

$$\frac{\text{Banyaknya angkatan kerja}}{\text{Banyaknya penduduk berumur 10 tahun ke atas}} = x\%$$
$$\frac{41.261.216}{80.507.076} \times 100 = 51,25$$

Angka partisipasi angkatan kerja Indonesia tahun 1971 adalah 51,25%. Angka partisipasi angkatan kerja di daerah pedesaan (53,25 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan di kota (42,07 persen). Yaitu macam pekerjaan yang sedang atau pernah dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang mencari pekerjaan dan pernah bekerja.

Jenis pekerjaan ini menurut ISCO (International 94 Standard for Classification of Occupation) dibagi dalam 8 golongan yaitu:

1. Profesionil, ahli-ahli tehnik dan sejenis.
2. Kepemimpinan dan ketatalaksanaan,
3. Administrasi, tata usaha dan lain-lain.
4. Penjualan.
5. Jasa
6. Petani.
7. Produksi dan sejenis dan operator alat-alat pengangkutan.

Lapangan pekerjaan menurut ISIC (International Standard for Industrial Classification) terdiri atas:

1. Pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan.
2. Pertambangan dan penggalian.
3. Industri pengolahan.
4. Listrik, gas dan air.
5. Bangunan.
6. Perdagangan, rumah makan dan hotel.
7. Angkutan, penyimpanan dan komunikasi.
8. Keuangan, asuransi dan perdagangan benda tak bergerak.
9. Jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan pribadi.

10. Kegiatan yang tidak/belum jelas.

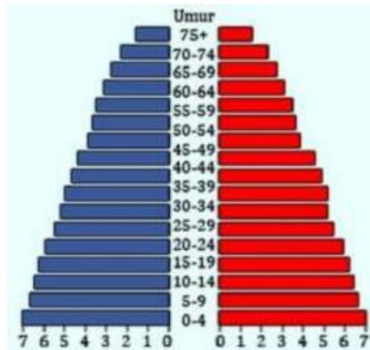
Status/kedudukan dalam pekerjaan daripada penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dibagi dalam:

1. Pengusaha tanpa buruh, adalah mereka yang melakukan usaha/pekerjaan atas resiko/tanggungannya sendiri dan tidak memakai buruh yang dibayar atau hanya oleh anggota rumah tangganya dengan tidak membayar upah.
2. Pengusaha pakai buruh, adalah seseorang yang dalam usahanya dibantu oleh satu atau beberapa buruh yang dibayar.
3. Buruh, adalah mereka yang bekerja dengan menerima upah atau gaji baik berupa uang maupun barang.
4. Pekerja keluarga, adalah anggota rumah tangga yang membantu usaha yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga tanpa mendapat upah.¹²⁰

6. Piramida Penduduk

Piramida penduduk merupakan sebuah grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang digambarkan secara visual. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- a. Ekspansif



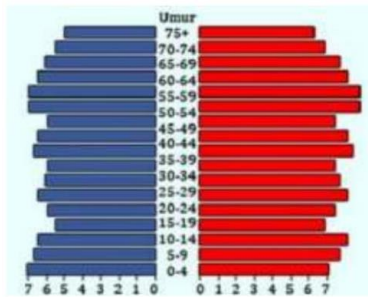
Keterangan :
Biru : laki-laki

¹²⁰ Suwito, *Pengantar Demografi*, (Malang: Ediidde Infografika, 2020), hlm: 91-95.

Merah : perempuan

Jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini terdapat pada negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran dan sudah mulai menurunnya tingkat kematian. Negara-negara yang termasuk dalam tipe ini adalah Indonesia, Malaysia, Philipina, India dan Costa Rica.

b. Konstruktif



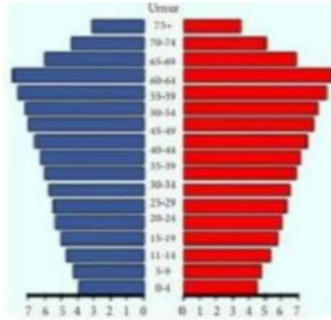
Keterangan :

Biru : laki-laki

Merah : perempuan

Jika penduduk yang berada dalam kelompok termuda jumlahnya sedikit. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang tingkat kelahiran turun dengan cepat, dan tingkat kematiannya rendah. Negara-negara yang termasuk dalam tipe ini adalah Jepang, dan negara-negara di Eropa Barat, misalnya Swedia.

c. Stasioner



Keterangan :
 Biru : laki-laki
 Merah : perempuan

Jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hamper sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang memiliki tingkat kematian dan kelahiran rendah, misalnya Jerman.¹²¹

Rangkuman

Ada beberapa fakta hal yang dapat dirangkum diantaranya:

1. Fertilitas adalah hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita, fertilitas mengacu pada jumlah bayi yang lahir hidup.
2. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari tiga komponen demografi selain fertilitas dan migrasi, yang dapat mempengaruhi jumlah, persebaran, dan komposisi umur penduduk. Informasi data mortalitas sangat diperlukan karena tinggi rendahnya mortalitas khususnya kematian bayi. suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk tetapi juga sebagai barometer kesehatan masyarakat suatu daerah.
3. Mobilitas adalah perpindahan penduduk, dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik melewati batas politis negara maupun batas administrasi/batas bagian dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap.

¹²¹ Lucy Radita Alma, *Ilmu Kependudukan* (Malang: Wineka Media, 2019), hlm 17.

4. Usia Produktif, Penduduk usia produktif saat ini tidak hanya di dominasi oleh masyarakat dengan rentang usia diatas 20 tahun yang sudah selesai menepuh pendidikannya.
5. Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja tapi siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah mereka yang menyumbangkan tenaga untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa dengan menerima imbalan upah berupa uang dan/atau barang.
6. Piramida penduduk merupakan sebuah grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang digambarkan secara visual. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Referensi

- Adisti Sukmaningrum, A. I. (2017). *Memanfaatkan Usia Produktif Dengan Usaha Kreatif Industri Pembuatan Kaos Pada Remaja Di Gresik*. 3.
- Alma, L. R. (2019). *Ilmu Kependudukan*. Malang: Wineka Media.
- Lili Somantri, N. H. (2016). *Buku Siswa Aktif dan Kreatif Geografi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Suwito. (2020). *Pengantar Demografi*. Malang: Ediide Infografika.
- A A I N Marhaen. (2018). *Pengantar Kependudukan Jilid 1*. Denpasar: CV Sastra Utama.

PROFIL PENULIS

Depict Pristine Adi merupakan anak pertama dari pasangan Sumiarso Hadi P dan Aryanti. Laki-laki kelahiran Jember, 05 November 1992 ini menempuh pendidikan dasar di kampung halaman, desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tepatnya di SDN Semboro V. Kemudian melanjutkan menimba ilmu di SMP Negeri 3 Tanggul, SMA Negeri 2 Tanggul, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di Kampus Ulul Albab (sebutan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) ia menempuh jalur sarjana di bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemudian Studi Lanjut Magister Program Pascasarjana UNY di bidan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saat ini Depict Pristine Adi merupakan dosen Pendidikan IPS di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Buku ini merupakan buku ajar pertama yang ditulis secara mandiri setelah sebelumnya berhasil menerbitkan buku baik secara bersama koleganya, serta berbagai artikel yang dimuat di proseding dan jurnal, baik nasional maupun internasional.